

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI  
UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI PERIODE 2016-2019**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Oleh :

**ALFITA APRILIA ZAHROTUNISA**  
**NIM : E20173026**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DESEMBER 2021**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI  
UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI PERIODE 2016-2019**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

Oleh :

**ALFITA APRILIA ZAHROTUNISA**

**NIM : E20173026**

Dosen Pembimbing :

**M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I**

**NIP. 19760812 200801 1 015**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DESEMBER 2021**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI  
UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI PERIODE 2016-2019**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

**Alfita Aprilia Zahrotunisa**  
**NIM. E20173026**

Disetujui Pembimbing



**M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I**  
**NIP. 19760812 200801 1 015**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI  
UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI PERIODE 2016-2019**

**SKRIPSI**

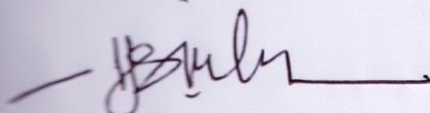
Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Desember 2021

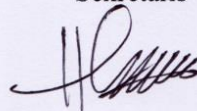
**Tim Penguji**

Ketua



**Dr. H. Saihan, S.Ag M.Pd. I**  
NIP. 19720217 200501 1 001

Sekretaris

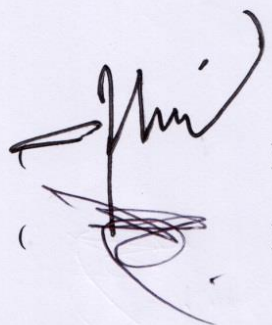


**Nur Hidayat, S.E., M.M**  
NUP. 201603132

Anggota :

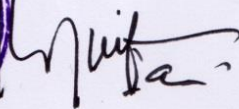
1. Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I.

2. M. F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I



Menyetujui

Dekan Fakultas dan Bisnis Islam



**Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M. Si.**  
NIP. 19680807 200003 1 001



## MOTTO

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ  
فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang”.<sup>1</sup>

(Q.S. Al An’am 165).



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup>Al-Qur’an, 6:165.

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Muhammad Zaenal Arifin dan Mama Mahmudah, yang merupakan inspirasi utama yang tiada hentinya membimbing, mendidik, menasehati, memotivasi, memberi dukungan moral maupun materiil serta selalu bersujud memanjatkan doa agar anaknya menjadi orang yang berguna dan sukses dunia akhirat.
2. Adik yang saya sayangi Safira Amelia Agustin Rahayu yang telah memberikan semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Keluarga besar Bapak (M. Zaenal Arifin) dan Mama (Mahmudah).
4. Ahmad Roby Ainun Naim, Rizkia Kurnia Pratami dan Nofia Candra Noor Wijayanti yang telah membantu, menemani dan memberi semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Teman saya, Fina Ariantina, Ira Qomariyatul Hasanah, Anis Viyatul Hamidah dan Ifa Dalia Ulabanati serta teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2017 yang telah berjuang bersama dari semester awal hingga tugas akhir kuliah.
6. Almamater khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tercinta, semoga karya ini bisa menjadi bukti cinta dan bukan menjadi bukti perpisahan.
7. Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya semata-mata karena Hidayah-Nya, tak lupa sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita di kehidupan yang penuh pengetahuan seperti saat ini.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2016-2019”** dengan lancar sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana di UIN KHAS Jember. Terlepas dari hal tersebut, kurangnya pengetahuan penulis tentu berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak merupakan hal yang berharga bagi penulis.

Tanpa motivasi, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, tentunya penulisan skripsi ini tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan seiring dengan hal tersebut, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama penulis menuntut ilmu di UIN KHAS Jember.

2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
3. Bapak Daru Anondo, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah UIN KHAS Jember.
4. Toton Fanshurna M,E.I selaku Dosen Pembimbing Akademik UIN KHAS Jember.
5. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I.,M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi ini yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Semua pihak yang terlibat dan telah berjasa dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Jember, 29 Desember 2021  
Penulis

**Alfita Aprilia Zahrotunisa**  
NIM. E20173026

## ABSTRAK

**Alfita Aprilia Zahrotunisa, 2021 : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2016-2019.**

Permasalahan dana alokasi umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pemerintahan pusat dan daerah tentang dana alokasi umum tersebut. Bagi pemerintah pusat, dana alokasi umum digunakan sebagai pemerataan atau mengisi fiscal gap (kesenjangan fiskal). Sedangkan bagi daerah, dana alokasi umum digunakan sebagai pendukung kecukupan suatu daerah. Permasalahan akan timbul ketika suatu daerah meminta dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhannya sehingga anggaran pengeluaran daerah yang mencerminkan kebutuhan sesungguhnya cenderung tidak efisien.

Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini ialah (1) Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada kab/kota di provinsi Bali periode 2016-2019? (2) Apakah dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada kab/kota di provinsi Bali periode 2016-2019? (3) Apakah terdapat pengaruh simultan PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2016-2019?

Tujuan penelitian ini ialah (1) Untuk mengetahui Pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (2) Untuk mengetahui Pengaruh signifikan Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (3) Untuk mengetahui Pengaruh DAU dan PAD secara simultan terhadap Belanja Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Bali.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab/Kota di Provinsi Bali. Data diperoleh dengan melakukan pengumpulan data berupa dokumentasi. Sedangkan pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *sampling jenuh*, dimana 8 kabupaten dan 1 kota digunakan sebagai sampel penelitian. Alat analisis data berupa uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda dan pengujian hipotesis dengan bantuan program SPSS Statistics versi 24.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan atau positif terhadap Belanja Daerah. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan atau positif terhadap Belanja Daerah. (3) Sedangkan secara simultan PAD dan DAU juga berpengaruh signifikan atau positif terhadap belanja daerah pada kabupaten.kota di Provinsi Bali periode 2016-2019 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $F_{hitung}$  1850.089 lebih besar daripada  $F_{tabel}$  4.14.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, dan Belanja Daerah.



## ABSTRACT

**Alfita Aprilia Zahrotunisa, 2021:** *The Effect of Regional Original Income and General Allocation Funds on Regional Expenditures in Regencies/Cities in the Province of Bali for the 2016-2019 Period.*

The problem with general allocation funds lies in the different perspectives between the central and local governments regarding the general allocation funds. For the central government, the general allocation fund is used for equity or filling the fiscal gap. As for the regions, general allocation funds are used to support the adequacy of a region. Problems will arise when a region requests general allocation funds according to their needs so that regional expenditure budgets that reflect actual needs tend to be inefficient.

The formulation of the problem studied in this study is (1) Does local revenue have a significant effect on regional spending in districts/cities in the province of Bali for the 2016-2019 period? (2) Does the general allocation fund have a significant effect on regional spending in districts/cities in the province of Bali for the 2016-2019 period? (3) Is there a simultaneous influence of PAD and DAU on Regional Expenditures in Regencies/Cities in Bali Province for the 2016-2019 period?

The purposes of this study are (1) to determine the significant effect of Regional Original Income on Regency/City regional expenditures in the Province of Bali. (2) To find out the significant effect of the General Allocation Fund on Regency/City regional expenditures in the Province of Bali. (3) To determine the simultaneous influence of DAU and PAD on Regional Expenditures in Districts/Cities in Bali Province.

This study uses a quantitative approach with secondary data sourced from the Report on the Realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget of the Regency / City in the Province of Bali. Data obtained by collecting data in the form of documentation. While the sampling of the study used a saturated sampling technique, where 8 districts and 1 city were used as research samples. Data analysis tools in the form of classical assumption test and multiple linear regression test and hypothesis testing with the help of SPSS Statistics version 24 program.

The results of this study indicate that (1) Regional Original Income has a significant or positive effect on Regional Expenditures. (2) The General Allocation Fund has a significant or positive effect on Regional Expenditures. (3) Simultaneously, PAD and DAU also have a significant or positive effect on regional spending in districts in Bali Province for the 2016-2019 period with a significance value of  $0.000 < 0.05$  and an Fcount value of 1850.089 which is greater than Ftable 4.14.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, dan Belanja Daerah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional.....	12
G. Asumsi Penelitian.....	15
H. Hipotesis.....	15
I. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	18
2. Populasi dan Sampel Penelitian.....	19

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	19
4. Analisis Data .....	20
J. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	31
B. Kajian Teori .....	39
1. Teori Keagenan .....	40
2. Pendapatan Asli Daerah .....	41
3. Dana Alokasi Umum .....	45
4. Belanja Daerah .....	47
<b>BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	49
B. Penyajian Data .....	54
C. Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	56
D. Pembahasan.....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Surat permohonan izin penelitian	
3. Surat selesai penelitian	
4. Matrik Penelitian	
5. Jurnal Kegiatan	
6. Laporan Realisasi PAD, DAU,dan Belanja Daerah	
7. Hasil Output SPSS Statistics Versi 24	
8. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Durbin Watson .....	23
Tabel 2. 1 Formulasi Penghitungan Dana Alokasi Umum .....	46
Tabel 3. 1 Data PAD, DAU dan Belanja Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2019 (Dalam Ribu Rupiah) .....	55
Tabel 3. 2 Hasil Uji Descriptive Statistics .....	57
Tabel 3. 3 Uji Multikolinieritas.....	60
Tabel 3. 4 Uji Durbin – Watson.....	63
Tabel 3. 5 Uji Autokorelasi.....	63
Tabel 3. 6 Regresi Linier Berganda .....	65
Tabel 3. 7 Uji t (Parsial).....	66
Tabel 3. 8 Uji F (Simultan) .....	68
Tabel 3. 9 Koefisien Determinasi.....	69

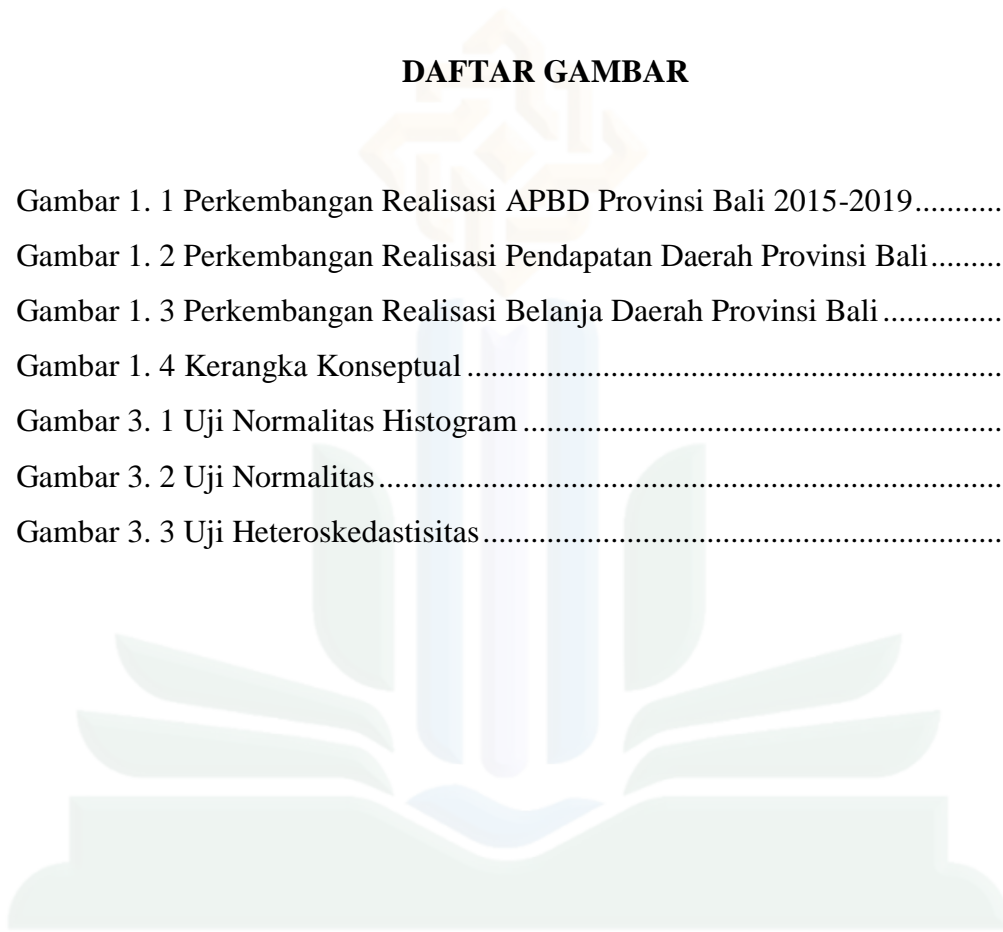
**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan Realisasi APBD Provinsi Bali 2015-2019.....	7
Gambar 1. 2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali.....	8
Gambar 1. 3 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali .....	8
Gambar 1. 4 Kerangka Konseptual .....	15
Gambar 3. 1 Uji Normalitas Histogram .....	59
Gambar 3. 2 Uji Normalitas .....	59
Gambar 3. 3 Uji Heteroskedastisitas.....	62



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah dimulai pada 1 Januari 2001. Namun dalam proses implementasinya masih terdapat berbagai kendala. Pasalnya, persoalan otonomi daerah sangat kompleks, memiliki banyak keterkaitan dan melibatkan banyak variabel. Salah satu isu penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, antar pemerintah daerah terjadi pembagian kewenangan baik dari segi keuangan maupun sumber pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, pengawasan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau hubungan fiskal antar pemerintah telah mengalami perubahan yang mendasar. Namun dalam perkembangan selanjutnya, UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 tidak lagi bergantung pada situasi, pedoman penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004. Hal ini merupakan babak baru yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam segala bidang kehidupan.<sup>2</sup>

Pemerintah daerah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja

---

<sup>2</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindi Persada, 2008), 9.

Daerah dan Prioritas Anggaran Sementara (PAS) sebagai pedoman pengalokasian sumber daya dalam APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah tahunan yang dibahas dan disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Ada dua jenis belanja daerah, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung didefinisikan sebagai bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Sedangkan, Belanja tak langsung didefinisikan sebagai bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari : belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.<sup>3</sup>

Menurut Mardiasmo Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik. Tujuan

---

<sup>3</sup>Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta:Erlangga, 2010), 87.

utama penyelenggaran otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah.<sup>4</sup>

Kebijakan otonomi daerah dapat memengaruhi perekonomian bahkan juga dapat mempercepat peningkatan perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih bisa mandiri dalam mengelola penerimaan daerah yang ditujukan untuk proses restrukturisasi atau upaya pembangunan daerah. Meningkatkan Belanja Daerah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, melalui Belanja Daerah pemerintah daerah membangun fasilitas publik dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik. Pembangunan fasilitas akan memicu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai Belanja Daerahnya masing-masing.<sup>5</sup>

Kejadian ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pemerintah mengatasi ketimpangan fiskal ini, dengan cara mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Otonomi daerah menekan adanya peranan serta kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan juga pengelolaan keuangan daerah yang diupayakan semakin membaik. Pemerintah daerah perlu mengubah komposisi belanja yang sebelumnya didominasi untuk penggunaan belanja rutin yang relatif

---

<sup>4</sup>Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002).

<sup>5</sup>Ida Bagus Dwi Putra dan A. A. N. B. Dwirandra, "Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, (2015).

kurang produktif, akan tetapi bisa mengalokasikan belanja yang mengacu kepada pendanaan atas pengadaan pelayanan umum kepada masyarakat di berbagai sektor, dengan semakin meningkatnya belanja maka akan dibutuhkan dana yang besar sehingga belanja untuk pemerintah dapat terpenuhi.<sup>6</sup>

Permasalahan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah terlalu menggantungkan Dana Alokasi Umum untuk membiayai belanja daerah dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Disaat DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha supaya pada periode berikutnya dana alokasi umum (DAU) yang diperoleh tetap. Proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling besar 20%. Kenyataan inilah yang menimbulkan perilaku asimetris pada pemerintah daerah. Yang mana permasalahan akan timbul ketika suatu daerah meminta dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhannya sehingga anggaran pengeluaran daerah yang mencerminkan kebutuhan sesungguhnya cenderung tidak efisien.<sup>7</sup>

Hasil penelitian empiris oleh Dessy Tri Wulansari menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara Dana Alokasi

---

<sup>6</sup>Sorong, "Analisis Hubungan DAU, PAD dan Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol.1 No 3.

<sup>7</sup>Elisabeth, Skripsi : "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat", (Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 2018).

Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.<sup>8</sup> Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abel Rinaldi menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Dana Perimbangan Berpengaruh terhadap Belanja Modal.<sup>9</sup> Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah sehingga besar kecilnya penerimaan dana alokasi khusus atau dana bagi hasil tidak signifikan pengaruhnya terhadap belanja daerah.<sup>10</sup> Akan tetapi pada penelitian Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattisahusiwa menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan

---

<sup>8</sup>Dessy Tri Wulansari, Skripsi : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2012-2013)”. (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

<sup>9</sup>Abel Rinaldi, Skripsi : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan”, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang : 2016).

<sup>10</sup>Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol.21 No.1 (Juli, 2019).



Timur.<sup>11</sup> Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil temuan, sehingga menjadi celah penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas bagaimana penerimaan daerah yang diantaranya pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dapat mempengaruhi Belanja Daerah.

Pada tahun 2020 Bali telah mendapatkan penghargaan sebagai destinasi wisata terbaik di Asia versi Tripadvisor yang merupakan platform wisata terbesar di dunia. Selain itu, Bali juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai *the best destination of the year* pada ajang *TTG (Travel Trade Gazette) Award 2019*.<sup>12</sup> Perkembangan pariwisata di Provinsi Bali telah memungkinkan untuk berkembangnya Industri yang terkait langsung dengan pariwisata, seperti Industri pengolahan, hiburan, perdagangan, perhotelan dan juga restoran. Dalam hal ini provinsi Bali merupakan salah satu objek wisata tujuan wisatawan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah harus cerdas mengelola kinerja keuangannya terutama sumber pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan asli daerah dapat semakin meningkat. Kemampuan suatu daerah untuk menggali pendapatan asli daerah tentunya akan memengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut.<sup>13</sup>

---

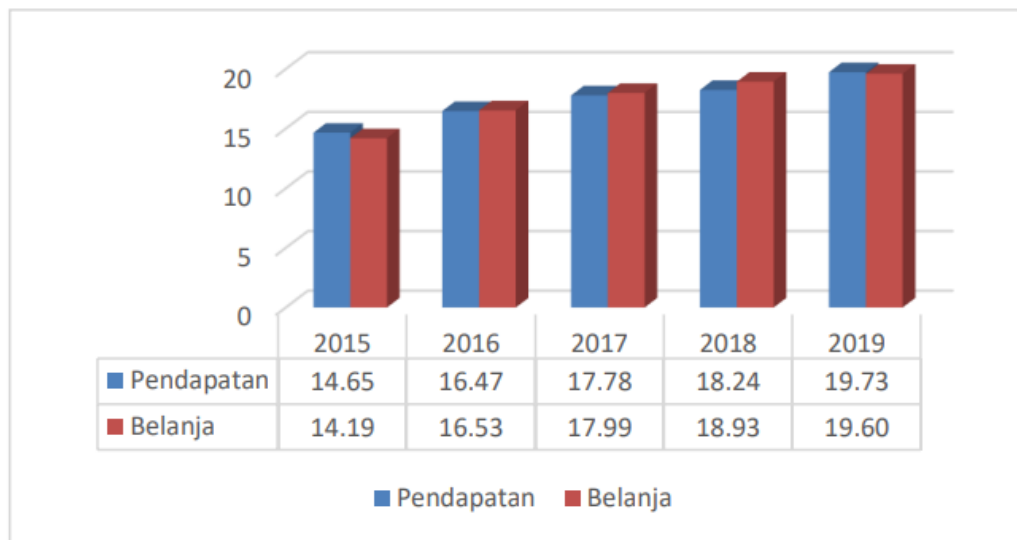
<sup>11</sup>Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattisahusiwa, ” Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah”, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, Vol.14 No.1 (2018).

<sup>12</sup>Kompas.com, “Kalahkan London Bali Jadi Destinasi Terbaik Dunia Versi Tripadvisor”. <https://travel.kompas.com/read/2021/01/28/121200627/kalahkan-london-bali-jadi-destinasi-terbaik-dunia-versi-tripadvisor?page=all> (diakses pada tanggal 5 November 2021)

<sup>13</sup>Anak Agung Gede Mantra Suarjana dan Nyoman Indah Kusuma Dewi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali”, *Jurnal bisnis dan kewirausahaan*, Vol. 14 No. 2 (Juli,2018).

**Gambar 1. 1**  
**Perkembangan Realisasi APBD Provinsi Bali 2015-2019**

*Gambar 1. Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali 2015 – 2019 (Triliun Rupiah)*



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

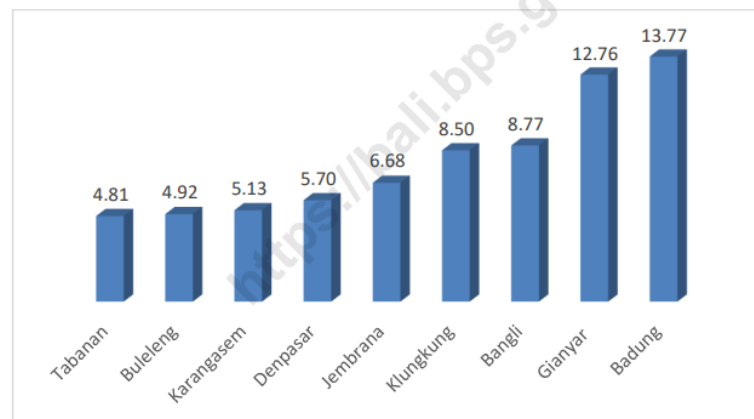
Terlihat pada tabel perkembangan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada 8 kabupaten dan 1 kota yang tersebar di provinsi Bali tahun 2015-2019 terlihat adanya trend kenaikan pendapatan maupun belanja daerah yang mana jumlah pendapatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bali mencapai 14,65 triliun rupiah di tahun 2015 kemudian menjadi 19,73 triliun rupiah pada tahun 2019, jika dipersentasekan pertumbuhannya mencapai 34,68 persen atau tumbuh rata – rata 8,67 persen per tahunnya. Dalam rentang waktu 2015 – 2019, belanja daerah tumbuh dari 14,19 triliun pada tahun 2015 menjadi 19,60 triliun di tahun 2019, mengalami kenaikan sebesar 38,13 persen atau naik rata - rata 9,53 persen per tahun. Seiring

dengan peningkatan pendapatan daerah, total belanja daerah pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali juga mengalami kenaikan.<sup>14</sup>

### Gambar 1. 2

#### Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Gambar 3. Rata - Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen)

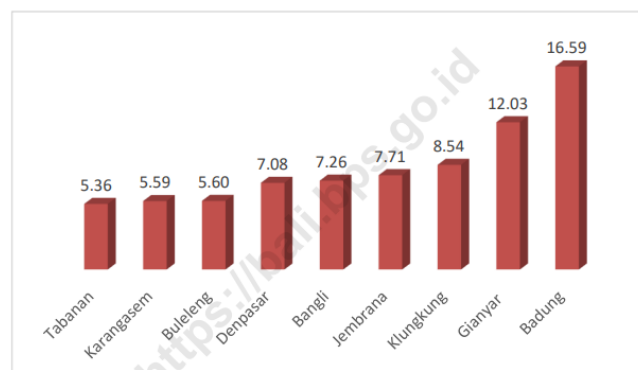


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

### Gambar 1. 3

#### Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali

Gambar 4. Rata - Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

<sup>14</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2015-2019.

Pada gambar diatas Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Gianyar tercatat sebagai wilayah dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan per tahunnya lebih besar dari pada rata-rata pertumbuhan pengeluaran per tahunnya. Dimana seiring dengan peningkatan pendapatan daerah, seharusnya diikuti juga dengan kenaikan total belanja daerah pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali. Selain itu, dari sektor penerimaan pendapatan asli daerah, serta pemberian dana perimbangan oleh pemerintah pusat juga akan berpengaruh dikarenakan pembelanjaan untuk pengadaan fasilitas publik berasal dari anggaran pendapatan daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal yang berupa Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah. Berdasarkan latar belakang diatas maka judul yang digunakan peneliti yaitu **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2016-2019”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali ?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali?

3. Apakah terdapat pengaruh simultan PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
3. Untuk mengetahui pengaruh DAU dan PAD secara simultan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Berdasarkan tujuan diatas, maka diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Manfaat teoritis
  - a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.



b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.

## 2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Pemerintah Daerah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan demi kemajuan daerah.

b. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.<sup>15</sup> Adapun variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dengan uraian sebagai berikut :

#### a. Variabel independen (X)

Variabel independent atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

---

<sup>15</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 38.

variabel terikat.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Pendapatan Asli Daerah ( $x_1$ ), dan Dana Alokasi Umum ( $x_2$ ).

b. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karenanya adanya variabel bebas.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah belanja daerah.

## 2. Indikator Variabel

- a. Indikator Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta PAD yang sah.
- b. Indikator Dana Alokasi Umum terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.
- c. Indikator Belanja Daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.<sup>18</sup>

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang digunakan sebagai pijakan pengukuran secara empiris terhadap variabel penelitian dengan rumusan yang didasarkan pada indikator variabel.<sup>19</sup> Definisi operasional penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>16</sup>Sugiono, 39.

<sup>17</sup>Sugiono, 39.

<sup>18</sup>Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2015-2019.

<sup>19</sup>Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 38.

## 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.<sup>20</sup>

## 2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Namun, daerah kabupaten/kota yang ada di provinsi Jakarta tidak menerima DAU karena otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup provinsi sesuai dengan perundangan yang berlaku. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.<sup>21</sup> Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 porsi DAU ditetapkan sekurang-

---

<sup>20</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindi Persada, 2008), 52.

<sup>21</sup>Ahmad Yani, 52

kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, proporsi pembagian DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota.<sup>22</sup>

### 3. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda.<sup>23</sup> Belanja daerah dipergunakan oleh provinsi dan kabupaten/kota guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah dalam suatu bagian atau bidang tertentu pada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas

---

<sup>22</sup>Kusnandar Dodik Siswanto, "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal", *Jurnal Penelitian Universitas Indonesia*, (2012).

<sup>23</sup>Abdul Halim, 2007, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.

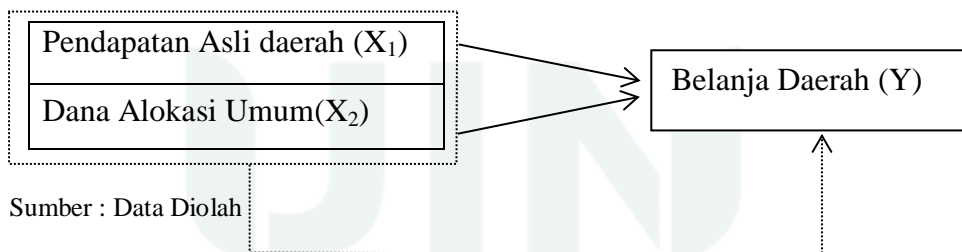
Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda.<sup>24</sup>

### G. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian bisa disebut juga sebagai anggapan dasar, yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Anggapan dasar harus dirumuskan secara jelas sebelum peneliti melangkah mengumpulkan data.<sup>25</sup> Asumsi pada penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum, (DAU) Terhadap alokasi belanja daerah. Asumsi penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1. 4**

#### **Kerangka Konseptual**



#### **Keterangan :**

Uji secara parsial :  $\longrightarrow$

Uji secara simultan :  $\dashrightarrow$

### H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun

<sup>24</sup>Novi Pratiwi, 2007, "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia". Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.

<sup>25</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 39.

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah”, maka hipotesisnya sebagai berikut :

#### **1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.**

Jika PAD suatu daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali sumber potensi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja daerah pun akan ikut meningkat. Penelitian sebelumnya tentang Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah telah dilakukan oleh Devita dkk.<sup>27</sup> Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa dan Permata<sup>28</sup> juga menemukan bahwa PAD

---

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014), 99.

<sup>27</sup>Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol.2 No.2 (2014), 63-70.

<sup>28</sup>Permata Zhara Sasaki Widoasri, 2016, “Pengaruh pendapatan asli daerah (pad) dan dana perimbangan terhadap belanja modal”. STIESIA Surabaya.

berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah.<sup>29</sup> Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>1</sub>: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.**

## **2. Pengaruh Dana Alokasi umum terhadap Belanja Daerah.**

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi sebuah daerah. DAU menjadi jaminan kesinambungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dana transfer ini akan menambah alokasi Belanja Daerah yang berguna untuk memenuhi segala pelayanan masyarakat serta pembangunan daerahnya. Terlebih lagi adanya tujuan untuk pemerataan dengan memperhatikan kondisi sekitar sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.<sup>30</sup> Hal ini diperkuat oleh penelitian Askam Tuasikal<sup>31</sup> dan Afrizawati yang menunjukkan Dana Alokasi Umum berpengaruh pada Belanja Daerah.<sup>32</sup> Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>2</sub>: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.**

<sup>29</sup>Kesit Bambang Prakoso, “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empiris Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)”, *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol.8 No.2, 101-118.

<sup>30</sup>UU No.33 Tahun 2004.

<sup>31</sup>Askal Tuasikal, “Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”, *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Vol.1 No.2 (2014), 142-155.

<sup>32</sup>Afrizawati, “Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, Vol.2 No.1, 21-30.



### 3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah.

Dalam penelitian Kesit Bambang Prakosa menyatakan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah yang di dapat akan menentukan besarnya alokasi Belanja Daerah.<sup>33</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Andri Devita<sup>34</sup>, Diah Ayu Kusumadewi dan Arif Rahman<sup>35</sup> juga menyatakan bahwa PAD dan DAU menunjukkan pengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi Belanja Daerah. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>3</sub>: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.**

## I. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan jenis penelitian analisis asosiatif yaitu suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan dalam penelitian ini

<sup>33</sup>Kesit Bambang Prakoso, “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empiris Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)”, *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol.8 No 2, (2012), 101-118.

<sup>34</sup>Andri Devita, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 2 No. 2 (2004).

<sup>35</sup>Diah Ayu Kusumadewi dan Arif Rahman, “Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol.11 No.1 (Juni, 2007), 67–80.

menganalisis hubungan kausal yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi).<sup>36</sup>

## 2. Populasi dan Sampel Penelitian

### a. Populasi Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.<sup>37</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 8 Kabupaten (Badung, Bangli, Bueleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan) dan 1 Kota (Denpasar) di Provinsi Bali .

### b. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>38</sup> Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Sampling Jenuh*, yaitu dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian.

## 3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Observasi Non-Partisipan

Dalam hal ini peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independent.

---

<sup>36</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 36-37.

<sup>37</sup>Sugiyono, 80.

<sup>38</sup>Sugiyono, 81.

#### b. Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis dan menghimpun informasi-informasi dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

#### c. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain.<sup>39</sup> Data ini biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini iyalah data runtun waktu (time series) selama 4 tahun. Data yang digunakan yaitu laporan realisasi APBD provinsi Bali dari laman website Badan Pusat Statistik Bali atau [www.bali.bps.go.id](http://www.bali.bps.go.id)

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini jenis analisis statistik yang digunakan adalah *analisis statistik deskriptif* digunakan untuk memberikan deskripsi suatu objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum dari data tersebut. Variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan melalui statistik deskriptif dengan melihat nilai mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan standart deviasi.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini variabel independennya iyalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum,

---

<sup>39</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014), 308.

<sup>40</sup>Sugiyono dan Agus Susanto, *Cara Mudah Belajar SPSS dan LISRELL*, 11.

sedangkan variabel dependennya yakni Belanja Daerah. Dalam hal ini akan melihat pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah. Untuk menganalisis dan menguji data yang ada dalam penelitian ini dengan menggunakan *Statistic Program for Social Science 24*.

Dalam penelitian ini tahap analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

**a. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelatakan penggunaan model regresi dalam penelitian. Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis, dimana uji ini untuk mengetahui apakah data telah memenuhi asumsi-asumsi dasar serta memastikan bahwa data yang dihasilkan terdistribusi normal. Diperlukan uji asumsi klasik ini adalah untuk menghindari estimasi yang bias, adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah :

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng (*Bell-shaped curve*) yang kedua sisinya melebar hingga tak terhingga. Uji normalitas tidak dilakukan pervariabel

(*univariate*) tetapi hanya terdapat nilai residual terstandarisasinya *mutivariate*.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan analisis grafik. Pengujian normalitas menggunakan analisis grafik dilakukan dengan menggunakan histogram dengan menggambarkan variabel dependen sebagai sumbu vertikal dan nilai residual terstandarisasi digambarkan dengan sumbu horizontal. Jika *Histogram Standardized Regression Residual* membentuk kurva seperti lonceng maka nilai residual tersebut dinyatakan normal. Cara lain untuk menguji normalitas dengan pendekatan grafik adalah menggunakan *Normal Probability Plot*, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dengan data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Distribusi kumulatif dari data sesungguhnya digambarkan dengan *Plotting*. Jika data normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya.<sup>42</sup>

## 2. Uji Multikoleniaritas

Pengujian ini berguna untuk mengidentifikasi apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik sebenarnya tidak terjadi korelasi di antara

---

<sup>41</sup>Ibid., 69.

<sup>42</sup>Ibid., 69.

variabel bebasnya.<sup>43</sup> Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Batasan umum yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* > 0,1 atau *VIF* < 10 berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi.

### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*time-series*) atau ruang (*cross-section*). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pada prosedur pendeteksian masalah autokorelasi dapat digunakan besaran Durbin-Watson. :

**Tabel 1. 1**  
**Durbin Watson**

Ketentuan	Kesimpulan	Hipotesis Awal
$0 < d < d_L$	Tolak	Tidak ada autokorelasi positif
$d_L \leq d \leq d_u$	Tidak ada keputusan	Tidak ada autokorelasi positif
$4 - d_L < d < 4$	Tolak	Tidak ada autokorelasi negatif
$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_L$	Tidak ada keputusan	Tidak ada autokorelasi negatif
$d_u \leq d \leq 4 - d_u$	Tidak tolak	Tidak ada autokorelasi positif maupun negatif

### 4) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada

<sup>43</sup>Ghozali. *Aplikasi analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016).

model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan homoskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas sering terjadi pada penelitian yang menggunakan data *cross-section*. Penelitian ini menggunakan metode grafik *scatterplot* untuk menguji adanya heteroskedastisitas. Jika terdapat pola tertentu pada grafik *scatterplot* seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang) maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi secara lebih lanjut mengenai variabel bebas mana yang menjadi penyebab terjadinya masalah heteroskedastisitas, kita dapat mengamati *scatterplot* dimana variabel bebas sebagai sumbu horizontal dan nilai residual kuadratnya sebagai sumbu vertikal.<sup>44</sup>

#### b. Analisis Regresi Berganda

Regresi berganda adalah analisis pengaruh antara dua variabel bebas atau lebih ( $X_1, X_2, X_3$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ ).<sup>45</sup>

Rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

$Y$  = alokasi belanja daerah

$\alpha$  = Konstanta

<sup>44</sup>Ibid.,95.

<sup>45</sup>Suliyanto, *Ekonometrika Terapan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 53.



$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah

$X_2$  = Dana Alokasi Umum

$e$  = Standar eror

### c. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis maka peneliti melakukan beberapa uji, yaitu analisis regresi berganda, uji  $t$  secara parsial, uji  $F$  secara Simultan, serta Koefisien Determinasi

#### 1. Uji Statistik $t$ (Uji Parsial)

Uji  $t$  digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0.05 (5%). Apabila tingkat signifikansi setiap variabel berada dibawah 0.05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.<sup>46</sup> Adapun langkah-langkah uji  $t$  adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

##### a) Menentukan hipotesis

➤  $H_0 : b_1 \neq 0$  artinya dalam notasi  $H_0$  adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara PAD terhadap belanja daerah

$H_1 : b_1 = 0$  artinya dalam notasi  $H_1$  adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap belanja daerah

<sup>46</sup>Agus Widarjono, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2009), 46.

<sup>47</sup>Mundir, *Statistik Pendidikan* (Jember: STAIN-Press Jember, 2014), 119.

➤  $H_0 : b_2 \neq 0$  artinya dalam notasi  $H_0$  adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara DAU terhadap belanja daerah

$H_2 : b_2 = 0$  artinya dalam notasi  $H_2$  adalah terdapat pengaruh yang signifikan DAU terhadap belanja daerah

b) Nilai Kritis

Nilai Kritis didapat dari tabel distribusi t dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ )

c) Menentukan  $t_{hitung}$  dengan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{x - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Keterangan:

$x$  : rata-rata nilai dari pengumpulan data

$\mu_0$  : nilai yang dihipotesiskan

$s$  : standar deviasi

$n$  : jumlah sampel penelitian

d) Membuat keputusan dengan membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Untuk mencari nilai  $t_{tabel}$  adalah  $df = n-k$ .

e) Membuat Kesimpulan

➤ Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $< 0,05$  maka variabel independen ( $X$ ) atau PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ( $Y$ ) yaitu belanja daerah.

➤ Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $> 0,05$  maka variabel PAD dan DAU berpengaruh tidak secara

signifikan terhadap variabel dependen (Y) atau Belanja daerah.

## 2. Uji Simultan F

Uji F bertujuan menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F ini juga sering disebut sebagai uji simultan, untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel terikat atau tidak. Langkah-langkah dari Uji F yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>

### a. Menentukan Hipotesis

$H_3 = \beta_1 = \beta_2 = 0$ , berarti secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu PAD, dan DAU terhadap variabel dependen yaitu belanja daerah.

$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$ , berarti secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu PAD, dan DAU terhadap belanja daerah.

### b. Nilai Kritis

Nilai kritis didapat dari tabel F dengan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ )

### c. Nilai $F_{hitung}$

<sup>48</sup>Ridwan dan Sunarto, *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis* (Bandung:Alfabeta, 2014),86.

$$F_{hitung} = \frac{R^2 (n - k - 1)}{K(1 - R^2)}$$

Keterangan :

$R^2$  = Koefisien Determinasi

n = jumlah data atau sampel

k = jumlah variabel independen

d. Keputusan

Membuat keputusan dengan membandingkan antara  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Untuk mencari nilai  $F_{tabel}$  adalah  $df = n - k$ .

e. Membuat kesimpulan:

➤ Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima, menyatakan bahwa masing-masing variabel PAD dan DAU secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel belanja daerah.

➤ Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak, menyatakan bahwa PAD dan DAU secara simultan mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap variabel belanja daerah.

3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model.<sup>49</sup> Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi:

$$0 < R^2 < 1$$

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Nilai  $R^2$  mendekati 0, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas.
- Nilai  $R^2$  mendekati 1, berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Format

---

<sup>49</sup>Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), 95.

penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti pada daftar isi.<sup>50</sup>

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan satu sama lain. Masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab.

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, asumsi penelitian, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II Kajian Kepustakaan**

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan acuan dan penguat dalam penelitian ini, dan kajian teori yang membahas teori-teori tentang pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja daerah.

### **BAB III Penyajian Data dan Analisis Data**

Penyajian Data dan Pembahasan, bab ini membahas tentang penyajian data dan analisis yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis dan pengujian hipotesis dan pembahasan.

### **BAB IV Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, saran untuk penelitian selanjutnya dan pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>50</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 42.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sejauh mana keaslian karya tulis, persamaan dan perbedaan yang hendak dilakukan.<sup>51</sup> Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang terlebih dahulu melakukan penelitian, diantaranya :

1. Skripsi penelitian oleh Dessy Tri Wulansari. Yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2012-2013)”. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan hipotesis kelima menunjukkan bahwa terdapat flypaper effect pada Belanja Pemerintah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, hal ini terjadi karena pengaruh DAU terhadap

---

<sup>51</sup>Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.



Belanja Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.<sup>52</sup>

2. Skripsi penelitian Abel Rinaldi. Yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan”. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Dana Perimbangan Berpengaruh terhadap Belanja Modal.<sup>53</sup>
3. Jurnal penelitian oleh Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah kota Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan Hasil analisis korelasi menunjukkan hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah dengan kategori sangat kuat dan hubungan dana perimbangan dengan belanja daerah dengan kategori sangat kuat. Hasil uji hipotesis secara parsial dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Hasil uji hipotesis secara simultan maka dapat

---

<sup>52</sup>Dessy Tri Wulansari, Skripsi : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2012-2013)”. (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

<sup>53</sup>Abel Rinaldi, Skripsi : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan”. ( Palembang : Universitas Muhammadiyah Palembang : 2016).

diketahui terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung.<sup>54</sup>

4. Jurnal penelitian oleh Desak Gede Yudi, Atika Sari Putu Kepramareni, dan Ni Luh Gede Novitasari dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Bali”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sementara pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.<sup>55</sup>

5. Jurnal penelitian oleh Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattisahusiwa dengan judul ”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap p belanja daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana

<sup>54</sup>Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah kota Bandung”, *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol.1 No.1 (Juni, 2017).

<sup>55</sup>Desak Gede Yudi, Atika Sari Putu Kepramareni, dan Ni Luh Gede Novitasari, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Bali”, *Jurnal Krisna : Kumpulan Riset Akuntansi*, Vol. 9 No.1 (Juli, 2017).

Perimbangan tidak pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.<sup>56</sup>

6. Skripsi penelitian oleh Elisabeth. Yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flaypaper Effect pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat”. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2015-2016. Sedangkan, Dana Bagi Hasil berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2015-2016. Hasil penelitian juga menunjukkan hasil nilai koefisien Dana Alokasi Umum lebih besar dari pada nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah dan keduanya signifikan, oleh karena itu terjadi fenomena *flaypaper effect* di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2015-2016.<sup>57</sup>
7. Jurnal penelitian oleh Febdwi Suryani dan Eka Pariani dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau”. Hasil penelitian uji Regresi simultan (Uji F) menunjukkan bahwa seluruh variabel

<sup>56</sup>Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattisahusiwa, ”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah”, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, Vol.14 No.1 (2018).

<sup>57</sup>Elisabet, Skripsi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah”, (Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 2018).

independen (pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (belanja modal). Uji regresi parsial (Uji T) menunjukkan bahwa variabel independen (pendapatan asli daerah) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (belanja modal) dan dana alokasi umum terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Besarnya pengaruh yang di timbulkan (R<sup>2</sup>) oleh kedua variabel independen menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memberikan pengaruh terhadap belanja modal.<sup>58</sup>

8. Jurnal penelitian oleh Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah sehingga besar kecilnya penerimaan dana alokasi khusus atau dana bagi hasil tidak signifikan pengaruhnya terhadap belanja daerah.<sup>59</sup>
9. Skripsi penelitian Rizka Rahmalia. Yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi

---

<sup>58</sup>Febdwi Suryani dan Eka Pariani, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, Vol.6 No. 1 (2018).

<sup>59</sup>Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol.22 No.2 (Juli, 2019).

Umum dan Dana Alokasi Khusus) terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2017 (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)”. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.<sup>60</sup>

10. Skripsi penelitian Endang Dwi Wahyuni. Yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode Tahun 2013-2017”. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal dan ada pengaruh signifikan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017. Sedangkan secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (PAD, DAU, SiLPA) terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode 2013-2017.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Rizka Rahmalia, Skripsi : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2017 (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan). (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2015).

<sup>61</sup>Endang Dwi Wahyuni, Skripsi : “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode Tahun 2013-2017. (Jember : IAIN Jember, 2020).

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dessy Tri Wulansari (2015).	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2012-2013)	Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni PAD, DAU dan Belanja Daerah.	Terletak pada analisis flypaper effect pada penelitian ini tidak dilakukan serta sampel dan populasinya berbeda.
2.	Abel Rinaldi (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan	Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan pada variabel penelitian yang digunakan yakni PAD dan Dana Perimbangan (DAU).	Perbedaannya pada variabel dependen belanja modal pada penelitian ini tidak ada, serta populasi dan sampel penelitian juga berbeda.
3.	Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah kota Bandung	Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yakni pada variabel penelitian yang digunakan yakni PAD, Dana Perimbangan (DAU) dan belanja daerah.	Perbedaannya terletak pada populasi dan sampel penelitian.
4.	Desak Gede Yudi, Atika Sari	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli	Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yakni	Perbedaannya terletak pada populasi, sampel penelitian dan



	Putu Kepramarani, dan Ni Luh Gde Novitasari (2017)	Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Bali	pada variabel penelitian yang digunakan yakni PAD dan Dana Perimbangan (DAU).	variabel independen belanja modal pada penelitian ini tidak ada pada penelitian yang dilakukan.
5.	Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattisahusawa (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah	Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yakni pada variabel penelitian yang digunakan yakni PAD, DAU dan Belanja Daerah.	Perbedaannya terletak pada populasi, sampel penelitian, DAK dan dana perimbangan pada penelitian ini yang tidak ada pada penelitian yang dilakukan.
6.	Elisabeth (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat	Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yakni pada variabel penelitian yang digunakan yakni PAD, DAU dan Belanja Daerah.	Perbedaannya terletak pada populasi, sampel penelitian, DAK, Dana Bagi Hasil, dan analisis flypaper effect pada penelitian ini yang tidak ada pada penelitian yang dilakukan.
7.	Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018)	Perimbangan (DAU) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yakni pada variabel penelitian yang digunakan yakni PAD dan DAU.	Perbedaannya pada variabel independen belanja modal pada penelitian ini yang tidak ada pada penelitian yang dilakukan, serta populasi dan sampel penelitian juga berbeda.
8.	Nabiyatun Nur	Pengaruh Pendapatan	Terdapat kesamaan dengan	Perbedaannya terletak pada



	Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono (2019)	Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah	penelitian yang dilakukan yakni pada variabel penelitian yang digunakan yakni PAD, DAU dan Belanja Daerah.	populasi dan sampel penelitian.
9.	Rizka Rahmalia (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2017 (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)	Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yakni pada variabel penelitian yang digunakan yakni PAD, DAU dan Belanja Daerah.	Perbedaannya terletak pada populasi dan sampel penelitian
10.	Endang Dwi Wahyuni (2020)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode Tahun 2013-2017	Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yakni pada variabel penelitian yang digunakan yakni PAD dan DAU	Perbedaannya terleta pada variabel dependen belanja modal pada penelitian ini tidak ada, serta populasi dan sampel penelitian juga berbeda.

## B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>62</sup>

<sup>62</sup>Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 39.

## 1. *Teori Keagenan*

Teori ini sebagai suatu versi dari *game theory* yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan pertanggung jawaban atas pengambilan keputusan (*decision making*) kepada *agen*, hal itu dapat juga dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.<sup>63</sup>

Kaitan *agency theory* dengan penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (*principal*) dengan pemerintah daerah (*agen*). Pemerintah pusat melakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur secara mandiri segala aktivitas pemerintah daerahnya oleh karena itu sebagai konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah baik dalam mendanai kebutuhan sehari-hari maupun memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Selain itu, teori keagenan tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai *principal* telah memberikan sumber daya kepada pemerintah berupa membayar pajak,

---

<sup>63</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002), 5.

retribusi, dan sebagainya untuk dapat meningkatkan PAD. Pemerintah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah sebagai bentuk dalam perwujudan desentralisasi.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Sedangkan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari :

a) Pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari empat jenis pendapatan diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan Penerimaan Lain-lain.<sup>64</sup> Sedangkan jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- Pajak Hotel dan Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan

---

<sup>64</sup>Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeuaran Pemerintah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 101-103.

- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Parkir

b) Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, mendapat balas jasa langsung. Retribusi dibagi atas tiga golongan :

- Retribusi jasa umum
- Retribusi jasa usaha
- Retribusi perizinan tertentu Laba Badan Usaha Milik

Daerah

Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modal sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan UU. Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD yang disebut bagian laba BUMD. BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah, terdiri dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan (bank pembangunan daerah dan bank pasar) dan di bidang lain, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup<sup>65</sup> :

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dan perbankan dan bidang lain, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil- hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.<sup>66</sup>

d) Penerimaan Lain-lain

---

<sup>65</sup>Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeuaran Pemerintah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 101-103.

<sup>66</sup>Santika Adi Karyadi, Skripsi : “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014*”, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).

Pengertian penerimaan lain-lain Daerah Kabupaten/Kota adalah penerimaan yang diperoleh Daerah Kabupaten/Kota di luar pajak, retribusi, bagian laba BUMD. Beberapa contoh penerimaan yang termasuk kategori penerimaan lain-lain misalnya penerimaan dan hasil penjualan aset milik Pemerintah Daerah dan jasa giro rekening Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### **3. Dana Alokasi Umum**

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum yang disebut dengan DAU adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Alokasi Umum diciptakan dalam mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Daerah dengan kemampuan potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Namun sebaliknya daerah dengan kemampuan potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum diantaranya :



- a) Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b) Dana Alokasi Umum untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten dan kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan di atas.
- c) Dana Alokasi Umum suatu daerah Kabupaten dan Kota tertentu ditetapkan berdasar perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk kabupaten dan kota yang bersangkutan.
- d) Porsi daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Tabel 2. 2

## Formulasi Penghitungan Dana Alokasi Umum

Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU untuk Kabupaten dan Kota
26% x APBN	10% x 26% x APBN	90% x 26% x PDN
<b>DAU suatu Provinsi:</b> bobot seluruh provinsi yang bersangkutan <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> x DAU untuk Provinsi bobot seluruh provinsi di Indonesia		
<b>DAU suatu Kabupaten dan Kota:</b> bobot kabupaten dan kota yang bersangkutan <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> x DAU untuk Kabupaten bobot seluruh kabupaten dan kota di dan Kota Indonesia		

Sumber: UU No. 25 Tahun 1999

Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah

selisih antara kebutuhan fiskal dan dan kapasitas fiskal, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Formula penghitungan DAU adalah:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Dimana Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum (kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan). Formulasi kebutuhan fiskal ialah :

$$\text{Kebutuhan Fiskal} = \text{Total Belanja Daerah} \times (\text{Jumlah penduduk} (\%) + \text{Luas wilayah} (\%) + \text{Indeks Kemahalan Konstruksi} (\%) + \text{PDRB} (\%) + \text{IPM} (\%)).$$

Sedangkan kapasitas fiskal dihitung berdasarkan jumlah dari Pendapatan Asli daerah (%) dan Dana Bagi Hasil (%).<sup>67</sup>

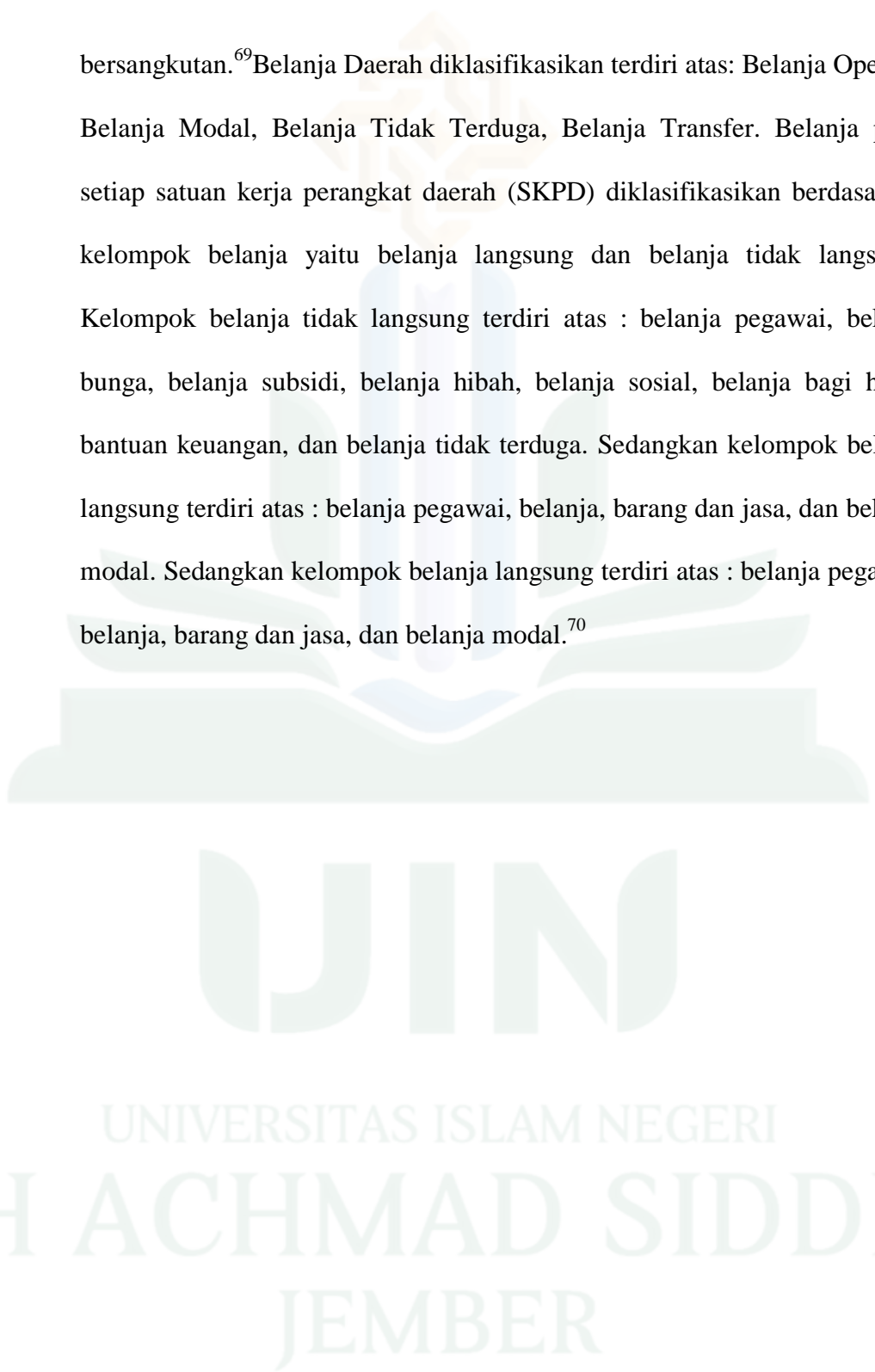
#### 4. Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan pengertian Belanja Daerah adalah semua pengeluaran daerah yang berasal dari Rekening Kas Umum Daerah dimana daerah tidak perlu menerima pembayarannya kembali dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berkenaan.<sup>68</sup> Sedangkan menurut Undang-undang Np.33 Tahun 2004 Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

<sup>67</sup>Deddi Nordiawan dkk, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 57.

<sup>68</sup>[https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175801/PP\\_Nomor\\_12\\_Tahun\\_2019.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175801/PP_Nomor_12_Tahun_2019.pdf) (diakses 02 Desember 2021).

bersangkutan.<sup>69</sup> Belanja Daerah diklasifikasikan terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer. Belanja pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diklasifikasikan berdasarkan kelompok belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung terdiri atas : belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan kelompok belanja langsung terdiri atas : belanja pegawai, belanja, barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan kelompok belanja langsung terdiri atas : belanja pegawai, belanja, barang dan jasa, dan belanja modal.<sup>70</sup>



<sup>69</sup><http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-pengklasifikasian-belanja-daerah> (diakses 02 Desember 2021).

<sup>70</sup><https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/13/96/ringkasan-realisis-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-provinsi-bali-2016> (diakses pada 02 Desember 2021).

## BAB III

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan asli daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Bali Periode 2016-2019. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh dari laman website resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan obyek pada penelitian ini menggunakan teknik *Sampling Jenuh* seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode tahun 2016-2019. Untuk menjawab konflik yang diajukan dan pengujian hipotesis, maka teknik analisis yg dipergunakan dalam penelitian ini ialah analisis asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis.

Pulau Bali merupakan salah satu pulau dari 17.000 lebih kepulauan yg ada di Indonesia.<sup>71</sup> Dengan jumlah penduduk Bali sekitar 4.317.404 jiwa (2020) mayoritas etnis Bali. Yang terletak secara goeografis di 8°03'40"-8°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" - 115°42'40" Bujur Timur.<sup>72</sup> Perairan yang mengelilingi pulau ini ialah:

- a. Laut Bali di utara
- b. Selat Bali, Provinsi Jawa Timur di barat
- c. Samudera Hindia di selatan
- d. Selat Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat di timur

---

<sup>71</sup><https://www.gotravelindonesia.com/informasi-umum-tentang-bali/> (diakses pada 4 November 2021).

<sup>72</sup><https://bali.bps.go.id/publication/download> (diakses pada 4 November 2021).

Secara administratif Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten, 1 kotamadya, 55 kecamatan, dan 701 desa/kelurahan yang meliputi :

1. Denpasar

Denpasar merupakan ibu kota Bali yang terletak di pusat Pulau Bali, juga merupakan pusat pemerintahan, pendidikan dan ekonomi. Kota Denpasar - Secara geografis terletak antara  $08^{\circ}35'31''$  -  $08^{\circ}44'49''$  Lintang Selatan dan  $115^{\circ}10'23''$  -  $115^{\circ}16'27''$  Bujur Timur, dengan ketinggian 0-75m di atas permukaan laut. Kota Denpasar memiliki luas wilayah  $127,78 \text{ km}^2$ . Sebagian besar berbatasan dengan Kabupaten Badung di sebelah utara, barat dan selatan. berbatasan dengan Kabupaten Gianyar di sebelah timur dan berbatasan dengan Selat Lombok.<sup>73</sup> Secara administratif Kota Denpasar meliputi 4.444 kecamatan dan 43 desa/Kelurahan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 652.239 jiwa.<sup>74</sup>

2. Tabanan

Kabupaten Tabanan secara geografis terletak antara  $80^{\circ}14'30''$  –  $80^{\circ}30'07''$  lintang selatan serta  $114^{\circ}59'00''$  -  $115^{\circ}02'57''$  bujur timur dengan ketinggian antara 0 – 2276 m dpl. Kabupaten Tabanan mempunyai luas daerah sebesar  $839,33 \text{ km}^2$  dimana, di sebelah utara berbatasan menggunakan Kabupaten Buleleng, pada sebelah timur berbatasan menggunakan Kabupaten Badung, di sebelah selatan dibatasi oleh samudera Hindia, serta pada sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana yang dibatasi oleh Tukad Yeh Let. Secara

<sup>73</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Bali> (diakses pada 4 November 2021).

<sup>74</sup><https://denpasarikota.bps.go.id/> (diakses pada 4 November 2021).

administratif daerah Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 kecamatan serta 133 desa. Dengan jumlah penduduk sebanyak 466.647 jiwa.<sup>75</sup>

### 3. Klungkung

Kabupaten Klungkung secara geografis terletak antara 08°27'37" 08°49'00"LS dan 115°21'28" - 115°37'28"BT dan berada pada ketinggian 93m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Klungkung adalah 315 km<sup>2</sup>, dimana di antaranya berbatasan dengan Kabupaten Bangli di sebelah utara, Kabupaten Karangasem di sebelah timur, Kabupaten Gianyar di sebelah barat dan Klungkung di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Secara administratif, Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 kecamatan, 6 desa kota, dan 53 desa, dengan jumlah penduduk sekitar 359.237 jiwa.<sup>76</sup>

### 4. Karangasem

Kabupaten Karangasem secara geografis terletak antara 08°33'07" 06°10'00" LS dan 115°23'22"115°42'37" BT, dengan ketinggian 102m di atas permukaan laut. Kabupaten Karangasem meliputi wilayah seluas 839,54 km<sup>2</sup>, dimana Kabupaten Karangasem di sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok, Samudera Hindia di sebelah selatan, di sebelah barat dengan Buleleng, Bangli, Kabupaten Buleleng dan Laut Jawa di sebelah utara. Memiliki dua pelabuhan yaitu Padang Bai dan Tanah Ampo. Di kawasan ini juga terdapat pura terbesar di Bali yaitu Pura Besakih. Secara administratif Kabupaten Karangasem terbagi menjadi 8

<sup>75</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tabanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tabanan) (diakses pada 4 November 2021).

<sup>76</sup><https://klungkungkab.go.id/halaman/detail/kondisi-kependudukan-klungkung> (diakses pada 4 November 2021).

kecamatan, 3 kecamatan dan 75 desa. Dengan jumlah penduduk sekitar 434.563 jiwa.<sup>77</sup>

#### 5. Jembrana

Kabupaten Jembrana secara geografis terletak antara 08°09`58" 08°28`02 Lintang Selatan dan 114°26`28" 115°51`28" Bujur Timur dengan ketinggian sampai 12 mdpl. seluas 841,80 Km<sup>2</sup> diantaranya berbatasan dengan Bupati Tabanan di sebelah timur, Bupati Buleleng di sebelah utara, Selat Bali di sebelah barat dan India. kecamatan, 10 kecamatan dan 41 desa dengan jumlah penduduk sekitar 329.506 jiwa.<sup>78</sup>

#### 6. Gianyar

Kabupaten Gianyar merupakan pusat budaya ukiran di Bali, secara geografis terletak antara 08°18`48"-08°38`58"LS dan 115°13`29"-115°22`23"BT, dengan ketinggian 126 dpl. Kabupaten Gianyar meliputi wilayah seluas 368 km<sup>2</sup> di antaranya berbatasan dengan Kota Denpasar di sebelah barat daya, Kabupaten Badung di sebelah barat, Kabupaten Bangli di sebelah timur dan Kabupaten Klungkung di sebelah tenggara. Secara administratif Kabupaten Gianyar terdiri dari 7 kecamatan, 6 kelurahan dan 64 kota dengan jumlah penduduk sekitar 512.200 jiwa.<sup>79</sup>

#### 7. Buleleng

Secara geografis Kabupaten Buleleng terletak antara 08°03`40"-08°23`00" LS dan 115°25`55"- 115°27`28" BT, 60m di atas permukaan

<sup>77</sup><http://www.karangasembkab.go.id/> (diakses pada 4 November 2021).

<sup>78</sup><http://www.karangasembkab.go.id/> (diakses pada 4 November 2021).

<sup>79</sup><https://gianyarkab.bps.go.id/subject/12/kependudukan> (diakses pada 4 November 2021).



laut. Kabupaten Buleleng meliputi wilayah seluas 1.365,88 km<sup>2</sup>, berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Bali di sebelah barat, Kabupaten Karangasem, Gembrana, Kabupaten Bangli di sebelah timur, serta kabupaten Tabanan dan Badung di selatan. Buleleng juga menjadi Produsen pertanian terbesar di Bali (populer dengan produksi salak bali dan jeruk keprok Tejakula), Kabupaten Buleleng juga mempunyai objek pariwisata yang banyak seperti pantai Lovina, pura Pulaki, Air Sanih dan tentunya kota Singaraja itu sendiri. Secara administratif, kecamatan Buleleng terbagi menjadi 9 kabupaten, 19 kabupaten, dan 129 desa dengan jumlah penduduk sekitar 826,499 jiwa.<sup>80</sup>

#### 8. Bangli

Kabupaten Bangli merupakan salah satu Kabupaten di Bali yang tidak memiliki wilayah pesisir dengan letak geografisnya antara 08°08'30"-08°31'07" LS dan 115°13'43" - 115°27'24" BT dengan ketinggian 100-2.152 mdpl, sebelah selatan dataran dan sebelah utara terdapat pegunungan yaitu Puncak Tulis dan Gunung Batur dengan kawah.

<sup>81</sup>Kabupaten Bangli memiliki luas wilayah 520, 81 Km<sup>2</sup> yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karangasem, di sebelah selatan dengan Kabupaten Klungkung, di sebelah barat dengan Kabupaten Gianyar dan

<sup>80</sup><http://permata.bulelengkab.go.id/d-data/kependudukan/> (diakses pada 4 November 2021).

<sup>81</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bangli](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bangli) (diakses pada 4 November 2021).

Kabupaten Badung. Kabupaten Bangli terbagi menjadi 4 kecamatan dan 72 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 254.738 jiwa.<sup>82</sup>

#### 9. Badung

Kabupaten Badung secara geografis terletak antara 08°14'30"-08°38'07' LS dan 114°59'00"-115°02'57" BT pada ketinggian 25m dari ketinggian tempat. Kabupaten Badung memiliki luas wilayah 418,52 km<sup>2</sup> dimana berbatasan langsung dengan Kabupaten Buleleng di utara, Kabupaten Tabanan di barat dan Bangli, Gianyar serta Kota Denpasar di timur. Secara administratif, Kabupaten Badung terbagi menjadi 6. kecamatan, 16 kecamatan dan 46 desa dengan jumlah penduduk sekitar 548.191 jiwa.<sup>83</sup>

### B. Penyajian Data

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah provinsi Bali yang diperoleh dari katalog Badan Pusat Statistik yang berasal dari website resmi BPS Bali. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kab/Kota di provinsi Bali periode Tahun 2016-2019 mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah (BD).

<sup>82</sup> [www.dukcapil.kemendagri.go.id](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id). (diakses pada 4 November 2021).

<sup>83</sup> <https://badungkab.bps.go.id/> (diakses pada 4 November 2021).

Tabel 3. 1

**Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Daerah  
Provinsi Bali Periode 2016-2019 (Dalam Ribu Rupiah)**

No	PROVINSI – TAHUN	PAD	DAU	BD
1	Jembrana - 2016	Rp 114.533.487	Rp 562.525.134	Rp 1.128.489.214
2	Jembrana - 2017	Rp 121.342.475	Rp 552.643.378	Rp 1.038.782.384
3	Jembrana - 2018	Rp 126.477.267	Rp 552.328.680	Rp 1.217.106.320
4	Jembrana - 2019	Rp 133.698.784	Rp 573.014.113	Rp 1.158.591.599
5	Tabanan - 2016	Rp 318.083.799	Rp 826.283.780	Rp 1.873.464.986
6	Tabanan - 2017	Rp 426.635.751	Rp 811.768.631	Rp 1.861.962.380
7	Tabanan - 2018	Rp 363.370.469	Rp 811.768.631	Rp 1.909.975.376
8	Tabanan - 2019	Rp 354.558.239	Rp 847.281.658	Rp 1.926.055.006
9	Badung - 2016	Rp 3.563.589.483	Rp 336.243.365	Rp 4.162.119.988
10	Badung - 2017	Rp 4.172.457.396	Rp 330.336.650	Rp 5.413.936.423
11	Badung - 2018	Rp 4.555.716.407	Rp 330.336.650	Rp 5.799.584.400
12	Badung - 2019	Rp 4.835.188.460	Rp 361.230.411	Rp 5.733.782.645
13	Gianyar - 2016	Rp 529.864.618	Rp 705.975.450	Rp 1.786.411.745
14	Gianyar - 2017	Rp 662.753.475	Rp 693.573.732	Rp 1.922.948.830
15	Gianyar - 2018	Rp 770.204.849	Rp 693.573.732	Rp 2.046.852.685
16	Gianyar - 2019	Rp 997.478.368	Rp 716.521.199	Rp 2.228.232.094
17	Klungkung - 2016	Rp 134.142.054	Rp 539.855.201	Rp 971.294.294
18	Klungkung - 2017	Rp 153.210.776	Rp 530.371.681	Rp 1.131.544.237
19	Klungkung - 2018	Rp 186.974.284	Rp 530.371.681	Rp 1.146.817.490
20	Klungkung - 2019	Rp 225.063.772	Rp 564.462.148	Rp 1.195.465.144
21	Bangli - 2016	Rp 104.829.402	Rp 568.278.943	Rp 1.089.450.148
22	Bangli - 2017	Rp 104.592.348	Rp 558.296.101	Rp 1.021.996.019
23	Bangli - 2018	Rp 122.686.254	Rp 559.422.439	Rp 1.171.071.638
24	Bangli - 2019	Rp 127.040.436	Rp 584.470.785	Rp 1.161.031.649
25	Karangasem - 2016	Rp 232.644.013	Rp 732.963.859	Rp 1.450.662.759
26	Karangasem - 2017	Rp 198.575.057	Rp 722.184.384	Rp 1.506.221.683
27	Karangasem - 2018	Rp 200.361.247	Rp 729.378.991	Rp 1.480.600.621
28	Karangasem - 2019	Rp 233.013.033	Rp 795.849.744	Rp 1.654.068.655
29	Buleleng - 2016	Rp 282.113.900	Rp 982.698.080	Rp 2.200.205.551
30	Buleleng - 2017	Rp 455.195.426	Rp 965.435.235	Rp 2.122.121.858
31	Buleleng - 2018	Rp 335.555.494	Rp 965.435.235	Rp 2.064.477.377
32	Buleleng - 2019	Rp 365.595.301	Rp 1.028.451.956	Rp 2.284.243.845
33	Denpasar - 2016	Rp 805.050.192	Rp 661.794.756	Rp 1.871.440.897
34	Denpasar - 2017	Rp 1.008.710.712	Rp 650.169.150	Rp 1.967.311.319
35	Denpasar - 2018	Rp 940.110.335	Rp 650.169.150	Rp 2.098.037.222
36	Denpasar - 2019	Rp 1.010.779.481	Rp 677.033.111	Rp 2.255.312.789

Sumber : data diolah dari BPS Provinsi Bali

Pada tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa PAD terendah ditunjukkan oleh Kabupaten Bangli tahun 2017 sebesar Rp. 104,592,348 sedangkan PAD terbesar diperoleh Kabupaten Badung pada Tahun 2019 sebesar Rp. 4,835,188,460. Sedangkan untuk DAU terendah ditunjukkan oleh Kabupaten Badung pada tahun 2018-2019 sebesar Rp. 330,336,650 dan DAU terbesar oleh Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 sebesar Rp. 1,028,451,956. Untuk belanja terendah pada kabupaten/kota di provinsi Bali ditunjukkan oleh Kabupaten Klungkung pada tahun 2016 sebesar Rp. 971,294,294 sedangkan belanja daerah terbesar diperoleh pada tahun 2018 oleh Kabupaten Badung sebesar Rp. 5,799,584,400.

### **C. Analisis dan Pengujian Hipotesis**

#### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif menggambarkan secara menyeluruh dari setiap variabel-variabel yang diteliti. Digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti, melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum dari data tersebut. Variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan melalui statistik deskriptif, dengan melihat nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean* dan nilai standar deviasi). Adapun variabel yang dideskripsikan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan variabel dependen

yakni Belanja Daerah. Berikut ini merupakan tabel penjelasan mengenai hasil analisis deskriptif keseluruhan variabel selama tahun 2016-2019.

**Tabel 3. 2**  
**Hasil Uji Descriptive Statistics**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	36	104,592,348	4,835,188,460	813,116,579.00	1,285,341,840.000
DAU	36	330,336,650	1,028,451,956	658,402,717.30	178,809,661.500
BD	36	971,294,294	5,799,584,400	2,029,213,091.00	1,257,746,514.000
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Hasil olahan data spss (Terlampir)

Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan jumlah observasi (N) dari penelitian ini sebanyak 36 observasi. Pada variabel *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar Rp. 104,592,348 diperoleh dari Kabupaten Bangli tahun 2017 sedangkan nilai maksimum sebesar Rp. 4,835,188,460 dihasilkan oleh Kabupaten Badung pada Tahun 2019. Nilai mean atau rata-rata PAD yaitu sebesar Rp. 813,116,579.00 dan untuk standar deviasinya (standard deviation) sebesar Rp. 1,285,341,840.000.

Pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar Rp. 330,336,650 diperoleh dari Kabupaten Badung pada tahun 2018-2019 sedangkan nilai maksimum sebesar Rp. 1,028,451,956 diperoleh dari Kabupaten Buleleng pada tahun 2019. Nilai mean atau rata-rata DAU sebesar Rp. 658,402,717.30 dan untuk standar deviasinya sebesar Rp. 178,809,661.500.

Pada variabel Belanja Daerah (BD) menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar Rp. 971,294,294 diperoleh dari Kabupaten Klungkung pada tahun 2016 sedangkan nilai maksimum BD sebesar Rp. 5,799,584,400 dari Kabupaten Badung pada tahun 2018. Untuk nilai mean atau rata-rata BD sebesar Rp. 2,029,213,091.00 dan untuk standar deviasinya sebesar Rp. 1,257,746,514.000.

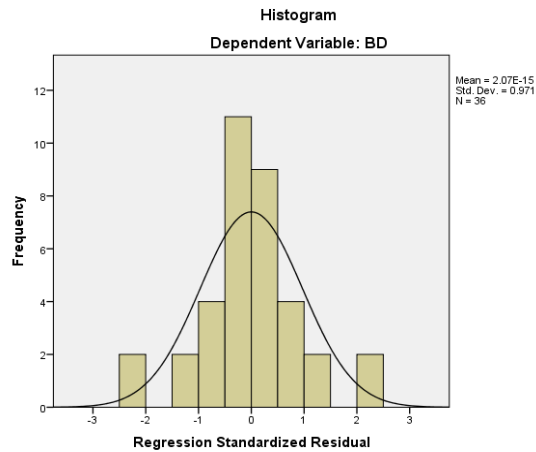
## **2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis, dimana uji ini untuk mengetahui apakah data telah memenuhi asumsi-asumsi dasar serta memastikan bahwa data yang dihasilkan terdistribusi normal. Diperlukannya uji ini adalah untuk menghindari estimasi yang bias. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian adalah :

### **a) Uji Normalitas**

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah data-data dalam variabel pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak. Untuk menganalisis data yang akan diuji yaitu dengan analisis Grafik.

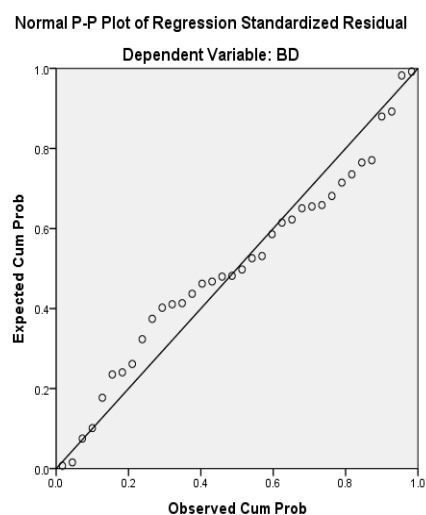
**Gambar 3. 1**  
**Uji Normalitas Histogram**



Sumber : Hasil olahan data SPSS (Terlampir)

Dari hasil output histogram diatas terlihat bahwa kurva dependen dan *regression standardized residual* membentuk gambar lonceng jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

**Gambar 3. 2**  
**Uji Normalitas**  
**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



Sumber : Hasil olahan data SPSS (Terlampir)



Berdasarkan tampilan Normal P-P *Plot Regression Standardized* terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah grafik diagonal, maka data-data tersebut terdistribusi normal.

#### b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Variance Inflation Faktor* (VIF) dengan nilai *tolerance* dapat dilakukan tidak ada gejala multikolonieritas, jika VIF < 10 dan Nilai Tolerance > 0,10. Berikut adalah hasil pengujian multikolinieritas :

**Tabel 3. 3**  
**Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>				
	Model	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.365		
	PAD	.000	.660	1.516
	DAU	.000	.660	1.516

a. Dependent Variable: BD

Sumber : Hasil olahan data SPSS (Terlampir)

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas diatas menunjukkan bahwa nilai VIF variabel PAD (X1) senilai 1,516 nilai *tolerance* sebesar 0,660. Variabel DAU (X2) memilik VIF sebesar 1,516 dan

nilai *tolerance* sebesar 0,660. Semua variabel tersebut nilai VIF kurang dari 10 dengan *tolerance* diatas 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari asumsi multikolinearitas.

### c) Uji Heteroskedastisitas

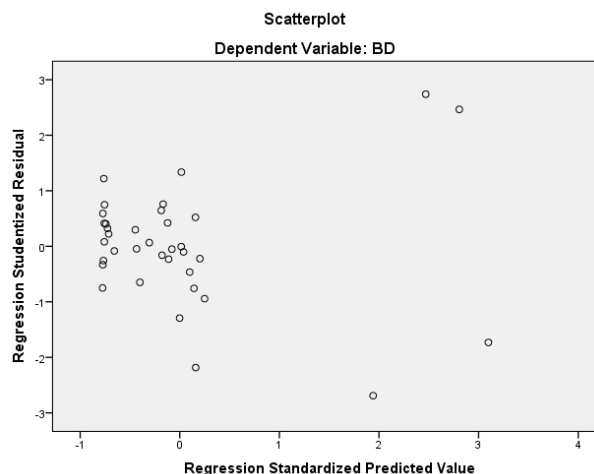
Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.<sup>84</sup> Uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati *scatterplot* dimana sumbu horizontal menggambarkan *nilai predicated standardized*. Jika *scatterplot* membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. *Scatterplot* dapat diamati dimana variabel bebas sebagai sumbu horizontal dan nilai residual kuadratnya sebagai sumbu vertikal.<sup>85</sup> Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 24 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>84</sup>Aminatus Zahriah, *Diklat Pengajaran Aplikasi Komputer Statistik (Teori dan Aplikasi dengan SPSS 22)*, (Jember : 2018), 78.

<sup>85</sup>Suliyanto, *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS* (Yogyakarta : ANDI, 2011), 95.

**Gambar 3.3**  
**Uji Heteroskedastisitas**  
**Scatterplot**



Sumber : Hasil olahan data SPSS (Terlampir)

Berdasarkan grafik *Scatterplot* diatas, dapat dilihat bahwa titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul pada satu tempat. Hal ini membuktikan tidak terjadi heterokedastisitas pada data dan sudah memenuhi uji asumsi klasik.

#### **d) Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Untuk data *time series* autokorelasi sering terjadi, akan tetapi untuk data yang sampelnya *crosssection* jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan yang lain.

Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai  $d_w$  dengan  $d_1$  dan  $d_u$  sebagai berikut:

1.  $D_u < d_w < 4-d_u$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya tidak terjadi autokorelasi
2.  $D_w < d_l$  atau  $d_w > 4-d_l$ , maka  $H_a$  ditolak, artinya terjadi autokorelasi
3.  $D_l < d_w < d_u$  atau  $4-d_u < d_w < 4-d_l$ , artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 4**

**Uji Durbin – Watson**

Ada autokorelasi positif	Tidak dapat diputuskan	Tidak ada autokorelasi 	Tidak dapat diputuskan	Ada autokorelasi negatif
0	d <sub>l</sub>	d <sub>u</sub>	2	4-d <sub>u</sub>
			4-du	4-d <sub>l</sub>
				4

**Tabel 3. 5**

**Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.996 <sup>a</sup>	.991	.991	121,783,329.100	2.114
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD					
b. Dependent Variable: BD					

Sumber : hasil olahan data SPSS (Terlampir)

Berdasarkan pada output model summary terdapat nilai Durbin-Watson sebesar 2.114. Pengambilan keputusan pada asumsi ini memerlukan dua nilai bantu yang diperoleh dari tabel Durbin-Watson, yaitu nilai d<sub>L</sub> dan d<sub>U</sub>, dengan n= jumlah sampel, K = jumlah variabel bebas (independent). Pada penelitian ini nilai n = 36, K = 2, berdasarkan uji autokorelasi diatas, maka diketahui bahwa :

Dw	Dl	Du	4-Dl	4-Du
2.114	1.3537	1.5872	2.6463	2.4128

Kesimpulannya,  $Du (1.5872) < Dw (2.114) < 4-Du (4-1.5872 = 2.4128)$ . Sehingga, dalam model persamaan regresi ini tidak terjadi masalah autokorelasi.

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Penelitian ini menguji hipotesis pengaruh PAD, dan DAU, terhadap belanja daerah. Adapun persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini iyalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = alokasi belanja daerah

$\alpha$  = Konstanta

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah

$X_2$  = Dana Alokasi Umum

e = Standar eror

Hasil dari analisis regresi berganda dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 24 pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 6**  
**Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-96902052.580	105468999.300		-.919	.365
	PAD	1.103	.020	1.127	55.919	.000
	DAU	1.867	.142	.265	13.175	.000

Sumber : Hasil olahan data SPSS (Terlampir)

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = -96.902.052.580 + 1.103 \text{ PAD} + 1.867 \text{ DAU} + e$$

a) Konstanta ( $\alpha$ ) = -96902052.580

Nilai konstanta dari persamaan diatas adalah sebesar -96902052.580 yang menunjukkan bahwa apabila variabel PAD dan DAU dianggap konstan, maka besarnya nilai belanja daerah akan turun sebesar -96902052.580.

b) Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 1.103

Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah adalah positif. Jika PAD dinaikan satu satuan PAD maka akan terjadi peningkatan pada Belanja Daerah sebesar 1.103. Koefisien yang mempunyai nilai positif berarti terjadi hubungan positif antara PAD dan Belanja Daerah.

c) Koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) = 1.867

Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah adalah positif. Jika DAU dinaikkan satu satuan DAU maka akan terjadi peningkatan pada Belanja Daerah sebesar 1.867. Koefisien yang mempunyai

nilai positif berarti terjadi hubungan positif antara DAU dan Belanja Daerah.

d) Standar Error (e)

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji t (Parsial)

Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika probabilitas  $< 0,05$  atau  $t$  hitung  $> t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila probabilitas  $> 0,05$  atau  $t$  hitung  $< t$  tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. Uji hipotesis secara parsial dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3. 7**  
**Uji t (Parsial)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-96902052.580	105468999.300		-.919	.365
	PAD	1.103	.020	1.127	55.919	.000
	DAU	1.867	.142	.265	13.175	.000

Sumber : Hasil olahan data spss (Terlampir)

Analisis Uji t :

1. Pengaruh DAU terhadap Belanja daerah Pemerintah Provinsi Bali periode 2016-2019.



Hipotesis:

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap belanja daerah Pemerintah Provinsi Bali periode 2016-2019.

$H_1$  : Terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap belanja daerah Pemerintah Provinsi Bali periode 2016-2019.

Berdasarkan hasil output diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel PAD ( $X_1$ ) adalah sebesar  $0.000 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $55.919 > 2.03452$ , maka dapat disimpulkan bahwa bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya, ada pengaruh signifikan PAD ( $X_1$ ) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali periode 2016-2019.

2. Pengaruh DAU terhadap Belanja daerah Pemerintah Provinsi Bali periode 2016-2019.

Hipotesis:

$H_0$  : Tidak terdapat terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap belanja daerah Pemerintah Provinsi Bali periode 2016-2019.

$H_2$  : Terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap belanja daerah Pemerintah Provinsi Bali periode 2016-2019.

Berdasarkan hasil output diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel DAU ( $X_2$ ) adalah sebesar  $0.000 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $13.175 > 2.03452$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Artinya, DAU ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali periode 2016-2019.

### b. Uji F (Simultan)

Pengujian secara simultan atau uji F digunakan untuk menguji variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi  $> 0,05$  dan  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. Uji hipotesis secara simultan dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3. 8**

### Uji F (Simultan)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	54877991330000000 000.000	2	274389956600000 02000.000	1850.089	.000 <sup>b</sup>
	Residual	48942891490000000 0.000	33	148311792400000 00.000		
	Total	55367420240000000 000.000	35			
a. Dependent Variable: BD						
b. Predictors: (Constant), DAU, PAD						

Sumber : Hasil olahan data spss (Terlampir)

Dengan hipotesis:

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (PAD, DAU) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali secara simultan.

$H_3$  : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (PAD, DAU) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali secara simultan.

Berdasarkan hasil output diatas, diketahui nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0.05$  dan nilai  $F_{hitung} 1850.089 > F_{tabel} 4.14$   $F_{tabel}$  , maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima dengan kata lain semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali Periode 2016-2019 secara simultan.

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam penelitian menerangkan variabel dependen.

Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 9**

#### **Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.996 <sup>a</sup>	.991	.991	121,783,329.100
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD				
b. Dependent Variable: BD				

Sumber : Hasil olahan data spss (Terlampir)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dari kebutuhan variabel memperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0.991, yang memiliki arti bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja daerah sebesar 99,1 %. Sedangkan untuk sisanya sebesar 0,9 % dijelaskan oleh variabel lain atau faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah diperoleh hasil sebagai berikut :

##### **1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah**

Teori keagenan terdapat pada organisasi masyarakat, kelompok masa maupun pemerintahan daerah. Dimana pemerintah daerah (Bupati) disini berperan sebagai agen dan prinsipalnya adalah masyarakat yang diproyeksikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam teori keagenan dapat dilihat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui (DPRD) untuk membuat kebijakan dan mengesahkan anggaran demi meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan otonomi daerah. Suatu wilayah yang terdapat kenaikan pertumbuhan ekonomi positif kemungkinan adanya peningkatan PAD

yang merupakan salah satu akses yang baik terhadap Produk Domestik Regional Bruto.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dimana pada hipotesis pertama menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Bali periode 2016-2019”, terbukti dengan adanya pengaruh dari PAD terhadap Belanja Daerah. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi (Sig) variabel PAD ( $X_1$ ) adalah sebesar  $0.000 < 0,05$  dan nilai  $t$  hitung  $55.919 > t$  tabel  $2.03452$  dan dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor yang penting terhadap Belanja Daerah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dessy Tri Wulansari pada tahun 2015 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.<sup>87</sup> Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus terus dipacu pertumbuhannya. Hal ini membuktikan bahwa besar atau kecilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Apabila pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah baik dengan diikuti peningkatan PAD tentu belanja daerah pada kab/kota pada daerah tersebut juga akan bertambah. Sehingga besaran dana yang akan disalurkan oleh pemerintah daerah dapat terdistribusi dengan baik dan sesuai dengan

---

<sup>86</sup><https://dspace.uii.ac.id/> (diakses pada 30 Desember 2021).

<sup>87</sup>Dessy Tri Wulansari, Skripsi : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2012-2013)”. (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

kebutuhan masing-masing daerah. Dengan demikian hipotesis pertama dapat diterima.

## 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dalam teori keagenan dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah dilihat dari hubungan antara pemerintah pusat (Presiden/Wakil Presiden, menteri) berperan sebagai prinsipal dan pemerintah otonom (Provinsi, Kabupaten/Kota) sebagai agent. Dimana pemerintah pusat memberi tanggungjawab melalui otonomi daerah untuk sumberdaya alamnya dan pemanfaatan pendapatan asli daerah yang lain demi terlaksananya desentralisasi. Tinggi rendahnya kenaikan pertumbuhan ekonomi ditentukan berdasarkan tingkat pencapaian dan pertanggungjawaban dari pusat ke daerah. Agency Theory telah menjelaskan dimana pemerintah otonom (Provinsi, Kabupaten/Kota) selaku kepala pemerintahan atau agen, wajib mengurus warganya dan tugasnya mengurangi kesenjangan antara masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik melalui dana alokasi umum.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dimana pada hipotesis kedua menyatakan bahwa “ Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Bali periode 2016-2019”, terbukti dengan adanya pengaruh dari DAU terhadap Belanja Daerah. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi

---

<sup>88</sup><https://dspace.uin.ac.id/> (diakses pada tanggal 30 Desember 2021)

(Sig) variabel DAU ( $X_2$ ) sebesar  $0.000 < 0,05$  dan nilai F hitung  $13.175 > 4.14$  F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima. Tentu saja hal ini didukung dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono yang dilaksanakan pada tahun 2019 menunjukkan Dana Alokasi Umum berpengaruh pada Belanja Daerah,<sup>89</sup> yang mana artinya dengan peningkatan Dana Alokasi Umum maka akan sejalan dengan meningkatnya jumlah Belanja Daerah.

### **3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah**

Dalam teori keagenan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah dilihat dari hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau legislatif bertindak sebagai pihak prinsipal, sedangkan eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah daerah (Bupati) yang bertindak sebagai pihak agen. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah disetujui dan disahkan serta sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dijadikan kontrol oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau legislatif dalam mengawasi dan meninjau kinerja pemerintah daerah. Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan

---

<sup>89</sup>Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah", *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol.22 No.2 (Juli, 2019).



bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.<sup>90</sup>

Dengan menggunakan uji statistik F dapat diketahui pengaruh dari seluruh variabel independen yakni PAD dan DAU terhadap variabel dependen yakni Belanja Daerah, membuktikan bahwa secara bersamaan kedua variabel independen berpengaruh positif dan memperoleh hasil untuk  $F_{hitung}$  1850.089 lebih besar daripada  $F_{tabel}$  4.14 dengan signifikansi sebesar 0.000 yang mana nilainya jauh dibawah taraf signifikansi 0.05 yang berarti  $H_0$  ditolak sedangkan  $H_3$  diterima dengan kata lain semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali Periode 2016-2019. Tentu saja hal ini didukung dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar pada tahun 2017.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Abdul Halim dan Syukri Abdullah, "Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi", *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2 No.1 (2006), Hal : 53-64.

<sup>91</sup> Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah kota Bandung", *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol.1 No.1 (Juni, 2017).

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dengan judul **“Pengaruh Pendapatan asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2016-2019”** maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk hasil pengujian secara parsial pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada kab/kota di provinsi Bali memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dengan nilai  $T_{hitung} > T_{tabel}$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dinyatakan diterima. Artinya, variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah pada kab/kota di provinsi Bali periode tahun 2016-2019.
2. Untuk hasil pengujian secara parsial pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada kab/kota di provinsi Bali memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dengan nilai  $T_{hitung} > T_{tabel}$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan dana alokasi umum terhadap belanja daerah dinyatakan diterima. Artinya, variabel dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah pada kab/kota di provinsi Bali periode tahun 2016-2019.

3. Sedangkan untuk hasil pengujian secara simultan dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) dan dana alokasi umum ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah ( $Y$ ) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang menyatakan adanya pengaruh signifikan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada kab/kota di provinsi Bali periode tahun 2016-2019.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis iyalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah diharapkan lebih teliti untuk mengelola Belanja Daerah dengan lebih baik sehingga penyerapan Belanja Daerah dapat direalisasikan secara optimal lagi kedepannya dalam bentuk pengadaan pelayanan masyarakat maupun yang lainnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen berbeda yang akan mempengaruhi Belanja Daerah dan dapat melakukan penelitian dalam rentang waktu yang lebih panjang dengan populasi yang lebih luas.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengklasifikasikan komponen pembagian belanja daerah langsung ataupun belanja daerah tidak langsung dan menambahkan analisis flypaper effect.

## DAFTAR PUSTAKA

### Alqur'an Al-Karim

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Jumanatul Ali, 2005.

### Buku

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4: Jakarta.

Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga

Mundir. 2014. *Statistik Pendidikan*. Jember: STAIN-Press Jember.

Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nordiawan, Deddi dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat

Ridwan, dan Sunarto. 2014. *Pengantar Statistika Untuk Peneitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan – Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.

Tim Penyusun IAIN Jember. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia.

Yani, Ahad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindi Persada

### Jurnal dan Skripsi

- Elisabet. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Skripsi, Universitas Sanata Dharma.
- Fatimah, Nur Nabiyatun, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*. Vol.21, No.1.
- Ferdiansyah, Irfan, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattisahusiwa. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*. Vol.14, No.1
- Halim, Abdul dan Syukri Abdullah. 2006. “Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi”, *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Pratiwi, Novi. 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Skripsi, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Putra, Ida Bagus Dwi dan A. A. N. B. Dwirandra. 2015. Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Rahmalia, Rizka. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2017 (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan). Skripsi, Universitas Sriwijaya.
- Rinaldi, Abel. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi, Universitas Muhamadiyah Palembang.
- Suryani, Febdwi dan Eka Pariani. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*. Vol.6, No.1.
- Siswanto, Dodik Kusnandar. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Penelitian Universitas Indonesia*.

Sorongan. Analisis Hubungan DAU, PAD dan Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol.1, No.3.

Suarjana, Anak Agung Gede Mantra dan Nyoman Indah Kusuma. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol.14, No.2.

Wati, Rahma Masayu, dan Catur Martian Fajar. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*. Vol.1, No.1.

Wulansari, Tri Dessy. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2012-2013). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yudi, Gede Desak, Atika Sari Putu Kepramareni, dan Ni Luh Gede Novitasari. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Bali. *Jurnal Krisna : Kumpulan Riset Akuntansi*. Vol.19, No.1.

Yunita, Venny Putu, dan Ni ketut Rasmini. 2020. Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan. Vol.30, No.4.

### Website

<https://badungkab.bps.go.id/> .

<https://bali.bps.go.id/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-se-provinsi-bali-2015-2019.html>.

<https://bali.bps.go.id/publication/download>.

<https://denpasarkota.bps.go.id/>.

[www.dukcapil.kemendagri.go.id](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id).

<https://dspace.uui.ac.id/>.

<https://gianyarkab.bps.go.id/subject/12/kependudukan>.

<https://klungkungkab.go.id/halaman/detail/kondisi-kependudukan-klungkung>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/bali>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten\\_tabanan.](https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_tabanan)

[https://peraturan.bpk.go.id/pp-no-12-tahun-2019.](https://peraturan.bpk.go.id/pp-no-12-tahun-2019)

[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004.](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004)

[http://permata.bulelengkab.go.id/d-data/kependudukan/.](http://permata.bulelengkab.go.id/d-data/kependudukan/)

[http://www.djpk.kemenkeu.go.id.](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

[https://www.gotravelaindonesia.com/informasi-umum-tentang-bali/.](https://www.gotravelaindonesia.com/informasi-umum-tentang-bali/)

[http://www.karangasemkab.go.id/.](http://www.karangasemkab.go.id/)

### **Sumber lainnya**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemeritah Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan atara Pemerintah Pusat dengan daerah.

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**





## Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

### Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfita Aprilia Zahrotunisa  
Nim : E20173026  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : UIN KH ACHMAD SIDDIQ Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya dari saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dicantumkan dari sumbernya.

Jember, 03 Desember 2021  
Yang menyatakan



**Alfita Aprilia Zahrotunisa**  
Nim.E20173026

## Surat Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos: 68136  
Website : [www.http://febi.iain-jember.ac.id](http://febi.iain-jember.ac.id) e-mail : [febi.iainjbr@gmail.com](mailto:febi.iainjbr@gmail.com)

Nomor : B-364/In.2017.a/PP.00.9/06/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

08 Juni 2021

Yth. Kepala Laboratorium FEBI IAIN Jember  
Jl. Mataram No.1 Mangli

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Alfita Aprilia Zahrotunisa  
NIM : E20173026  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Kab/Kota di Provinsi Bali" di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Wakil Dekan  
Dekan Bidang Akademik,

Rohkim

## Surat Ijin Selesai Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>

---

Nomor : B-723/UIN.20/7.a/PP.00.9/12/2021 09 Desember 2021  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Ijin Selesai Penelitian

Yth. Kepala Badan Pusat Statistik Bali  
 Jl. Raya Puputan No.1, Renon-Denpasar

Disampaikan dengan hormat bahwa, dengan ini mahasiswa berikut :

Nama : Alfita Aprilia Zahrotunisa  
 NIM : E20173026  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Jurusan : Ekonomi Islam  
 Prodi : Akuntansi Syariah

Telah selesai melakukan penelitian dengan pengambilan data sekunder dari website Badan Pusat Statistik Bali selama tanggal 09 Juni-19 Juli 2021 dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademi

  
**Nurul Widyawati Islami Rahayu**

KH

JEMBER

Q

### Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Rumusan Masalah	Sumber Data	Metode Penelitian	Hipotesis
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Bali periode 2016-2019	<p>1. Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Dana Alokasi Umum</li> </ul> <p>2. Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Daerah</li> </ul>	<p>1. Pendapatan Asli Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ pajak daerah</li> <li>➢ retribusi daerah</li> <li>➢ hasil perusahaan milik daerah</li> <li>➢ hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</li> <li>➢ PAD yang sah</li> </ul> <p>2. Dana Alokasi Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ celah fiskal</li> <li>➢ alokasi dasar</li> </ul> <p>3. Belanja Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ belanja langsung</li> <li>➢ belanja tidak langsung</li> </ul>	<p>1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali ?</p> <p>2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?</p> <p>3. apakah terdapat pengaruh simultan PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data sekunder Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali tahun 2016-2019.</li> </ul>	<p>1. Jenis penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> </ul> <p>2. Populasi dan sampel :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan sampel menggunakan <i>Sampling Jenuh</i></li> </ul> <p>3. Pengumpulan data :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Data sekunder</li> </ul> <p>4. Analisis data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistik Deskriptif</li> <li>• Uji Asumsi Klasik</li> <li>• Uji Hipotesis</li> <li>• Analisis Regresi Linier Berganda</li> </ul>	<p>1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah</p> <p>2. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah</p> <p>3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.</p>

### Jurnal Kegiatan Penelitian

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	08 Juni 2021	Menyerahkan surat ijin penelitian	
2	12 Juni 2021	Mencari data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota provinsi Bali Periode 2016-2019	
3	13 Juni 2021	Mencari data Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten/Kota provinsi Bali Periode 2016-2019	
4	14 Juni 2021	Mencari data Belanja Daerah Daerah Kabupaten/Kota provinsi Bali Periode 2016-2019	
5	16 Juni 2021	Mengunduh laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota provinsi Bali Periode 2016-2019 yang sudah di dapat	
6	17 Juni 2021	Mengunduh laporan Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten/Kota provinsi Bali Periode 2016-2019	
7	18 Juni 2021	Mengunduh laporan Belanja Daerah Daerah Kabupaten/Kota provinsi Bali Periode 2016-2019	
8	22 Juli 2021	Mengelola laporan keuangan yang sudah di dapat dari website BPS Bali	
9	16 November 2021	Meminta surat ijin selesai penelitian	
10	09 Desember 2021	Mendapatkan surat ijin selesai penelitian	

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### Laporan Realisasi PAD

No	Daerah	Pad			
		2016	2017	2018	2019
1	Kab. Jembrana	114,533,487	121,342,475	126,477,267	133,698,784
2	Kab. Tabanan	318,083,799	426,635,751	363,370,469	354,558,239
3	Kab. Badung	3,563,589,483	4,172,457,396	4,555,716,407	4,835,188,460
4	Kab. Gianyar	529,864,618	662,753,475	770,204,849	997,478,368
5	Kab. Klungkung	134,142,054	153,210,776	186,974,284	225,063,772
6	Kab. Bangli	104,829,402	104,592,348	122,686,254	127,040,436
7	Kab. Karangasem	232,644,013	198,575,057	200,361,247	233,013,033
8	Kab. Buleleng	282,113,900	455,195,426	335,555,494	365,595,301
9	Kab. Denpasar	807,050,192	1,008,710,712	940,110,335	1,010,779,481

### Laporan Realisasi DAU

No	Daerah	DAU			
		2016	2017	2018	2019
1	Kab. Jembrana	562,525,134	552,643,376	552,328,680	573,014,113
2	Kab. Tabanan	826,283,780	811,768,631	811,768,631	847,281,65
3	Kab. Badung	336,243,365	330,336,650	330,336,650	361,230,411
4	Kab. Gianyar	705,975,450	693,573,732	693,573,732	716,521,199
5	Kab. Klungkung	39,855,201	530,371,681	530,371,681	564,462,148
6	Kab. Bangli	568,278,943	558,296,101	559,422,439	584,470,785
7	Kab. Karangasem	732,963,859	722,184,384	729,378,991	795,849,744
8	Kab. Buleleng	982,698,080	965,435,235	965,435,235	1,028,451,956
9	Kota Denpasar	661,794,756	650,169,150	650,169,150	677,033,111



## Laporan Realisasi Belanja Daerah

No	Daerah	Belanja Daerah			
		2016	2017	2018	2019
1	Kab. Jembrana	1,128,489,214	1,038,782,384	1,217,106,320	1,158,591,599
2	Kab. Tabanan	1,873,464,986	1,861,962,380	1,909,975,375	1,926,055,006
3	Kab. Badung	4,162,119,988	5,413,936,423	5,799,584,400	5,733,782,645
4	Kab. Gianyar	1,786,411,745	1,922,948,830	2,046,852,685	2,228,232,094
5	Kab. Klungkung	971,294,294	1,131,544,237	1,146,817,490	1,195,465,144
6	Kab. Bangli	1,089,450,148	1,021,996,019	1,171,071,638	1,161,031,649
7	Kab. Karangasem	1,450,662,759	1,506,221,683	1,480,600,621	1,654,068,655
8	Kab. Buleleng	2,200,205,551	1,122,121,858	2,064,477,377	2,284,243,845
9	Kota Denpasar	1,871,440,897	1,967,311,319	2,098,037,222	2,255,312,789

← → C [bali.bps.go.id/statictable/2018/04/13/97/ringkasan-realisasi-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-kabupaten-kota-di-provinsi-bali-2019.html](http://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/13/97/ringkasan-realisasi-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-kabupaten-kota-di-provinsi-bali-2019.html) Indonesia | English   [Manual](#) | [Tautan](#) | [Peta Situs](#) | [SAK](#)

[Beranda](#) | [Tentang Kami](#) | [Berita](#) | [Senarai Rencana Terbit](#) | [Publikasi](#) | [Berita Resmi Statistik](#) | [PPID](#)

Geografi  
Iklim

**Ekonomi dan Perdagangan**

Ekspor-Import

Energi

Harga Eceran

**Pertanian dan Pertambangan**

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

**INDIKATOR STRATEGIS**

[Galeri Infografis](#)

Uraian / Description	Kabupaten/Kota / Regency/Municipality						
	Jembrana	Tabanan	Badung	Gianyar	Klungkung	Karangasem	
<b>I. Penerimaan Daerah/Local Government Revenue</b>	<b>1.144.974.583</b>	<b>1.926.615.593</b>	<b>5.792.967.591</b>	<b>2.307.617.711</b>	<b>1.215.589.170</b>	<b>1.180.012.548</b>	<b>1.648.390.692</b>
I.1. Pendapatan Asli Daerah/Local Government Revenue	123.698.704	324.538.239	4.825.188.460	997.478.368	225.063.772	127.040.426	223.013.033
1.1.1 Pajak Daerah / Local Tax Revenue	39.132.640	116.003.788	4.217.319.393	742.538.741	77.608.057	22.363.776	108.373.668
1.1.2 Retribusi Daerah / Local Retribution	9.869.996	23.362.356	148.048.411	96.622.594	39.956.311	36.441.476	13.046.348
1.1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengalihan-Kelayaan Daerah yang Dipisahkan	7.949.856	9.937.546	231.890.544	10.574.496	8.429.501	6.139.576	11.633.177
1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah / Other Local Government Legal Revenue	77.146.292	205.254.549	237.930.112	145.742.545	99.069.902	62.095.608	99.959.842
I.2. Dana Perimbangan/Balancing Funds	707.790.157	1.075.691.158	568.230.993	940.139.469	692.588.596	717.603.942	1.011.075.838
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	15.038.091	16.638.025	61.162.552	20.835.073	13.319.909	13.736.931	15.657.058
1.2.2 Dana Alokasi Umum / General Allocation Funds	579.014.113	847.281.658	361.230.411	716.521.199	364.462.148	384.470.785	795.849.744
1.2.3 Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Funds	119.737.953	211.771.475	145.838.030	202.793.217	114.807.539	119.396.226	200.368.736
1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Legal Revenue	303.485.642	496.366.596	369.548.138	369.999.854	297.936.802	335.368.170	409.502.121
<b>II. Belanja Daerah/Expenditure of Local Government</b>	<b>1.158.591.599</b>	<b>1.926.055.006</b>	<b>5.733.782.645</b>	<b>2.228.232.094</b>	<b>1.195.465.144</b>	<b>1.161.031.649</b>	<b>1.654.068.655</b>
2.1. Belanja Tidak Langsung/Indirect Purchase	557.479.605	1.146.283.679	3.036.047.768	1.326.572.057	677.296.378	734.309.553	947.020.650
2.2. Belan	601.111.994	779.771.327	2.697.734.877	901.660.037	518.168.766	426.722.096	547.000.000
2.3. Pembiayaan / Financing	89.988.576	17.587.782	219.590.261	12.944.538	20.075.534	37.936.616	114.451.003

[Butuh Bantuan?](#)

Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Bali diutamakan melalui layanan online seperti email [pst5100@bps.go.id](mailto:pst5100@bps.go.id) dan Whatsapp di nomor 081-810-5100. [Seluru](#)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

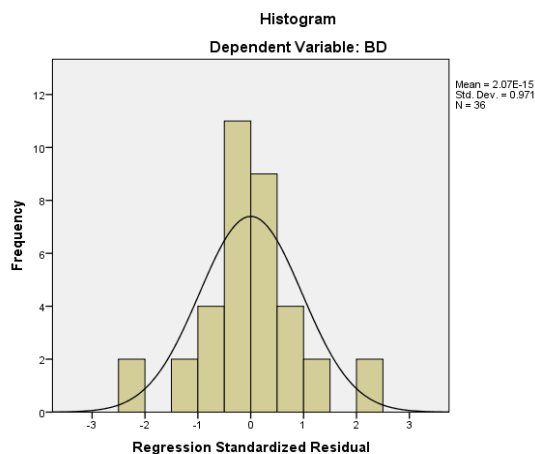
## Hasil output SPSS versi 24

### 1. Uji Descriptive Statistics

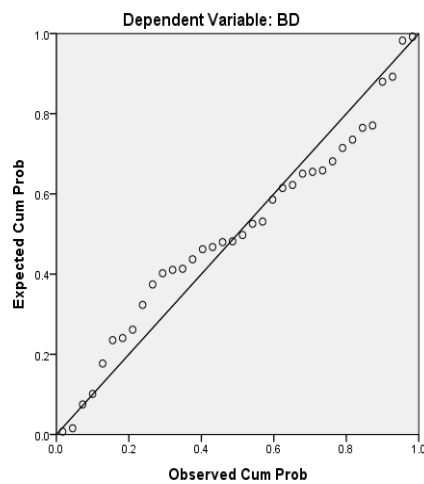
Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	36	104,592,348	4,835,188,460	813,116,579.00	1,285,341,840.000
DAU	36	330,336,650	1,028,451,956	658,402,717.30	178,809,661.500
BD	36	971,294,294	5,799,584,400	2,029,213,091.00	1,257,746,514.000
Valid N (listwise)	36				

### 2. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



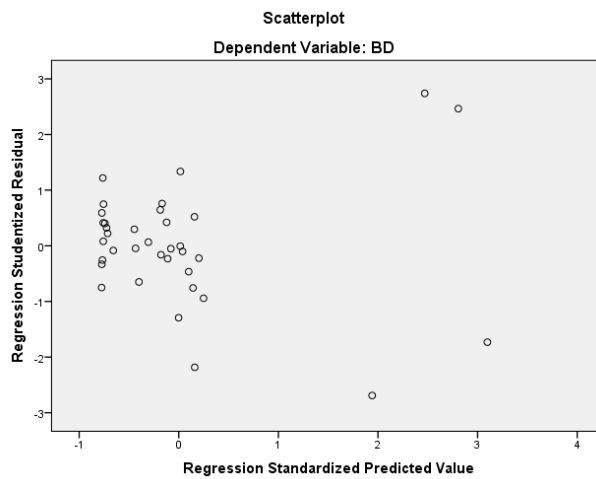
**b. Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.365		
	PAD	.000	.660	1.516
	DAU	.000	.660	1.516

a. Dependent Variable: BD

**c. Uji Heteroskedastisitas**



**d. Uji Autokorelasi**

**Uji Durbin – Watson**

Ada autokorelasi positif	Tidak dapat diputuskan	Tidak ada autokorelasi	Tidak dapat diputuskan	Ada autokorelasi negatif
0	dl	du	4-du	4-dl

**Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.996 <sup>a</sup>	.991	.991	121,783,329.100	2.114

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD  
b. Dependent Variable: BD

### 3. Uji Regresi Linier Berganda

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-96902052.580	105468999.300		-.919	.365
	PAD	1.103	.020	1.127	55.919	.000
	DAU	1.867	.142	.265	13.175	.000

### 4. Uji Hipotesis

#### Uji t (Parsial)

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-96902052.580	105468999.300		-.919	.365
	PAD	1.103	.020	1.127	55.919	.000
	DAU	1.867	.142	.265	13.175	.000

#### Uji F (Simultan)

#### Anova<sup>a</sup>

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	54877991330000000 000.000	2	274389956600000 02000.000	1850.089	.000 <sup>b</sup>
	Residual	48942891490000000 0.000	33	148311792400000 00.000		
	Total	55367420240000000 000.000	35			
a. Dependent Variable: BD						
b. Predictors: (Constant), DAU, PAD						

### Koefisien Determinasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.996 <sup>a</sup>	.991	.991	121,783,329.100
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD				
b. Dependent Variable: BD				



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### Biodata Penulis



#### Data Diri

Nama : Alfita Aprilia Zahrotunisa  
 NIM : E20173026  
 TTL : Jembrana, 22 April 1999  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Jl. Pahlawan Sukoto No.51 Kec. Melaya, Kab. Jembrana-Bali  
 Handphone : 087885677042  
 Email : alfitaaprilia@gmail.com

#### Riwayat Pendidikan :

No	Institusi Pendidikan	Tahun
1	TK Nurul Huda I Melaya	2003-2005
2	SD Negeri 4 Melaya	2005-2011
3	MTS Negeri 3 Jembrana	2011-2014
4	MAN 1 Jembrana	2014-2017
5	UIN KHAS Jember	2017-2021

#### Pengalaman Organisasi:

Anggota Bidang Network HMPS Akuntansi Syariah 2018-2019  
 Ketua Bidang PSDM IMADE 2018-2019

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI  
UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI PERIODE 2016-2019**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Oleh :

**ALFITA APRILIA ZAHROTUNISA**  
NIM : E20173026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DESEMBER 2021**



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI  
UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI PERIODE 2016-2019**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

Oleh :

**ALFITA APRILIA ZAHROTUNISA**

**NIM : E20173026**

Dosen Pembimbing :

**M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I**

**NIP. 19760812 200801 1 015**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DESEMBER 2021**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI  
UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI PERIODE 2016-2019**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

**Alfita Aprilia Zahrotunisa**  
**NIM. E20173026**

Disetujui Pembimbing



**M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I**  
**NIP. 19760812 200801 1 015**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI  
UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI PERIODE 2016-2019**

**SKRIPSI**

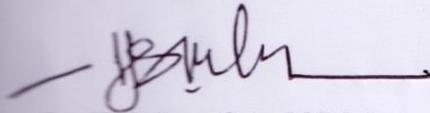
Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Desember 2021

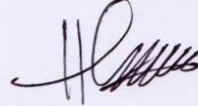
**Tim Penguji**

Ketua



**Dr. H. Saihan, S.Ag M.Pd. I**  
NIP. 19720217 200501 1 001

Sekretaris

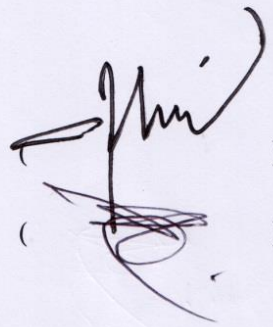


**Nur Hidayat, S.E., M.M**  
NUP. 201603132

Anggota :

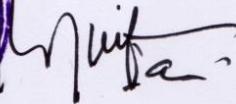
1. Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I.

2. M. F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I



Menyetujui

Dekan Fakultas dan Bisnis Islam



**Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M. Si.**  
NIP. 19680807 200003 1 001

## MOTTO

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ  
فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang”.<sup>1</sup>

(Q.S. Al An'am 165).



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup>Al-Qur'an, 6:165.

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Muhammad Zaenal Arifin dan Mama Mahmudah, yang merupakan inspirasi utama yang tiada hentinya membimbing, mendidik, menasehati, memotivasi, memberi dukungan moral maupun materiil serta selalu bersujud memanjatkan doa agar anaknya menjadi orang yang berguna dan sukses dunia akhirat.
2. Adik yang saya sayangi Safira Amelia Agustin Rahayu yang telah memberikan semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Keluarga besar Bapak (M. Zaenal Arifin) dan Mama (Mahmudah).
4. Ahmad Roby Ainun Naim, Rizkia Kurnia Pratami dan Nofia Candra Noor Wijayanti yang telah membantu, menemani dan memberi semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Teman saya, Fina Ariantina, Ira Qomariyatul Hasanah, Anis Viyatul Hamidah dan Ifa Dalia Ulabanati serta teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2017 yang telah berjuang bersama dari semester awal hingga tugas akhir kuliah.
6. Almamater khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tercinta, semoga karya ini bisa menjadi bukti cinta dan bukan menjadi bukti perpisahan.
7. Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya semata-mata karena Hidayah-Nya, tak lupa sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita di kehidupan yang penuh pengetahuan seperti saat ini.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2016-2019”** dengan lancar sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana di UIN KHAS Jember. Terlepas dari hal tersebut, kurangnya pengetahuan penulis tentu berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak merupakan hal yang berharga bagi penulis.

Tanpa motivasi, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, tentunya penulisan skripsi ini tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan seiring dengan hal tersebut, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama penulis menuntut ilmu di UIN KHAS Jember.

2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
3. Bapak Daru Anondo, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah UIN KHAS Jember.
4. Toton Fanshurna M,E.I selaku Dosen Pembimbing Akademik UIN KHAS Jember.
5. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I.,M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi ini yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Semua pihak yang terlibat dan telah berjasa dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Jember, 29 Desember 2021  
Penulis

**Alfita Aprilia Zahrotunisa**  
NIM. E20173026

## ABSTRAK

**Alfita Aprilia Zahrotunisa, 2021 : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2016-2019.**

Permasalahan dana alokasi umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pemerintahan pusat dan daerah tentang dana alokasi umum tersebut. Bagi pemerintah pusat, dana alokasi umum digunakan sebagai pemerataan atau mengisi fiscal gap (kesenjangan fiskal). Sedangkan bagi daerah, dana alokasi umum digunakan sebagai pendukung kecukupan suatu daerah. Permasalahan akan timbul ketika suatu daerah meminta dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhannya sehingga anggaran pengeluaran daerah yang mencerminkan kebutuhan sesungguhnya cenderung tidak efisien.

Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini ialah (1) Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada kab/kota di provinsi Bali periode 2016-2019? (2) Apakah dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada kab/kota di provinsi Bali periode 2016-2019? (3) Apakah terdapat pengaruh simultan PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2016-2019?

Tujuan penelitian ini ialah (1) Untuk mengetahui Pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (2) Untuk mengetahui Pengaruh signifikan Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (3) Untuk mengetahui Pengaruh DAU dan PAD secara simultan terhadap Belanja Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Bali.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab/Kota di Provinsi Bali. Data diperoleh dengan melakukan pengumpulan data berupa dokumentasi. Sedangkan pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *sampling jenuh*, dimana 8 kabupaten dan 1 kota digunakan sebagai sampel penelitian. Alat analisis data berupa uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda dan pengujian hipotesis dengan bantuan program SPSS Statistics versi 24.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan atau positif terhadap Belanja Daerah. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan atau positif terhadap Belanja Daerah. (3) Sedangkan secara simultan PAD dan DAU juga berpengaruh signifikan atau positif terhadap belanja daerah pada kabupaten.kota di Provinsi Bali periode 2016-2019 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $F_{hitung}$  1850.089 lebih besar daripada  $F_{tabel}$  4.14.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, dan Belanja Daerah.



## ABSTRACT

**Alfita Aprilia Zahrotunisa, 2021:** *The Effect of Regional Original Income and General Allocation Funds on Regional Expenditures in Regencies/Cities in the Province of Bali for the 2016-2019 Period.*

The problem with general allocation funds lies in the different perspectives between the central and local governments regarding the general allocation funds. For the central government, the general allocation fund is used for equity or filling the fiscal gap. As for the regions, general allocation funds are used to support the adequacy of a region. Problems will arise when a region requests general allocation funds according to their needs so that regional expenditure budgets that reflect actual needs tend to be inefficient.

The formulation of the problem studied in this study is (1) Does local revenue have a significant effect on regional spending in districts/cities in the province of Bali for the 2016-2019 period? (2) Does the general allocation fund have a significant effect on regional spending in districts/cities in the province of Bali for the 2016-2019 period? (3) Is there a simultaneous influence of PAD and DAU on Regional Expenditures in Regencies/Cities in Bali Province for the 2016-2019 period?

The purposes of this study are (1) to determine the significant effect of Regional Original Income on Regency/City regional expenditures in the Province of Bali. (2) To find out the significant effect of the General Allocation Fund on Regency/City regional expenditures in the Province of Bali. (3) To determine the simultaneous influence of DAU and PAD on Regional Expenditures in Districts/Cities in Bali Province.

This study uses a quantitative approach with secondary data sourced from the Report on the Realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget of the Regency / City in the Province of Bali. Data obtained by collecting data in the form of documentation. While the sampling of the study used a saturated sampling technique, where 8 districts and 1 city were used as research samples. Data analysis tools in the form of classical assumption test and multiple linear regression test and hypothesis testing with the help of SPSS Statistics version 24 program.

The results of this study indicate that (1) Regional Original Income has a significant or positive effect on Regional Expenditures. (2) The General Allocation Fund has a significant or positive effect on Regional Expenditures. (3) Simultaneously, PAD and DAU also have a significant or positive effect on regional spending in districts in Bali Province for the 2016-2019 period with a significance value of  $0.000 < 0.05$  and an Fcount value of 1850.089 which is greater than Ftable 4.14.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, dan Belanja Daerah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional.....	12
G. Asumsi Penelitian.....	15
H. Hipotesis.....	15
I. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	18
2. Populasi dan Sampel Penelitian.....	19

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	19
4. Analisis Data .....	20
J. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	31
B. Kajian Teori .....	39
1. Teori Keagenan .....	40
2. Pendapatan Asli Daerah .....	41
3. Dana Alokasi Umum .....	45
4. Belanja Daerah .....	47
<b>BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	49
B. Penyajian Data .....	54
C. Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	56
D. Pembahasan.....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Surat permohonan izin penelitian	
3. Surat selesai penelitian	
4. Matrik Penelitian	
5. Jurnal Kegiatan	
6. Laporan Realisasi PAD, DAU,dan Belanja Daerah	
7. Hasil Output SPSS Statistics Versi 24	
8. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Durbin Watson .....	23
Tabel 2. 1 Formulasi Penghitungan Dana Alokasi Umum .....	46
Tabel 3. 1 Data PAD, DAU dan Belanja Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2019 (Dalam Ribu Rupiah) .....	55
Tabel 3. 2 Hasil Uji Descriptive Statistics .....	57
Tabel 3. 3 Uji Multikolinieritas.....	60
Tabel 3. 4 Uji Durbin – Watson.....	63
Tabel 3. 5 Uji Autokorelasi.....	63
Tabel 3. 6 Regresi Linier Berganda .....	65
Tabel 3. 7 Uji t (Parsial).....	66
Tabel 3. 8 Uji F (Simultan) .....	68
Tabel 3. 9 Koefisien Determinasi.....	69

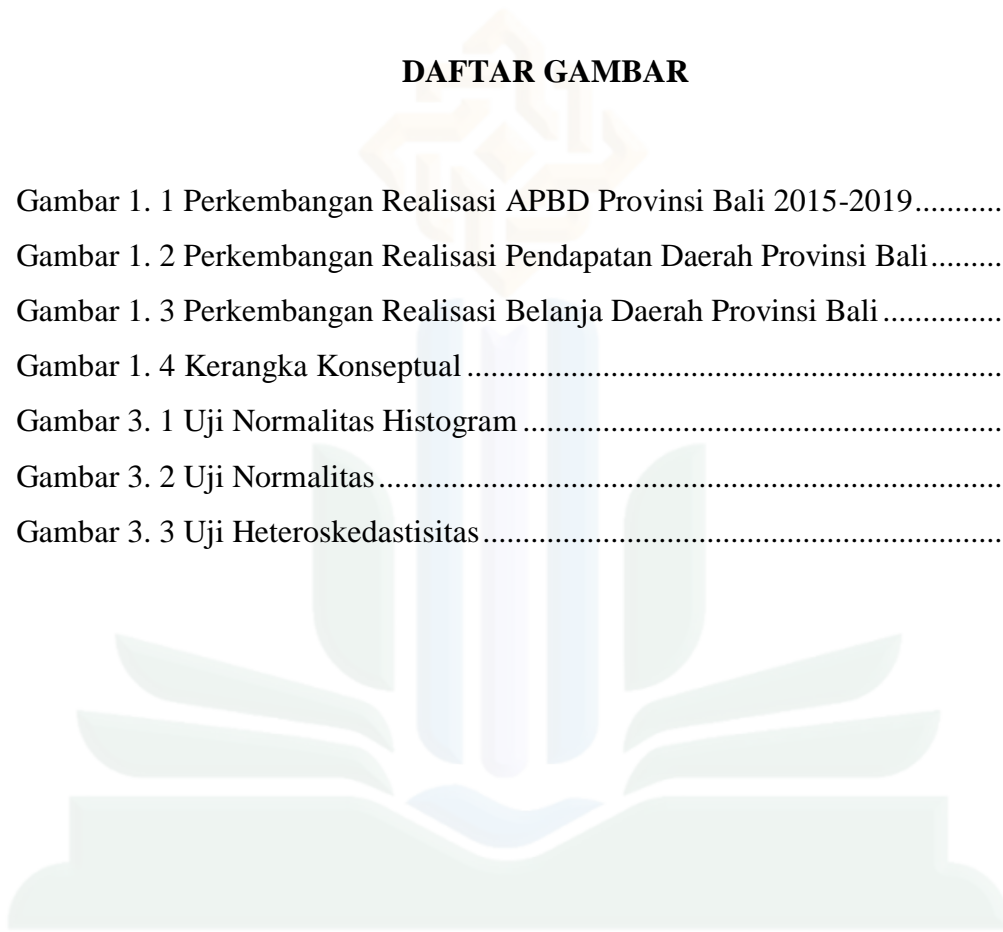
**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan Realisasi APBD Provinsi Bali 2015-2019.....	7
Gambar 1. 2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali.....	8
Gambar 1. 3 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali .....	8
Gambar 1. 4 Kerangka Konseptual .....	15
Gambar 3. 1 Uji Normalitas Histogram .....	59
Gambar 3. 2 Uji Normalitas .....	59
Gambar 3. 3 Uji Heteroskedastisitas .....	62



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah dimulai pada 1 Januari 2001. Namun dalam proses implementasinya masih terdapat berbagai kendala. Pasalnya, persoalan otonomi daerah sangat kompleks, memiliki banyak keterkaitan dan melibatkan banyak variabel. Salah satu isu penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, antar pemerintah daerah terjadi pembagian kewenangan baik dari segi keuangan maupun sumber pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, pengawasan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau hubungan fiskal antar pemerintah telah mengalami perubahan yang mendasar. Namun dalam perkembangan selanjutnya, UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 tidak lagi bergantung pada situasi, pedoman penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004. Hal ini merupakan babak baru yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam segala bidang kehidupan.<sup>2</sup>

Pemerintah daerah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja

---

<sup>2</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindi Persada, 2008), 9.

Daerah dan Prioritas Anggaran Sementara (PAS) sebagai pedoman pengalokasian sumber daya dalam APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah tahunan yang dibahas dan disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Ada dua jenis belanja daerah, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung didefinisikan sebagai bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Sedangkan, Belanja tak langsung didefinisikan sebagai bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari : belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.<sup>3</sup>

Menurut Mardiasmo Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik. Tujuan

---

<sup>3</sup>Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta:Erlangga, 2010), 87.

utama penyelenggaran otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah.<sup>4</sup>

Kebijakan otonomi daerah dapat memengaruhi perekonomian bahkan juga dapat mempercepat peningkatan perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih bisa mandiri dalam mengelola penerimaan daerah yang ditujukan untuk proses restrukturisasi atau upaya pembangunan daerah. Meningkatkan Belanja Daerah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, melalui Belanja Daerah pemerintah daerah membangun fasilitas publik dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik. Pembangunan fasilitas akan memicu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai Belanja Daerahnya masing-masing.<sup>5</sup>

Kejadian ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pemerintah mengatasi ketimpangan fiskal ini, dengan cara mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Otonomi daerah menekan adanya peranan serta kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan juga pengelolaan keuangan daerah yang diupayakan semakin membaik. Pemerintah daerah perlu mengubah komposisi belanja yang sebelumnya didominasi untuk penggunaan belanja rutin yang relatif

---

<sup>4</sup>Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002).

<sup>5</sup>Ida Bagus Dwi Putra dan A. A. N. B. Dwirandra, "Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, (2015).



kurang produktif, akan tetapi bisa mengalokasikan belanja yang mengacu kepada pendanaan atas pengadaan pelayanan umum kepada masyarakat di berbagai sektor, dengan semakin meningkatnya belanja maka akan dibutuhkan dana yang besar sehingga belanja untuk pemerintah dapat terpenuhi.<sup>6</sup>

Permasalahan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah terlalu menggantungkan Dana Alokasi Umum untuk membiayai belanja daerah dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Disaat DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha supaya pada periode berikutnya dana alokasi umum (DAU) yang diperoleh tetap. Proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling besar 20%. Kenyataan inilah yang menimbulkan perilaku asimetris pada pemerintah daerah. Yang mana permasalahan akan timbul ketika suatu daerah meminta dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhannya sehingga anggaran pengeluaran daerah yang mencerminkan kebutuhan sesungguhnya cenderung tidak efisien.<sup>7</sup>

Hasil penelitian empiris oleh Dessy Tri Wulansari menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara Dana Alokasi

---

<sup>6</sup>Sorong, "Analisis Hubungan DAU, PAD dan Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol.1 No 3.

<sup>7</sup>Elisabeth, Skripsi : "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat", (Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 2018).

Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.<sup>8</sup> Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abel Rinaldi menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Dana Perimbangan Berpengaruh terhadap Belanja Modal.<sup>9</sup> Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah sehingga besar kecilnya penerimaan dana alokasi khusus atau dana bagi hasil tidak signifikan pengaruhnya terhadap belanja daerah.<sup>10</sup> Akan tetapi pada penelitian Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattisahusiwa menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan

---

<sup>8</sup>Dessy Tri Wulansari, Skripsi : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2012-2013)”. (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

<sup>9</sup>Abel Rinaldi, Skripsi : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan”, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang : 2016).

<sup>10</sup>Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol.21 No.1 (Juli, 2019).

Timur.<sup>11</sup> Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil temuan, sehingga menjadi celah penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas bagaimana penerimaan daerah yang diantaranya pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dapat mempengaruhi Belanja Daerah.

Pada tahun 2020 Bali telah mendapatkan penghargaan sebagai destinasi wisata terbaik di Asia versi Tripadvisor yang merupakan platform wisata terbesar di dunia. Selain itu, Bali juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai *the best destination of the year* pada ajang *TTG (Travel Trade Gazette) Award 2019*.<sup>12</sup> Perkembangan pariwisata di Provinsi Bali telah memungkinkan untuk berkembangnya Industri yang terkait langsung dengan pariwisata, seperti Industri pengolahan, hiburan, perdagangan, perhotelan dan juga restoran. Dalam hal ini provinsi Bali merupakan salah satu objek wisata tujuan wisatawan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah harus cerdas mengelola kinerja keuangannya terutama sumber pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan asli daerah dapat semakin meningkat. Kemampuan suatu daerah untuk menggali pendapatan asli daerah tentunya akan memengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut.<sup>13</sup>

---

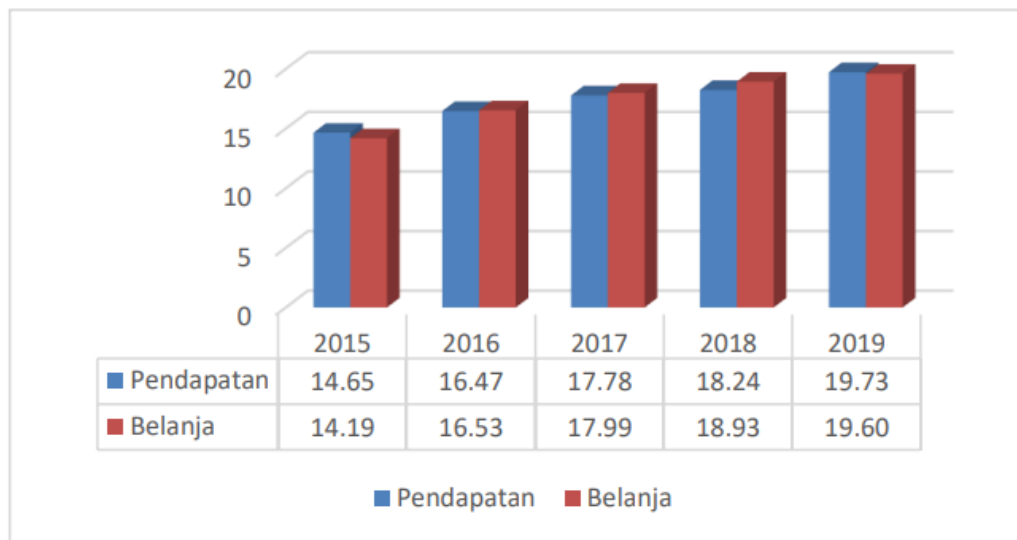
<sup>11</sup>Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattisahusiwa, ” Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah”, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, Vol.14 No.1 (2018).

<sup>12</sup>Kompas.com, “Kalahkan London Bali Jadi Destinasi Terbaik Dunia Versi Tripadvisor”. <https://travel.kompas.com/read/2021/01/28/121200627/kalahkan-london-bali-jadi-destinasi-terbaik-dunia-versi-tripadvisor?page=all> (diakses pada tanggal 5 November 2021)

<sup>13</sup>Anak Agung Gede Mantra Suarjana dan Nyoman Indah Kusuma Dewi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali”, *Jurnal bisnis dan kewirausahaan*, Vol. 14 No. 2 (Juli,2018).

**Gambar 1. 1**  
**Perkembangan Realisasi APBD Provinsi Bali 2015-2019**

*Gambar 1. Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali 2015 – 2019 (Triliun Rupiah)*



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

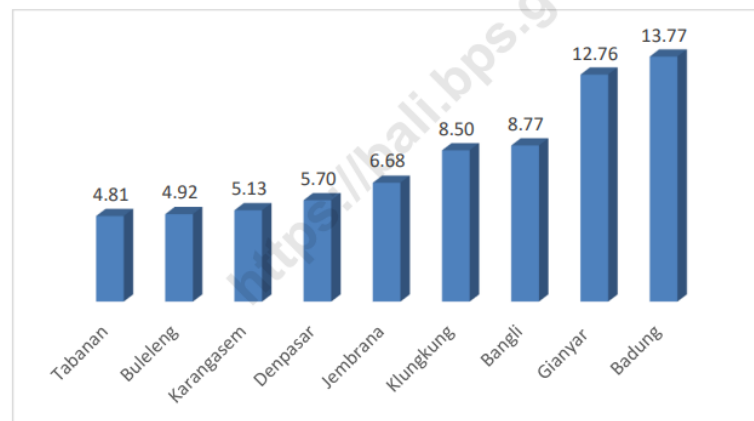
Terlihat pada tabel perkembangan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada 8 kabupaten dan 1 kota yang tersebar di provinsi Bali tahun 2015-2019 terlihat adanya trend kenaikan pendapatan maupun belanja daerah yang mana jumlah pendapatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bali mencapai 14,65 triliun rupiah di tahun 2015 kemudian menjadi 19,73 triliun rupiah pada tahun 2019, jika dipersentasekan pertumbuhannya mencapai 34,68 persen atau tumbuh rata – rata 8,67 persen per tahunnya. Dalam rentang waktu 2015 – 2019, belanja daerah tumbuh dari 14,19 triliun pada tahun 2015 menjadi 19,60 triliun di tahun 2019, mengalami kenaikan sebesar 38,13 persen atau naik rata - rata 9,53 persen per tahun. Seiring

dengan peningkatan pendapatan daerah, total belanja daerah pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali juga mengalami kenaikan.<sup>14</sup>

### Gambar 1. 2

#### Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Gambar 3. Rata - Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen)

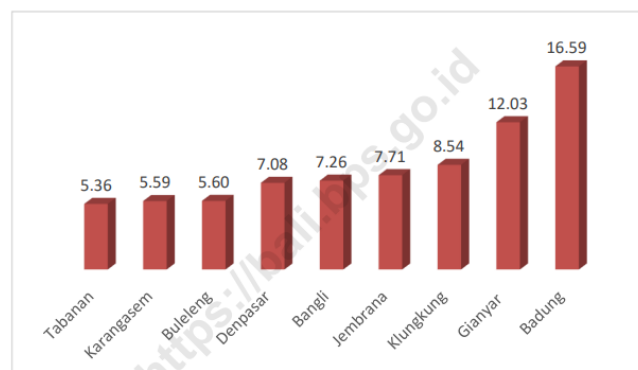


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

### Gambar 1. 3

#### Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali

Gambar 4. Rata - Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

<sup>14</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2015-2019.

Pada gambar diatas Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Gianyar tercatat sebagai wilayah dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan per tahunnya lebih besar dari pada rata-rata pertumbuhan pengeluaran per tahunnya. Dimana seiring dengan peningkatan pendapatan daerah, seharusnya diikuti juga dengan kenaikan total belanja daerah pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali. Selain itu, dari sektor penerimaan pendapatan asli daerah, serta pemberian dana perimbangan oleh pemerintah pusat juga akan berpengaruh dikarenakan pembelanjaan untuk pengadaan fasilitas publik berasal dari anggaran pendapatan daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal yang berupa Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah. Berdasarkan latar belakang diatas maka judul yang digunakan peneliti yaitu **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2016-2019”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali ?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali?

3. Apakah terdapat pengaruh simultan PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
3. Untuk mengetahui pengaruh DAU dan PAD secara simultan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Berdasarkan tujuan diatas, maka diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Manfaat teoritis
  - a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.

## 2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Pemerintah Daerah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan demi kemajuan daerah.

b. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.<sup>15</sup> Adapun variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dengan uraian sebagai berikut :

#### a. Variabel independen (X)

Variabel independent atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

---

<sup>15</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 38.



variabel terikat.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Pendapatan Asli Daerah ( $x_1$ ), dan Dana Alokasi Umum ( $x_2$ ).

b. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karenanya adanya variabel bebas.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah belanja daerah.

## 2. Indikator Variabel

- a. Indikator Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta PAD yang sah.
- b. Indikator Dana Alokasi Umum terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.
- c. Indikator Belanja Daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.<sup>18</sup>

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang digunakan sebagai pijakan pengukuran secara empiris terhadap variabel penelitian dengan rumusan yang didasarkan pada indikator variabel.<sup>19</sup> Definisi operasional penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut :

<sup>16</sup>Sugiono, 39.

<sup>17</sup>Sugiono, 39.

<sup>18</sup>Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2015-2019.

<sup>19</sup>Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 38.

## 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.<sup>20</sup>

## 2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Namun, daerah kabupaten/kota yang ada di provinsi Jakarta tidak menerima DAU karena otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup provinsi sesuai dengan perundangan yang berlaku. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.<sup>21</sup> Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 porsi DAU ditetapkan sekurang-

---

<sup>20</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindi Persada, 2008), 52.

<sup>21</sup>Ahmad Yani, 52

kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, proporsi pembagian DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota.<sup>22</sup>

### 3. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda.<sup>23</sup> Belanja daerah dipergunakan oleh provinsi dan kabupaten/kota guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah dalam suatu bagian atau bidang tertentu pada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas

---

<sup>22</sup>Kusnandar Dodik Siswanto, "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal", *Jurnal Penelitian Universitas Indonesia*, (2012).

<sup>23</sup>Abdul Halim, 2007, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.

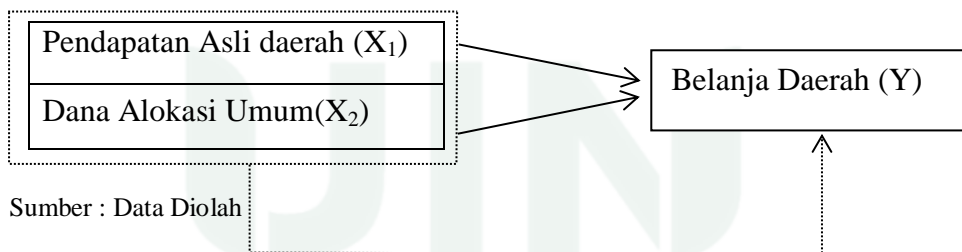
Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda.<sup>24</sup>

### G. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian bisa disebut juga sebagai anggapan dasar, yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Anggapan dasar harus dirumuskan secara jelas sebelum peneliti melangkah mengumpulkan data.<sup>25</sup> Asumsi pada penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum, (DAU) Terhadap alokasi belanja daerah. Asumsi penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1. 4**

#### **Kerangka Konseptual**



#### **Keterangan :**

Uji secara parsial :  $\longrightarrow$

Uji secara simultan :  $\cdots\cdots\longrightarrow$

### H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun

<sup>24</sup>Novi Pratiwi, 2007, "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia". Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.

<sup>25</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 39.

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah”, maka hipotesisnya sebagai berikut :

#### **1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.**

Jika PAD suatu daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali sumber potensi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja daerah pun akan ikut meningkat. Penelitian sebelumnya tentang Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah telah dilakukan oleh Devita dkk.<sup>27</sup> Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa dan Permata<sup>28</sup> juga menemukan bahwa PAD

---

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014), 99.

<sup>27</sup>Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol.2 No.2 (2014), 63-70.

<sup>28</sup>Permata Zhara Sasaki Widoasri, 2016, “Pengaruh pendapatan asli daerah (pad) dan dana perimbangan terhadap belanja modal”. STIESIA Surabaya.

berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah.<sup>29</sup> Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>1</sub>: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.**

## **2. Pengaruh Dana Alokasi umum terhadap Belanja Daerah.**

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi sebuah daerah. DAU menjadi jaminan kesinambungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dana transfer ini akan menambah alokasi Belanja Daerah yang berguna untuk memenuhi segala pelayanan masyarakat serta pembangunan daerahnya. Terlebih lagi adanya tujuan untuk pemerataan dengan memperhatikan kondisi sekitar sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.<sup>30</sup> Hal ini diperkuat oleh penelitian Askam Tuasikal<sup>31</sup> dan Afrizawati yang menunjukkan Dana Alokasi Umum berpengaruh pada Belanja Daerah.<sup>32</sup> Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>2</sub>: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.**

<sup>29</sup>Kesit Bambang Prakoso, “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empiris Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)”, *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol.8 No.2, 101-118.

<sup>30</sup>UU No.33 Tahun 2004.

<sup>31</sup>Askal Tuasikal, “Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”, *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Vol.1 No.2 (2014), 142-155.

<sup>32</sup>Afrizawati, “Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, Vol.2 No.1, 21-30.

### 3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah.

Dalam penelitian Kesit Bambang Prakosa menyatakan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah yang di dapat akan menentukan besarnya alokasi Belanja Daerah.<sup>33</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Andri Devita<sup>34</sup>, Diah Ayu Kusumadewi dan Arif Rahman<sup>35</sup> juga menyatakan bahwa PAD dan DAU menunjukkan pengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi Belanja Daerah. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>3</sub>: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.**

## I. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan jenis penelitian analisis asosiatif yaitu suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan dalam penelitian ini

<sup>33</sup>Kesit Bambang Prakoso, “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empiris Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)”, *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol.8 No 2, (2012), 101-118.

<sup>34</sup>Andri Devita, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 2 No. 2 (2004).

<sup>35</sup>Diah Ayu Kusumadewi dan Arif Rahman, “Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol.11 No.1 (Juni, 2007), 67–80.



menganalisis hubungan kausal yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi).<sup>36</sup>

## 2. Populasi dan Sampel Penelitian

### a. Populasi Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.<sup>37</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 8 Kabupaten (Badung, Bangli, Bueleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan) dan 1 Kota (Denpasar) di Provinsi Bali .

### b. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>38</sup> Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Sampling Jenuh*, yaitu dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian.

## 3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Observasi Non-Partisipan

Dalam hal ini peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independent.

---

<sup>36</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 36-37.

<sup>37</sup>Sugiyono, 80.

<sup>38</sup>Sugiyono, 81.



#### b. Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis dan menghimpun informasi-informasi dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

#### c. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain.<sup>39</sup> Data ini biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini iyalah data runtun waktu (time series) selama 4 tahun. Data yang digunakan yaitu laporan realisasi APBD provinsi Bali dari laman website Badan Pusat Statistik Bali atau [www.bali.bps.go.id](http://www.bali.bps.go.id)

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini jenis analisis statistik yang digunakan adalah *analisis statistik deskriptif* digunakan untuk memberikan deskripsi suatu objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum dari data tersebut. Variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan melalui statistik deskriptif dengan melihat nilai mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan standart deviasi.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini variabel independennya iyalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum,

---

<sup>39</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014), 308.

<sup>40</sup>Sugiyono dan Agus Susanto, *Cara Mudah Belajar SPSS dan LISRELL*, 11.

sedangkan variabel dependennya yakni Belanja Daerah. Dalam hal ini akan melihat pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah. Untuk menganalisis dan menguji data yang ada dalam penelitian ini dengan menggunakan *Statistic Program for Social Science 24*.

Dalam penelitian ini tahap analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

**a. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelatakan penggunaan model regresi dalam penelitian. Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis, dimana uji ini untuk mengetahui apakah data telah memenuhi asumsi-asumsi dasar serta memastikan bahwa data yang dihasilkan terdistribusi normal. Diperlukan uji asumsi klasik ini adalah untuk menghindari estimasi yang bias, adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah :

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng (*Bell-shaped curve*) yang kedua sisinya melebar hingga tak terhingga. Uji normalitas tidak dilakukan pervariabel

(*univariate*) tetapi hanya terdapat nilai residual terstandarisasinya *mutivariate*.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan analisis grafik. Pengujian normalitas menggunakan analisis grafik dilakukan dengan menggunakan histogram dengan menggambarkan variabel dependen sebagai sumbu vertikal dan nilai residual terstandarisasi digambarkan dengan sumbu horizontal. Jika *Histogram Standardized Regression Residual* membentuk kurva seperti lonceng maka nilai residual tersebut dinyatakan normal. Cara lain untuk menguji normalitas dengan pendekatan grafik adalah menggunakan *Normal Probability Plot*, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dengan data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Distribusi kumulatif dari data sesungguhnya digambarkan dengan *Plotting*. Jika data normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya.<sup>42</sup>

## 2. Uji Multikoleniaritas

Pengujian ini berguna untuk mengidentifikasi apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik sebenarnya tidak terjadi korelasi di antara

---

<sup>41</sup>Ibid., 69.

<sup>42</sup>Ibid., 69.

variabel bebasnya.<sup>43</sup> Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Batasan umum yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* > 0,1 atau *VIF* < 10 berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi.

### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*time-series*) atau ruang (*cross-section*). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pada prosedur pendeteksian masalah autokorelasi dapat digunakan besaran Durbin-Watson. :

**Tabel 1. 1**  
**Durbin Watson**

Ketentuan	Kesimpulan	Hipotesis Awal
$0 < d < d_L$	Tolak	Tidak ada autokorelasi positif
$d_L \leq d \leq d_u$	Tidak ada keputusan	Tidak ada autokorelasi positif
$4 - d_L < d < 4$	Tolak	Tidak ada autokorelasi negatif
$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_L$	Tidak ada keputusan	Tidak ada autokorelasi negatif
$d_u \leq d \leq 4 - d_u$	Tidak tolak	Tidak ada autokorelasi positif maupun negatif

### 4) Uji Heteroskedastitas

Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada

<sup>43</sup>Ghozali. *Aplikasi analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016).

model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan homoskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas sering terjadi pada penelitian yang menggunakan data *cross-section*. Penelitian ini menggunakan metode grafik *scatterplot* untuk menguji adanya heteroskedastisitas. Jika terdapat pola tertentu pada grafik *scatterplot* seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang) maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi secara lebih lanjut mengenai variabel bebas mana yang menjadi penyebab terjadinya masalah heteroskedastisitas, kita dapat mengamati *scatterplot* dimana variabel bebas sebagai sumbu horizontal dan nilai residual kuadratnya sebagai sumbu vertikal.<sup>44</sup>

#### b. Analisis Regresi Berganda

Regresi berganda adalah analisis pengaruh antara dua variabel bebas atau lebih ( $X_1, X_2, X_3$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ ).<sup>45</sup>

Rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

$Y$  = alokasi belanja daerah

$\alpha$  = Konstanta

<sup>44</sup>Ibid.,95.

<sup>45</sup>Suliyanto, *Ekonometrika Terapan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 53.

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah

$X_2$  = Dana Alokasi Umum

$e$  = Standar error

### c. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis maka peneliti melakukan beberapa uji, yaitu analisis regresi berganda, uji  $t$  secara parsial, uji  $F$  secara Simultan, serta Koefisien Determinasi

#### 1. Uji Statistik $t$ (Uji Parsial)

Uji  $t$  digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0.05 (5%). Apabila tingkat signifikansi setiap variabel berada dibawah 0.05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.<sup>46</sup> Adapun langkah-langkah uji  $t$  adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

##### a) Menentukan hipotesis

➤  $H_0 : b_1 \neq 0$  artinya dalam notasi  $H_0$  adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara PAD terhadap belanja daerah

$H_1 : b_1 = 0$  artinya dalam notasi  $H_1$  adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap belanja daerah

<sup>46</sup>Agus Widarjono, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2009), 46.

<sup>47</sup>Mundir, *Statistik Pendidikan* (Jember: STAIN-Press Jember, 2014), 119.

➤  $H_0 : b_2 \neq 0$  artinya dalam notasi  $H_0$  adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara DAU terhadap belanja daerah

$H_2 : b_2 = 0$  artinya dalam notasi  $H_2$  adalah terdapat pengaruh yang signifikan DAU terhadap belanja daerah

b) Nilai Kritis

Nilai Kritis didapat dari tabel distribusi t dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ )

c) Menentukan  $t_{hitung}$  dengan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{x - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Keterangan:

$x$  : rata-rata nilai dari pengumpulan data

$\mu_0$  : nilai yang dihipotesiskan

$s$  : standar deviasi

$n$  : jumlah sampel penelitian

d) Membuat keputusan dengan membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Untuk mencari nilai  $t_{tabel}$  adalah  $df = n-k$ .

e) Membuat Kesimpulan

➤ Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $< 0,05$  maka variabel independen ( $X$ ) atau PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ( $Y$ ) yaitu belanja daerah.

➤ Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $> 0,05$  maka variabel PAD dan DAU berpengaruh tidak secara



signifikan terhadap variabel dependen (Y) atau Belanja daerah.

## 2. Uji Simultan F

Uji F bertujuan menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F ini juga sering disebut sebagai uji simultan, untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel terikat atau tidak. Langkah-langkah dari Uji F yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>

### a. Menentukan Hipotesis

$H_3 = \beta_1 = \beta_2 = 0$ , berarti secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu PAD, dan DAU terhadap variabel dependen yaitu belanja daerah.

$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$ , berarti secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu PAD, dan DAU terhadap belanja daerah.

### b. Nilai Kritis

Nilai kritis didapat dari tabel F dengan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ )

### c. Nilai $F_{hitung}$

<sup>48</sup>Ridwan dan Sunarto, *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis* (Bandung:Alfabeta, 2014),86.

$$F_{hitung} = \frac{R^2 (n - k - 1)}{K(1 - R^2)}$$

Keterangan :

$R^2$  = Koefisien Determinasi

n = jumlah data atau sampel

k = jumlah variabel independen

d. Keputusan

Membuat keputusan dengan membandingkan antara  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Untuk mencari nilai  $F_{tabel}$  adalah  $df = n - k$ .

e. Membuat kesimpulan:

- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima, menyatakan bahwa masing-masing variabel PAD dan DAU secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel belanja daerah.
- Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak, menyatakan bahwa PAD dan DAU secara simultan mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap variabel belanja daerah.

3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model.<sup>49</sup> Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi:

$$0 < R^2 < 1$$

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Nilai  $R^2$  mendekati 0, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas.
- Nilai  $R^2$  mendekati 1, berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Format

---

<sup>49</sup>Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), 95.

penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti pada daftar isi.<sup>50</sup>

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan satu sama lain. Masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab.

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, asumsi penelitian, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II Kajian Kepustakaan**

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan acuan dan penguat dalam penelitian ini, dan kajian teori yang membahas teori-teori tentang pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja daerah.

### **BAB III Penyajian Data dan Analisis Data**

Penyajian Data dan Pembahasan, bab ini membahas tentang penyajian data dan analisis yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis dan pengujian hipotesis dan pembahasan.

### **BAB IV Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, saran untuk penelitian selanjutnya dan pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>50</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 42.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sejauh mana keaslian karya tulis, persamaan dan perbedaan yang hendak dilakukan.<sup>51</sup> Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang terlebih dahulu melakukan penelitian, diantaranya :

1. Skripsi penelitian oleh Dessy Tri Wulansari. Yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2012-2013)”. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan hipotesis kelima menunjukkan bahwa terdapat flypaper effect pada Belanja Pemerintah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, hal ini terjadi karena pengaruh DAU terhadap

---

<sup>51</sup>Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

Belanja Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.<sup>52</sup>

2. Skripsi penelitian Abel Rinaldi. Yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan”. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Dana Perimbangan Berpengaruh terhadap Belanja Modal.<sup>53</sup>
3. Jurnal penelitian oleh Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah kota Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan Hasil analisis korelasi menunjukkan hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah dengan kategori sangat kuat dan hubungan dana perimbangan dengan belanja daerah dengan kategori sangat kuat. Hasil uji hipotesis secara parsial dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Hasil uji hipotesis secara simultan maka dapat

---

<sup>52</sup>Dessy Tri Wulansari, Skripsi : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2012-2013)”. (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

<sup>53</sup>Abel Rinaldi, Skripsi : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan”. ( Palembang : Universitas Muhammadiyah Palembang : 2016).

diketahui terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung.<sup>54</sup>

4. Jurnal penelitian oleh Desak Gede Yudi, Atika Sari Putu Kepramareni, dan Ni Luh Gede Novitasari dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Bali”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sementara pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.<sup>55</sup>
5. Jurnal penelitian oleh Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattisahusiwa dengan judul ”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap p belanja daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana

---

<sup>54</sup>Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah kota Bandung”, *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol.1 No.1 (Juni, 2017).

<sup>55</sup>Desak Gede Yudi, Atika Sari Putu Kepramareni, dan Ni Luh Gede Novitasari, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Bali”, *Jurnal Krisna : Kumpulan Riset Akuntansi*, Vol. 9 No.1 (Juli, 2017).



Perimbangan tidak pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.<sup>56</sup>

6. Skripsi penelitian oleh Elisabeth. Yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flaypaper Effect pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat”. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2015-2016. Sedangkan, Dana Bagi Hasil berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2015-2016. Hasil penelitian juga menunjukkan hasil nilai koefisien Dana Alokasi Umum lebih besar dari pada nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah dan keduanya signifikan, oleh karena itu terjadi fenomena *flaypaper effect* di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2015-2016.<sup>57</sup>
7. Jurnal penelitian oleh Febdwi Suryani dan Eka Pariani dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau”. Hasil penelitian uji Regresi simultan (Uji F) menunjukkan bahwa seluruh variabel

<sup>56</sup>Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattisahusiwa, ”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah”, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, Vol.14 No.1 (2018).

<sup>57</sup>Elisabet, Skripsi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah”, (Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 2018).

independen (pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (belanja modal). Uji regresi parsial (Uji T) menunjukkan bahwa variabel independen (pendapatan asli daerah) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (belanja modal) dan dana alokasi umum terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Besarnya pengaruh yang di timbulkan (R<sup>2</sup>) oleh kedua variabel independen menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memberikan pengaruh terhadap belanja modal.<sup>58</sup>

8. Jurnal penelitian oleh Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah sehingga besar kecilnya penerimaan dana alokasi khusus atau dana bagi hasil tidak signifikan pengaruhnya terhadap belanja daerah.<sup>59</sup>
9. Skripsi penelitian Rizka Rahmalia. Yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi

---

<sup>58</sup>Febdwi Suryani dan Eka Pariani, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, Vol.6 No. 1 (2018).

<sup>59</sup>Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol.22 No.2 (Juli, 2019).

Umum dan Dana Alokasi Khusus) terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2017 (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)”. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.<sup>60</sup>

10. Skripsi penelitian Endang Dwi Wahyuni. Yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode Tahun 2013-2017”. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal dan ada pengaruh signifikan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Jawa periode 2013-2017. Sedangkan secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (PAD, DAU, SiLPA) terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode 2013-2017.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Rizka Rahmalia, Skripsi : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2017 (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan). (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2015).

<sup>61</sup>Endang Dwi Wahyuni, Skripsi : “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode Tahun 2013-2017. (Jember : IAIN Jember, 2020).

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dessy Tri Wulansari (2015).	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2012-2013)	Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni PAD, DAU dan Belanja Daerah.	Terletak pada analisis flypaper effect pada penelitian ini tidak dilakukan serta sampel dan populasinya berbeda.
2.	Abel Rinaldi (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan	Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan pada variabel penelitian yang digunakan yakni PAD dan Dana Perimbangan (DAU).	Perbedaannya pada variabel dependen belanja modal pada penelitian ini tidak ada, serta populasi dan sampel penelitian juga berbeda.
3.	Masayu Raha Wati dan Catur Martian Fajar (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah kota Bandung	Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yakni pada variabel penelitian yang digunakan yakni PAD, Dana Perimbangan (DAU) dan belanja daerah.	Perbedaannya terletak pada populasi dan sampel penelitian.
4.	Desak Gede Yudi, Atika Sari	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli	Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yakni	Perbedaannya terletak pada populasi, sampel penelitian dan

	Putu Kepramarani, dan Ni Luh Gde Novitasari (2017)	Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Bali	pada variabel penelitian yang digunakan yakni PAD dan Dana Perimbangan (DAU).	variabel independen belanja modal pada penelitian ini tidak ada pada penelitian yang dilakukan.
5.	Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattisahusiwa (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah	Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yakni pada variabel penelitian yang digunakan yakni PAD, DAU dan Belanja Daerah.	Perbedaannya terletak pada populasi, sampel penelitian, DAK dan dana perimbangan pada penelitian ini yang tidak ada pada penelitian yang dilakukan.
6.	Elisabeth (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat	Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yakni pada variabel penelitian yang digunakan yakni PAD, DAU dan Belanja Daerah.	Perbedaannya terletak pada populasi, sampel penelitian, DAK, Dana Bagi Hasil, dan analisis flypaper effect pada penelitian ini yang tidak ada pada penelitian yang dilakukan.
7.	Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018)	Perimbangan (DAU) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yakni pada variabel penelitian yang digunakan yakni PAD dan DAU.	Perbedaannya pada variabel independen belanja modal pada penelitian ini yang tidak ada pada penelitian yang dilakukan, serta populasi dan sampel penelitian juga berbeda.
8.	Nabiyatun Nur	Pengaruh Pendapatan	Terdapat kesamaan dengan	Perbedaannya terletak pada

	Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono (2019)	Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah	penelitian yang dilakukan yakni pada variabel penelitian yang digunakan yakni PAD, DAU dan Belanja Daerah.	populasi dan sampel penelitian.
9.	Rizka Rahmalia (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2017 (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)	Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yakni pada variabel penelitian yang digunakan yakni PAD, DAU dan Belanja Daerah.	Perbedaannya terletak pada populasi dan sampel penelitian
10.	Endang Dwi Wahyuni (2020)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Jawa Periode Tahun 2013-2017	Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yakni pada variabel penelitian yang digunakan yakni PAD dan DAU	Perbedaannya terleta pada variabel dependen belanja modal pada penelitian ini tidak ada, serta populasi dan sampel penelitian juga berbeda.

## B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>62</sup>

<sup>62</sup>Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 39.



## 1. *Teori Keagenan*

Teori ini sebagai suatu versi dari *game theory* yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan pertanggung jawaban atas pengambilan keputusan (*decision making*) kepada *agen*, hal itu dapat juga dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.<sup>63</sup>

Kaitan *agency theory* dengan penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (*principal*) dengan pemerintah daerah (*agen*). Pemerintah pusat melakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur secara mandiri segala aktivitas pemerintah daerahnya oleh karena itu sebagai konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah baik dalam mendanai kebutuhan sehari-hari maupun memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Selain itu, teori keagenan tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai *principal* telah memberikan sumber daya kepada pemerintah berupa membayar pajak,

---

<sup>63</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002), 5.



retribusi, dan sebagainya untuk dapat meningkatkan PAD. Pemerintah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah sebagai bentuk dalam perwujudan desentralisasi.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Sedangkan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari :

a) Pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari empat jenis pendapatan diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan Penerimaan Lain-lain.<sup>64</sup> Sedangkan jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- Pajak Hotel dan Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan

---

<sup>64</sup>Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeuaran Pemerintah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 101-103.

- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Parkir

b) Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, mendapat balas jasa langsung. Retribusi dibagi atas tiga golongan :

- Retribusi jasa umum
- Retribusi jasa usaha
- Retribusi perizinan tertentu Laba Badan Usaha Milik

Daerah

Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modal sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan UU. Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD yang disebut bagian laba BUMD. BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah, terdiri dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan (bank pembangunan daerah dan bank pasar) dan di bidang lain, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup<sup>65</sup> :

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dan perbankan dan bidang lain, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil- hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.<sup>66</sup>

d) Penerimaan Lain-lain

---

<sup>65</sup>Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeuaran Pemerintah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 101-103.

<sup>66</sup>Santika Adi Karyadi, Skripsi : “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014*”, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).

Pengertian penerimaan lain-lain Daerah Kabupaten/Kota adalah penerimaan yang diperoleh Daerah Kabupaten/Kota di luar pajak, retribusi, bagian laba BUMD. Beberapa contoh penerimaan yang termasuk kategori penerimaan lain-lain misalnya penerimaan dan hasil penjualan aset milik Pemerintah Daerah dan jasa giro rekening Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### **3. Dana Alokasi Umum**

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum yang disebut dengan DAU adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Alokasi Umum diciptakan dalam mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Daerah dengan kemampuan potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Namun sebaliknya daerah dengan kemampuan potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum diantaranya :

- a) Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b) Dana Alokasi Umum untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten dan kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan di atas.
- c) Dana Alokasi Umum suatu daerah Kabupaten dan Kota tertentu ditetapkan berdasar perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk kabupaten dan kota yang bersangkutan.
- d) Porsi daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Tabel 2. 2

## Formulasi Penghitungan Dana Alokasi Umum

Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU untuk Kabupaten dan Kota
26% x APBN	10% x 26% x APBN	90% x 26% x PDN
<b>DAU suatu Provinsi:</b> bobot seluruh provinsi yang bersangkutan <hr/> x DAU untuk Provinsi bobot seluruh provinsi di Indonesia		
<b>DAU suatu Kabupaten dan Kota:</b> bobot kabupaten dan kota yang bersangkutan <hr/> x DAU untuk Kabupaten bobot seluruh kabupaten dan kota di dan Kota Indonesia		

Sumber: UU No. 25 Tahun 1999

Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah

selisih antara kebutuhan fiskal dan dan kapasitas fiskal, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Formula penghitungan DAU adalah:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Dimana Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum (kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan). Formulasi kebutuhan fiskal ialah :

$$\text{Kebutuhan Fiskal} = \text{Total Belanja Daerah} \times (\text{Jumlah penduduk} (\%) + \text{Luas wilayah} (\%) + \text{Indeks Kemahalan Konstruksi} (\%) + \text{PDRB} (\%) + \text{IPM} (\%)).$$

Sedangkan kapasitas fiskal dihitung berdasarkan jumlah dari Pendapatan Asli daerah (%) dan Dana Bagi Hasil (%).<sup>67</sup>

#### 4. Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan pengertian Belanja Daerah adalah semua pengeluaran daerah yang berasal dari Rekening Kas Umum Daerah dimana daerah tidak perlu menerima pembayarannya kembali dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berkenaan.<sup>68</sup> Sedangkan menurut Undang-undang Np.33 Tahun 2004 Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

<sup>67</sup>Deddi Nordiawan dkk, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 57.

<sup>68</sup>[https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175801/PP\\_Nomor\\_12\\_Tahun\\_2019.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175801/PP_Nomor_12_Tahun_2019.pdf) (diakses 02 Desember 2021).



bersangkutan.<sup>69</sup> Belanja Daerah diklasifikasikan terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer. Belanja pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diklasifikasikan berdasarkan kelompok belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung terdiri atas : belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan kelompok belanja langsung terdiri atas : belanja pegawai, belanja, barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan kelompok belanja langsung terdiri atas : belanja pegawai, belanja, barang dan jasa, dan belanja modal.<sup>70</sup>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>69</sup><http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-pengklasifikasian-belanja-daerah> (diakses 02 Desember 2021).

<sup>70</sup><https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/13/96/ringkasan-realisasi-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-provinsi-bali-2016> (diakses pada 02 Desember 2021).

## BAB III

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan asli daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Bali Periode 2016-2019. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh dari laman website resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan obyek pada penelitian ini menggunakan teknik *Sampling Jenuh* seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode tahun 2016-2019. Untuk menjawab konflik yang diajukan dan pengujian hipotesis, maka teknik analisis yg dipergunakan dalam penelitian ini ialah analisis asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis.

Pulau Bali merupakan salah satu pulau dari 17.000 lebih kepulauan yg ada di Indonesia.<sup>71</sup> Dengan jumlah penduduk Bali sekitar 4.317.404 jiwa (2020) mayoritas etnis Bali. Yang terletak secara goeografis di 8°03'40"-8°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" - 115°42'40" Bujur Timur.<sup>72</sup> Perairan yang mengelilingi pulau ini ialah:

- a. Laut Bali di utara
- b. Selat Bali, Provinsi Jawa Timur di barat
- c. Samudera Hindia di selatan
- d. Selat Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat di timur

---

<sup>71</sup><https://www.getravelaindonesia.com/informasi-umum-tentang-bali/> (diakses pada 4 November 2021).

<sup>72</sup><https://bali.bps.go.id/publication/download> (diakses pada 4 November 2021).

Secara administratif Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten, 1 kotamadya, 55 kecamatan, dan 701 desa/kelurahan yang meliputi :

1. Denpasar

Denpasar merupakan ibu kota Bali yang terletak di pusat Pulau Bali, juga merupakan pusat pemerintahan, pendidikan dan ekonomi. Kota Denpasar - Secara geografis terletak antara  $08^{\circ}35'31''$  -  $08^{\circ}44'49''$  Lintang Selatan dan  $115^{\circ}10'23''$  -  $115^{\circ}16'27''$  Bujur Timur, dengan ketinggian 0-75m di atas permukaan laut. Kota Denpasar memiliki luas wilayah  $127,78 \text{ km}^2$ . Sebagian besar berbatasan dengan Kabupaten Badung di sebelah utara, barat dan selatan. berbatasan dengan Kabupaten Gianyar di sebelah timur dan berbatasan dengan Selat Lombok.<sup>73</sup> Secara administratif Kota Denpasar meliputi 4.444 kecamatan dan 43 desa/Kelurahan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 652.239 jiwa.<sup>74</sup>

2. Tabanan

Kabupaten Tabanan secara geografis terletak antara  $80^{\circ}14'30''$  –  $80^{\circ}30'07''$  lintang selatan serta  $114^{\circ}59'00''$  -  $115^{\circ}02'57''$  bujur timur dengan ketinggian antara 0 – 2276 m dpl. Kabupaten Tabanan mempunyai luas daerah sebesar  $839,33 \text{ km}^2$  dimana, di sebelah utara berbatasan menggunakan Kabupaten Buleleng, pada sebelah timur berbatasan menggunakan Kabupaten Badung, di sebelah selatan dibatasi oleh samudera Hindia, serta pada sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana yang dibatasi oleh Tukad Yeh Let. Secara

<sup>73</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Bali> (diakses pada 4 November 2021).

<sup>74</sup><https://denpasarikota.bps.go.id/> (diakses pada 4 November 2021).

administratif daerah Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 kecamatan serta 133 desa. Dengan jumlah penduduk sebanyak 466.647 jiwa.<sup>75</sup>

### 3. Klungkung

Kabupaten Klungkung secara geografis terletak antara 08°27'37" 08°49'00"LS dan 115°21'28" - 115°37'28"BT dan berada pada ketinggian 93m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Klungkung adalah 315 km<sup>2</sup>, dimana di antaranya berbatasan dengan Kabupaten Bangli di sebelah utara, Kabupaten Karangasem di sebelah timur, Kabupaten Gianyar di sebelah barat dan Klungkung di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Secara administratif, Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 kecamatan, 6 desa kota, dan 53 desa, dengan jumlah penduduk sekitar 359.237 jiwa.<sup>76</sup>

### 4. Karangasem

Kabupaten Karangasem secara geografis terletak antara 08°33'07" 06°10'00" LS dan 115°23'22"115°42'37" BT, dengan ketinggian 102m di atas permukaan laut. Kabupaten Karangasem meliputi wilayah seluas 839,54 km<sup>2</sup>, dimana Kabupaten Karangasem di sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok, Samudera Hindia di sebelah selatan, di sebelah barat dengan Buleleng, Bangli, Kabupaten Buleleng dan Laut Jawa di sebelah utara. Memiliki dua pelabuhan yaitu Padang Bai dan Tanah Ampo. Di kawasan ini juga terdapat pura terbesar di Bali yaitu Pura Besakih. Secara administratif Kabupaten Karangasem terbagi menjadi 8

<sup>75</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tabanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tabanan) (diakses pada 4 November 2021).

<sup>76</sup><https://klungkungkab.go.id/halaman/detail/kondisi-kependudukan-klungkung> (diakses pada 4 November 2021).

kecamatan, 3 kecamatan dan 75 desa. Dengan jumlah penduduk sekitar 434.563 jiwa.<sup>77</sup>

#### 5. Jembrana

Kabupaten Jembrana secara geografis terletak antara 08°09`58" 08°28`02 Lintang Selatan dan 114°26`28" 115°51`28" Bujur Timur dengan ketinggian sampai 12 mdpl. seluas 841,80 Km<sup>2</sup> diantaranya berbatasan dengan Bupati Tabanan di sebelah timur, Bupati Buleleng di sebelah utara, Selat Bali di sebelah barat dan India. kecamatan, 10 kecamatan dan 41 desa dengan jumlah penduduk sekitar 329.506 jiwa.<sup>78</sup>

#### 6. Gianyar

Kabupaten Gianyar merupakan pusat budaya ukiran di Bali, secara geografis terletak antara 08°18`48"-08°38`58"LS dan 115°13`29"-115°22`23"BT, dengan ketinggian 126 dpl. Kabupaten Gianyar meliputi wilayah seluas 368 km<sup>2</sup> di antaranya berbatasan dengan Kota Denpasar di sebelah barat daya, Kabupaten Badung di sebelah barat, Kabupaten Bangli di sebelah timur dan Kabupaten Klungkung di sebelah tenggara. Secara administratif Kabupaten Gianyar terdiri dari 7 kecamatan, 6 kelurahan dan 64 kota dengan jumlah penduduk sekitar 512.200 jiwa.<sup>79</sup>

#### 7. Buleleng

Secara geografis Kabupaten Buleleng terletak antara 08°03`40"-08°23`00" LS dan 115°25`55"- 115°27`28" BT, 60m di atas permukaan

<sup>77</sup><http://www.karangasembkab.go.id/> (diakses pada 4 November 2021).

<sup>78</sup><http://www.karangasembkab.go.id/> (diakses pada 4 November 2021).

<sup>79</sup><https://gianyarkab.bps.go.id/subject/12/kependudukan> (diakses pada 4 November 2021).

laut. Kabupaten Buleleng meliputi wilayah seluas 1.365,88 km<sup>2</sup>, berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Bali di sebelah barat, Kabupaten Karangasem, Gembrana, Kabupaten Bangli di sebelah timur, serta kabupaten Tabanan dan Badung di selatan. Buleleng juga menjadi Produsen pertanian terbesar di Bali (populer dengan produksi salak bali dan jeruk keprok Tejakula), Kabupaten Buleleng juga mempunyai objek pariwisata yang banyak seperti pantai Lovina, pura Pulaki, Air Sanih dan tentunya kota Singaraja itu sendiri. Secara administratif, kecamatan Buleleng terbagi menjadi 9 kabupaten, 19 kabupaten, dan 129 desa dengan jumlah penduduk sekitar 826,499 jiwa.<sup>80</sup>

#### 8. Bangli

Kabupaten Bangli merupakan salah satu Kabupaten di Bali yang tidak memiliki wilayah pesisir dengan letak geografisnya antara 08°08'30"-08°31'07" LS dan 115°13'43" - 115°27'24" BT dengan ketinggian 100-2.152 mdpl, sebelah selatan dataran dan sebelah utara terdapat pegunungan yaitu Puncak Tulis dan Gunung Batur dengan kawah.

<sup>81</sup>Kabupaten Bangli memiliki luas wilayah 520, 81 Km<sup>2</sup> yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karangasem, di sebelah selatan dengan Kabupaten Klungkung, di sebelah barat dengan Kabupaten Gianyar dan

<sup>80</sup><http://permata.bulelengkab.go.id/d-data/kependudukan/> (diakses pada 4 November 2021).

<sup>81</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bangli](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bangli) (diakses pada 4 November 2021).

Kabupaten Badung. Kabupaten Bangli terbagi menjadi 4 kecamatan dan 72 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 254.738 jiwa.<sup>82</sup>

#### 9. Badung

Kabupaten Badung secara geografis terletak antara 08°14'30"-08°38'07' LS dan 114°59'00"-115°02'57" BT pada ketinggian 25m dari ketinggian tempat. Kabupaten Badung memiliki luas wilayah 418,52 km<sup>2</sup> dimana berbatasan langsung dengan Kabupaten Buleleng di utara, Kabupaten Tabanan di barat dan Bangli, Gianyar serta Kota Denpasar di timur. Secara administratif, Kabupaten Badung terbagi menjadi 6. kecamatan, 16 kecamatan dan 46 desa dengan jumlah penduduk sekitar 548.191 jiwa.<sup>83</sup>

### B. Penyajian Data

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah provinsi Bali yang diperoleh dari katalog Badan Pusat Statistik yang berasal dari website resmi BPS Bali. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kab/Kota di provinsi Bali periode Tahun 2016-2019 mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah (BD).

<sup>82</sup> [www.dukcapil.kemendagri.go.id](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id). (diakses pada 4 November 2021).

<sup>83</sup> <https://badungkab.bps.go.id/> (diakses pada 4 November 2021).



Tabel 3. 1

**Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Daerah  
Provinsi Bali Periode 2016-2019 (Dalam Ribu Rupiah)**

No	PROVINSI – TAHUN	PAD	DAU	BD
1	Jembrana - 2016	Rp 114.533.487	Rp 562.525.134	Rp 1.128.489.214
2	Jembrana - 2017	Rp 121.342.475	Rp 552.643.378	Rp 1.038.782.384
3	Jembrana - 2018	Rp 126.477.267	Rp 552.328.680	Rp 1.217.106.320
4	Jembrana - 2019	Rp 133.698.784	Rp 573.014.113	Rp 1.158.591.599
5	Tabanan - 2016	Rp 318.083.799	Rp 826.283.780	Rp 1.873.464.986
6	Tabanan - 2017	Rp 426.635.751	Rp 811.768.631	Rp 1.861.962.380
7	Tabanan - 2018	Rp 363.370.469	Rp 811.768.631	Rp 1.909.975.376
8	Tabanan - 2019	Rp 354.558.239	Rp 847.281.658	Rp 1.926.055.006
9	Badung - 2016	Rp 3.563.589.483	Rp 336.243.365	Rp 4.162.119.988
10	Badung - 2017	Rp 4.172.457.396	Rp 330.336.650	Rp 5.413.936.423
11	Badung - 2018	Rp 4.555.716.407	Rp 330.336.650	Rp 5.799.584.400
12	Badung - 2019	Rp 4.835.188.460	Rp 361.230.411	Rp 5.733.782.645
13	Gianyar - 2016	Rp 529.864.618	Rp 705.975.450	Rp 1.786.411.745
14	Gianyar - 2017	Rp 662.753.475	Rp 693.573.732	Rp 1.922.948.830
15	Gianyar - 2018	Rp 770.204.849	Rp 693.573.732	Rp 2.046.852.685
16	Gianyar - 2019	Rp 997.478.368	Rp 716.521.199	Rp 2.228.232.094
17	Klungkung - 2016	Rp 134.142.054	Rp 539.855.201	Rp 971.294.294
18	Klungkung - 2017	Rp 153.210.776	Rp 530.371.681	Rp 1.131.544.237
19	Klungkung - 2018	Rp 186.974.284	Rp 530.371.681	Rp 1.146.817.490
20	Klungkung - 2019	Rp 225.063.772	Rp 564.462.148	Rp 1.195.465.144
21	Bangli - 2016	Rp 104.829.402	Rp 568.278.943	Rp 1.089.450.148
22	Bangli - 2017	Rp 104.592.348	Rp 558.296.101	Rp 1.021.996.019
23	Bangli - 2018	Rp 122.686.254	Rp 559.422.439	Rp 1.171.071.638
24	Bangli - 2019	Rp 127.040.436	Rp 584.470.785	Rp 1.161.031.649
25	Karangasem - 2016	Rp 232.644.013	Rp 732.963.859	Rp 1.450.662.759
26	Karangasem - 2017	Rp 198.575.057	Rp 722.184.384	Rp 1.506.221.683
27	Karangasem - 2018	Rp 200.361.247	Rp 729.378.991	Rp 1.480.600.621
28	Karangasem - 2019	Rp 233.013.033	Rp 795.849.744	Rp 1.654.068.655
29	Buleleng - 2016	Rp 282.113.900	Rp 982.698.080	Rp 2.200.205.551
30	Buleleng - 2017	Rp 455.195.426	Rp 965.435.235	Rp 2.122.121.858
31	Buleleng - 2018	Rp 335.555.494	Rp 965.435.235	Rp 2.064.477.377
32	Buleleng - 2019	Rp 365.595.301	Rp 1.028.451.956	Rp 2.284.243.845
33	Denpasar - 2016	Rp 805.050.192	Rp 661.794.756	Rp 1.871.440.897
34	Denpasar - 2017	Rp 1.008.710.712	Rp 650.169.150	Rp 1.967.311.319
35	Denpasar - 2018	Rp 940.110.335	Rp 650.169.150	Rp 2.098.037.222
36	Denpasar - 2019	Rp 1.010.779.481	Rp 677.033.111	Rp 2.255.312.789

Sumber : data diolah dari BPS Provinsi Bali

Pada tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa PAD terendah ditunjukkan oleh Kabupaten Bangli tahun 2017 sebesar Rp. 104,592,348 sedangkan PAD terbesar diperoleh Kabupaten Badung pada Tahun 2019 sebesar Rp. 4,835,188,460. Sedangkan untuk DAU terendah ditunjukkan oleh Kabupaten Badung pada tahun 2018-2019 sebesar Rp. 330,336,650 dan DAU terbesar oleh Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 sebesar Rp. 1,028,451,956. Untuk belanja terendah pada kabupaten/kota di provinsi Bali ditunjukkan oleh Kabupaten Klungkung pada tahun 2016 sebesar Rp. 971,294,294 sedangkan belanja daerah terbesar diperoleh pada tahun 2018 oleh Kabupaten Badung sebesar Rp. 5,799,584,400.

### **C. Analisis dan Pengujian Hipotesis**

#### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif menggambarkan secara menyeluruh dari setiap variabel-variabel yang diteliti. Digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti, melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum dari data tersebut. Variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan melalui statistik deskriptif, dengan melihat nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean* dan nilai standar deviasi). Adapun variabel yang dideskripsikan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan variabel dependen

yakni Belanja Daerah. Berikut ini merupakan tabel penjelasan mengenai hasil analisis deskriptif keseluruhan variabel selama tahun 2016-2019.

**Tabel 3. 2**  
**Hasil Uji Descriptive Statistics**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	36	104,592,348	4,835,188,460	813,116,579.00	1,285,341,840.000
DAU	36	330,336,650	1,028,451,956	658,402,717.30	178,809,661.500
BD	36	971,294,294	5,799,584,400	2,029,213,091.00	1,257,746,514.000
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Hasil olahan data spss (Terlampir)

Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan jumlah observasi (N) dari penelitian ini sebanyak 36 observasi. Pada variabel *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar Rp. 104,592,348 diperoleh dari Kabupaten Bangli tahun 2017 sedangkan nilai maksimum sebesar Rp. 4,835,188,460 dihasilkan oleh Kabupaten Badung pada Tahun 2019. Nilai mean atau rata-rata PAD yaitu sebesar Rp. 813,116,579.00 dan untuk standar deviasinya (standard deviation) sebesar Rp. 1,285,341,840.000.

Pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar Rp. 330,336,650 diperoleh dari Kabupaten Badung pada tahun 2018-2019 sedangkan nilai maksimum sebesar Rp. 1,028,451,956 diperoleh dari Kabupaten Buleleng pada tahun 2019. Nilai mean atau rata-rata DAU sebesar Rp. 658,402,717.30 dan untuk standar deviasinya sebesar Rp. 178,809,661.500.

Pada variabel Belanja Daerah (BD) menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar Rp. 971,294,294 diperoleh dari Kabupaten Klungkung pada tahun 2016 sedangkan nilai maksimum BD sebesar Rp. 5,799,584,400 dari Kabupaten Badung pada tahun 2018. Untuk nilai mean atau rata-rata BD sebesar Rp. 2,029,213,091.00 dan untuk standar deviasinya sebesar Rp. 1,257,746,514.000.

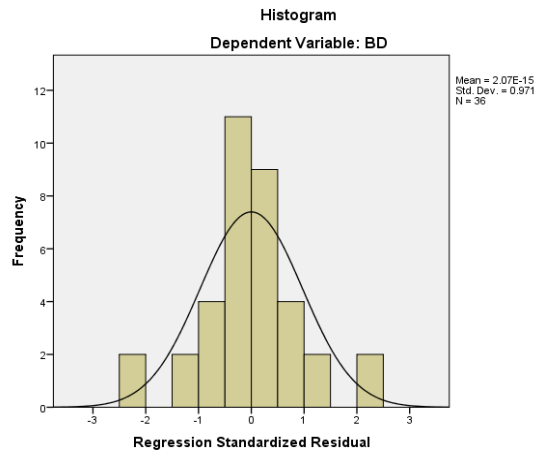
## **2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis, dimana uji ini untuk mengetahui apakah data telah memenuhi asumsi-asumsi dasar serta memastikan bahwa data yang dihasilkan terdistribusi normal. Diperlukannya uji ini adalah untuk menghindari estimasi yang bias. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian adalah :

### **a) Uji Normalitas**

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah data-data dalam variabel pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak. Untuk menganalisis data yang akan diuji yaitu dengan analisis Grafik.

**Gambar 3. 1**  
**Uji Normalitas Histogram**



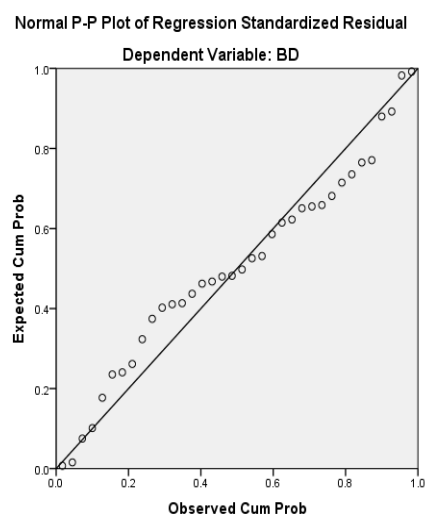
Sumber : Hasil olahan data SPSS (Terlampir)

Dari hasil output histogram diatas terlihat bahwa kurva dependen dan *regression standardized residual* membentuk gambar lonceng jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

**Gambar 3. 2**

**Uji Normalitas**

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



Sumber : Hasil olahan data SPSS (Terlampir)

Berdasarkan tampilan Normal P-P *Plot Regression Standardized* terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah grafik diagonal, maka data-data tersebut terdistribusi normal.

#### b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Variance Inflation Faktor* (VIF) dengan nilai *tolerance* dapat dilakukan tidak ada gejala multikolonieritas, jika VIF < 10 dan Nilai Tolerance > 0,10. Berikut adalah hasil pengujian multikolinieritas :

**Tabel 3. 3**  
**Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.365		
	PAD	.000	.660	1.516
	DAU	.000	.660	1.516

a. Dependent Variable: BD

Sumber : Hasil olahan data SPSS (Terlampir)

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas diatas menunjukkan bahwa nilai VIF variabel PAD (X1) senilai 1,516 nilai *tolerance* sebesar 0,660. Variabel DAU (X2) memilik VIF sebesar 1,516 dan

nilai *tolerance* sebesar 0,660. Semua variabel tersebut nilai VIF kurang dari 10 dengan *tolerance* diatas 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari asumsi multikolinearitas.

### c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.<sup>84</sup> Uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati *scatterplot* dimana sumbu horizontal menggambarkan *nilai predicated standardized*. Jika *scatterplot* membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. *Scatterplot* dapat diamati dimana variabel bebas sebagai sumbu horizontal dan nilai residual kuadratnya sebagai sumbu vertikal.<sup>85</sup> Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 24 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

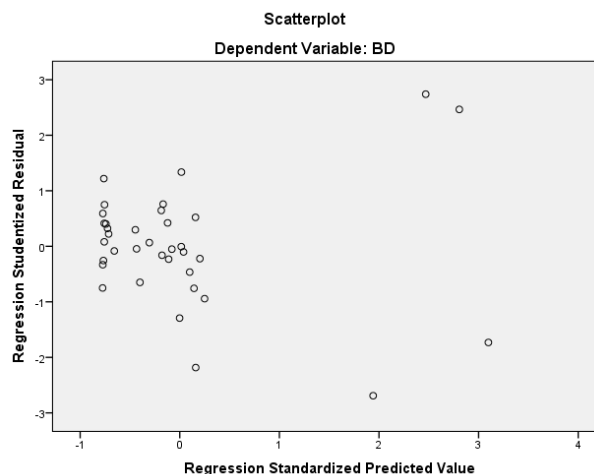
---

<sup>84</sup>Aminatus Zahriah, *Diklat Pengajaran Aplikasi Komputer Statistik (Teori dan Aplikasi dengan SPSS 22)*, (Jember : 2018), 78.

<sup>85</sup>Suliyanto, *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS* (Yogyakarta : ANDI, 2011), 95.



**Gambar 3.3**  
**Uji Heteroskedastisitas**  
**Scatterplot**



Sumber : Hasil olahan data SPSS (Terlampir)

Berdasarkan grafik *Scatterplot* diatas, dapat dilihat bahwa titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul pada satu tempat. Hal ini membuktikan tidak terjadi heterokedastisitas pada data dan sudah memenuhi uji asumsi klasik.

#### d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Untuk data *time series* autokorelasi sering terjadi, akan tetapi untuk data yang sampelnya *crosssection* jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan yang lain.

Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai  $d_w$  dengan  $d_1$  dan  $d_u$  sebagai berikut:

1.  $D_u < d_w < 4-d_u$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya tidak terjadi autokorelasi
2.  $D_w < d_l$  atau  $d_w > 4-d_l$ , maka  $H_a$  ditolak, artinya terjadi autokorelasi
3.  $D_l < d_w < d_u$  atau  $4-d_u < d_w < 4-d_l$ , artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 4**

**Uji Durbin – Watson**

Ada autokorelasi positif	Tidak dapat diputuskan	Tidak ada autokorelasi 	Tidak dapat diputuskan	Ada autokorelasi negatif
0	d <sub>l</sub>	d <sub>u</sub>	2	4-d <sub>l</sub>
			4-d <sub>u</sub>	4

**Tabel 3. 5**

**Uji Autokorelasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.996 <sup>a</sup>	.991	.991	121,783,329.100	2.114
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD					
b. Dependent Variable: BD					

Sumber : hasil olahan data SPSS (Terlampir)

Berdasarkan pada output model summary terdapat nilai Durbin-Watson sebesar 2.114. Pengambilan keputusan pada asumsi ini memerlukan dua nilai bantu yang diperoleh dari tabel Durbin-Watson, yaitu nilai d<sub>L</sub> dan d<sub>U</sub>, dengan n= jumlah sampel, K = jumlah variabel bebas (independent). Pada penelitian ini nilai n = 36, K = 2, berdasarkan uji autokorelasi diatas, maka diketahui bahwa :

Dw	Dl	Du	4-Dl	4-Du
2.114	1.3537	1.5872	2.6463	2.4128

Kesimpulannya,  $Du (1.5872) < Dw (2.114) < 4-Du (4-1.5872 = 2.4128)$ . Sehingga, dalam model persamaan regresi ini tidak terjadi masalah autokorelasi.

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Penelitian ini menguji hipotesis pengaruh PAD, dan DAU, terhadap belanja daerah. Adapun persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini iyalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = alokasi belanja daerah

$\alpha$  = Konstanta

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah

$X_2$  = Dana Alokasi Umum

e = Standar eror

Hasil dari analisis regresi berganda dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 24 pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 6**  
**Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-96902052.580	105468999.300		-.919	.365
	PAD	1.103	.020	1.127	55.919	.000
	DAU	1.867	.142	.265	13.175	.000

Sumber : Hasil olahan data SPSS (Terlampir)

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = -96.902.052.580 + 1.103 \text{ PAD} + 1.867 \text{ DAU} + e$$

a) Konstanta ( $\alpha$ ) = -96902052.580

Nilai konstanta dari persamaan diatas adalah sebesar -96902052.580 yang menunjukkan bahwa apabila variabel PAD dan DAU dianggap konstan, maka besarnya nilai belanja daerah akan turun sebesar -96902052.580.

b) Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 1.103

Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah adalah positif. Jika PAD dinaikan satu satuan PAD maka akan terjadi peningkatan pada Belanja Daerah sebesar 1.103. Koefisien yang mempunyai nilai positif berarti terjadi hubungan positif antara PAD dan Belanja Daerah.

c) Koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) = 1.867

Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah adalah positif. Jika DAU dinaikkan satu satuan DAU maka akan terjadi peningkatan pada Belanja Daerah sebesar 1.867. Koefisien yang mempunyai

nilai positif berarti terjadi hubungan positif antara DAU dan Belanja Daerah.

d) Standar Error (e)

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji t (Parsial)

Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika probabilitas  $< 0,05$  atau  $t$  hitung  $> t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila probabilitas  $> 0,05$  atau  $t$  hitung  $< t$  tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. Uji hipotesis secara parsial dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3. 7**  
**Uji t (Parsial)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-96902052.580	105468999.300		-.919	.365
	PAD	1.103	.020	1.127	55.919	.000
	DAU	1.867	.142	.265	13.175	.000

Sumber : Hasil olahan data spss (Terlampir)

Analisis Uji t :

1. Pengaruh DAU terhadap Belanja daerah Pemerintah Provinsi Bali periode 2016-2019.

Hipotesis:

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap belanja daerah Pemerintah Provinsi Bali periode 2016-2019.

$H_1$  : Terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap belanja daerah Pemerintah Provinsi Bali periode 2016-2019.

Berdasarkan hasil output diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel PAD ( $X_1$ ) adalah sebesar  $0.000 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $55.919 > 2.03452$ , maka dapat disimpulkan bahwa bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya, ada pengaruh signifikan PAD ( $X_1$ ) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali periode 2016-2019.

2. Pengaruh DAU terhadap Belanja daerah Pemerintah Provinsi Bali periode 2016-2019.

Hipotesis:

$H_0$  : Tidak terdapat terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap belanja daerah Pemerintah Provinsi Bali periode 2016-2019.

$H_2$  : Terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap belanja daerah Pemerintah Provinsi Bali periode 2016-2019.

Berdasarkan hasil output diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel DAU ( $X_2$ ) adalah sebesar  $0.000 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $13.175 > 2.03452$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Artinya, DAU ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali periode 2016-2019.

### b. Uji F (Simultan)

Pengujian secara simultan atau uji F digunakan untuk menguji variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  atau  $F \text{ hitung} > F$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi  $> 0,05$  dan  $F \text{ hitung} < F$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. Uji hipotesis secara simultan dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3. 8**

### Uji F (Simultan)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	54877991330000000 000.000	2	274389956600000 02000.000	1850.089	.000 <sup>b</sup>
	Residual	48942891490000000 0.000	33	148311792400000 00.000		
	Total	55367420240000000 000.000	35			
a. Dependent Variable: BD						
b. Predictors: (Constant), DAU, PAD						

Sumber : Hasil olahan data spss (Terlampir)



Dengan hipotesis:

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (PAD, DAU) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali secara simultan.

$H_3$  : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (PAD, DAU) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali secara simultan.

Berdasarkan hasil output diatas, diketahui nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0.05$  dan nilai  $F_{hitung} 1850.089 > F_{tabel} 4.14 F_{tabel}$  , maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima dengan kata lain semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali Periode 2016-2019 secara simultan.

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam penelitian menerangkan variabel dependen.

Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 9**

#### **Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.996 <sup>a</sup>	.991	.991	121,783,329.100
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD				
b. Dependent Variable: BD				

Sumber : Hasil olahan data spss (Terlampir)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dari kebutuhan variabel memperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0.991, yang memiliki arti bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja daerah sebesar 99,1 %. Sedangkan untuk sisanya sebesar 0,9 % dijelaskan oleh variabel lain atau faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah diperoleh hasil sebagai berikut :

##### **1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah**

Teori keagenan terdapat pada organisasi masyarakat, kelompok masa maupun pemerintahan daerah. Dimana pemerintah daerah (Bupati) disini berperan sebagai agen dan prinsipalnya adalah masyarakat yang diproyeksikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam teori keagenan dapat dilihat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui (DPRD) untuk membuat kebijakan dan mengesahkan anggaran demi meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan otonomi daerah. Suatu wilayah yang terdapat kenaikan pertumbuhan ekonomi positif kemungkinan adanya peningkatan PAD

yang merupakan salah satu akses yang baik terhadap Produk Domestik Regional Bruto.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dimana pada hipotesis pertama menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Bali periode 2016-2019”, terbukti dengan adanya pengaruh dari PAD terhadap Belanja Daerah. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi (Sig) variabel PAD ( $X_1$ ) adalah sebesar  $0.000 < 0,05$  dan nilai  $t$  hitung  $55.919 > t$  tabel  $2.03452$  dan dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor yang penting terhadap Belanja Daerah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dessy Tri Wulansari pada tahun 2015 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.<sup>87</sup> Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus terus dipacu pertumbuhannya. Hal ini membuktikan bahwa besar atau kecilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Apabila pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah baik dengan diikuti peningkatan PAD tentu belanja daerah pada kab/kota pada daerah tersebut juga akan bertambah. Sehingga besaran dana yang akan disalurkan oleh pemerintah daerah dapat terdistribusi dengan baik dan sesuai dengan

---

<sup>86</sup><https://dspace.uii.ac.id/> (diakses pada 30 Desember 2021).

<sup>87</sup>Dessy Tri Wulansari, Skripsi : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2012-2013)”. (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

kebutuhan masing-masing daerah. Dengan demikian hipotesis pertama dapat diterima.

## 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dalam teori keagenan dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah dilihat dari hubungan antara pemerintah pusat (Presiden/Wakil Presiden, menteri) berperan sebagai prinsipal dan pemerintah otonom (Provinsi, Kabupaten/Kota) sebagai agent. Dimana pemerintah pusat memberi tanggungjawab melalui otonomi daerah untuk sumberdaya alamnya dan pemanfaatan pendapatan asli daerah yang lain demi terlaksananya desentralisasi. Tinggi rendahnya kenaikan pertumbuhan ekonomi ditentukan berdasarkan tingkat pencapaian dan pertanggungjawaban dari pusat ke daerah. Agency Theory telah menjelaskan dimana pemerintah otonom (Provinsi, Kabupaten/Kota) selaku kepala pemerintahan atau agen, wajib mengurus warganya dan tugasnya mengurangi kesenjangan antara masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik melalui dana alokasi umum.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dimana pada hipotesis kedua menyatakan bahwa “ Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Bali periode 2016-2019”, terbukti dengan adanya pengaruh dari DAU terhadap Belanja Daerah. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi

---

<sup>88</sup><https://dspace.uin.ac.id/> (diakses pada tanggal 30 Desember 2021)

(Sig) variabel DAU ( $X_2$ ) sebesar  $0.000 < 0,05$  dan nilai F hitung 13.175  $> 4.14$  F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima. Tentu saja hal ini didukung dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono yang dilaksanakan pada tahun 2019 menunjukkan Dana Alokasi Umum berpengaruh pada Belanja Daerah,<sup>89</sup> yang mana artinya dengan peningkatan Dana Alokasi Umum maka akan sejalan dengan meningkatnya jumlah Belanja Daerah.

### **3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah**

Dalam teori keagenan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah dilihat dari hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau legislatif bertindak sebagai pihak prinsipal, sedangkan eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah daerah (Bupati) yang bertindak sebagai pihak agen. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah disetujui dan disahkan serta sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dijadikan kontrol oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau legislatif dalam mengawasi dan meninjau kinerja pemerintah daerah. Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan

---

<sup>89</sup>Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah", *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol.22 No.2 (Juli, 2019).

bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.<sup>90</sup>

Dengan menggunakan uji statistik F dapat diketahui pengaruh dari seluruh variabel independen yakni PAD dan DAU terhadap variabel dependen yakni Belanja Daerah, membuktikan bahwa secara bersamaan kedua variabel independen berpengaruh positif dan memperoleh hasil untuk  $F_{hitung}$  1850.089 lebih besar daripada  $F_{tabel}$  4.14 dengan signifikansi sebesar 0.000 yang mana nilainya jauh dibawah taraf signifikansi 0.05 yang berarti  $H_0$  ditolak sedangkan  $H_3$  diterima dengan kata lain semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali Periode 2016-2019. Tentu saja hal ini didukung dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar pada tahun 2017.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Abdul Halim dan Syukri Abdullah, "Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi", *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2 No.1 (2006), Hal : 53-64.

<sup>91</sup> Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah kota Bandung", *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol.1 No.1 (Juni, 2017).

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dengan judul **“Pengaruh Pendapatan asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2016-2019”** maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk hasil pengujian secara parsial pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada kab/kota di provinsi Bali memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dengan nilai  $T_{hitung} > T_{tabel}$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dinyatakan diterima. Artinya, variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah pada kab/kota di provinsi Bali periode tahun 2016-2019.
2. Untuk hasil pengujian secara parsial pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada kab/kota di provinsi Bali memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dengan nilai  $T_{hitung} > T_{tabel}$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan dana alokasi umum terhadap belanja daerah dinyatakan diterima. Artinya, variabel dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah pada kab/kota di provinsi Bali periode tahun 2016-2019.



3. Sedangkan untuk hasil pengujian secara simultan dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) dan dana alokasi umum ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang menyatakan adanya pengaruh signifikan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada kab/kota di provinsi Bali periode tahun 2016-2019.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis iyalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah diharapkan lebih teliti untuk mengelola Belanja Daerah dengan lebih baik sehingga penyerapan Belanja Daerah dapat direalisasikan secara optimal lagi kedepannya dalam bentuk pengadaan pelayanan masyarakat maupun yang lainnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen berbeda yang akan mempengaruhi Belanja Daerah dan dapat melakukan penelitian dalam rentang waktu yang lebih panjang dengan populasi yang lebih luas.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengklasifikasikan komponen pembagian belanja daerah langsung ataupun belanja daerah tidak langsung dan menambahkan analisis flypaper effect.

## DAFTAR PUSTAKA

### Alqur'an Al-Karim

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Jumanatul Ali, 2005.

### Buku

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4: Jakarta.

Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga

Mundir. 2014. *Statistik Pendidikan*. Jember: STAIN-Press Jember.

Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nordiawan, Deddi dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat

Ridwan, dan Sunarto. 2014. *Pengantar Statistika Untuk Peneitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan – Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.

Tim Penyusun IAIN Jember. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia.

Yani, Ahad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindi Persada

### Jurnal dan Skripsi

- Elisabet. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Skripsi, Universitas Sanata Dharma.
- Fatimah, Nur Nabiyatun, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*. Vol.21, No.1.
- Ferdiansyah, Irfan, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattisahusiwa. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*. Vol.14, No.1
- Halim, Abdul dan Syukri Abdullah. 2006. “Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi”, *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Pratiwi, Novi. 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Skripsi, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Putra, Ida Bagus Dwi dan A. A. N. B. Dwirandra. 2015. Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Rahmalia, Rizka. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2017 (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan). Skripsi, Universitas Sriwijaya.
- Rinaldi, Abel. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi, Universitas Muhamadiyah Palembang.
- Suryani, Febdwi dan Eka Pariani. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*. Vol.6, No.1.
- Siswanto, Dodik Kusnandar. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Penelitian Universitas Indonesia*.

Sorongan. Analisis Hubungan DAU, PAD dan Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol.1, No.3.

Suarjana, Anak Agung Gede Mantra dan Nyoman Indah Kusuma. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol.14, No.2.

Wati, Rahma Masayu, dan Catur Martian Fajar. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*. Vol.1, No.1.

Wulansari, Tri Dessy. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2012-2013). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yudi, Gede Desak, Atika Sari Putu Kepramareni, dan Ni Luh Gede Novitasari. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Bali. *Jurnal Krisna : Kumpulan Riset Akuntansi*. Vol.19, No.1.

Yunita, Venny Putu, dan Ni ketut Rasmini. 2020. Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan. Vol.30, No.4.

### Website

<https://badungkab.bps.go.id/> .

<https://bali.bps.go.id/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-se-provinsi-bali-2015-2019.html>.

<https://bali.bps.go.id/publication/download>.

<https://denpasarkota.bps.go.id/>.

[www.dukcapil.kemendagri.go.id](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id).

<https://dspace.uui.ac.id/>.

<https://gianyarkab.bps.go.id/subject/12/kependudukan>.

<https://klungkungkab.go.id/halaman/detail/kondisi-kependudukan-klungkung>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/bali>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten\\_tabanan.](https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_tabanan)

[https://peraturan.bpk.go.id/pp-no-12-tahun-2019.](https://peraturan.bpk.go.id/pp-no-12-tahun-2019)

[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004.](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004)

[http://permata.bulelengkab.go.id/d-data/kependudukan/.](http://permata.bulelengkab.go.id/d-data/kependudukan/)

[http://www.djpk.kemenkeu.go.id.](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

[https://www.gotravelaindonesia.com/informasi-umum-tentang-bali/.](https://www.gotravelaindonesia.com/informasi-umum-tentang-bali/)

[http://www.karangasemkab.go.id/.](http://www.karangasemkab.go.id/)

### **Sumber lainnya**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemeritah Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan atara Pemerintah Pusat dengan daerah.

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**



## Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

### Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfita Aprilia Zahrotunisa  
Nim : E20173026  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : UIN KH ACHMAD SIDDIQ Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya dari saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dicantumkan dari sumbernya.

Jember, 03 Desember 2021  
Yang menyatakan



**Alfita Aprilia Zahrotunisa**  
Nim.E20173026



## Surat Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos: 68136  
Website : [www.http://febi.iain-jember.ac.id](http://febi.iain-jember.ac.id) e-mail : [febi.iainjbr@gmail.com](mailto:febi.iainjbr@gmail.com)

Nomor : B-364/In.2017.a/PP.00.9/06/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

08 Juni 2021

Yth. Kepala Laboratorium FEBI IAIN Jember  
Jl. Mataram No.1 Mangli

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Alfita Aprilia Zahrotunisa  
NIM : E20173026  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Kab/Kota di Provinsi Bali" di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Wakil Dekan  
Dekan Bidang Akademik,

Rokhim

## Surat Ijin Selesai Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>

Nomor	: B-723/UIN.20/7.a/PP.00.9/12/2021	09 Desember 2021
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Permohonan Ijin Selesai Penelitian	

Yth. Kepala Badan Pusat Statistik Bali  
 Jl. Raya Puputan No.1, Renon-Denpasar

Disampaikan dengan hormat bahwa, dengan ini mahasiswa berikut :

Nama	:	Alfita Aprilia Zahrotunisa
NIM	:	E20173026
Semester	:	IX (Sembilan)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Prodi	:	Akuntansi Syariah

Telah selesai melakukan penelitian dengan pengambilan data sekunder dari website Badan Pusat Statistik Bali selama tanggal 09 Juni-19 Juli 2021 dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademi

  
**Nurul Widyawati Islami Rahayu**

KH

Q

JEMBER

### Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Rumusan Masalah	Sumber Data	Metode Penelitian	Hipotesis
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Bali periode 2016-2019	<p>1. Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Dana Alokasi Umum</li> </ul> <p>2. Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Daerah</li> </ul>	<p>1. Pendapatan Asli Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ pajak daerah</li> <li>➢ retribusi daerah</li> <li>➢ hasil perusahaan milik daerah</li> <li>➢ hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</li> <li>➢ PAD yang sah</li> </ul> <p>2. Dana Alokasi Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ celah fiskal</li> <li>➢ alokasi dasar</li> </ul> <p>3. Belanja Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ belanja langsung</li> <li>➢ belanja tidak langsung</li> </ul>	<p>1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali ?</p> <p>2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?</p> <p>3. apakah terdapat pengaruh simultan PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data sekunder Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali tahun 2016-2019.</li> </ul>	<p>1. Jenis penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> </ul> <p>2. Populasi dan sampel :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan sampel menggunakan <i>Sampling Jenuh</i></li> </ul> <p>3. Pengumpulan data :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Data sekunder</li> </ul> <p>4. Analisis data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistik Deskriptif</li> <li>• Uji Asumsi Klasik</li> <li>• Uji Hipotesis</li> <li>• Analisis Regresi Linier Berganda</li> </ul>	<p>1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah</p> <p>2. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah</p> <p>3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.</p>

### Jurnal Kegiatan Penelitian

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	08 Juni 2021	Menyerahkan surat ijin penelitian	
2	12 Juni 2021	Mencari data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota provinsi Bali Periode 2016-2019	
3	13 Juni 2021	Mencari data Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten/Kota provinsi Bali Periode 2016-2019	
4	14 Juni 2021	Mencari data Belanja Daerah Daerah Kabupaten/Kota provinsi Bali Periode 2016-2019	
5	16 Juni 2021	Mengunduh laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota provinsi Bali Periode 2016-2019 yang sudah di dapat	
6	17 Juni 2021	Mengunduh laporan Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten/Kota provinsi Bali Periode 2016-2019	
7	18 Juni 2021	Mengunduh laporan Belanja Daerah Daerah Kabupaten/Kota provinsi Bali Periode 2016-2019	
8	22 Juli 2021	Mengelola laporan keuangan yang sudah di dapat dari website BPS Bali	
9	16 November 2021	Meminta surat ijin selesai penelitian	
10	09 Desember 2021	Mendapatkan surat ijin selesai penelitian	

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### Laporan Realisasi PAD

No	Daerah	Pad			
		2016	2017	2018	2019
1	Kab. Jembrana	114,533,487	121,342,475	126,477,267	133,698,784
2	Kab. Tabanan	318,083,799	426,635,751	363,370,469	354,558,239
3	Kab. Badung	3,563,589,483	4,172,457,396	4,555,716,407	4,835,188,460
4	Kab. Gianyar	529,864,618	662,753,475	770,204,849	997,478,368
5	Kab. Klungkung	134,142,054	153,210,776	186,974,284	225,063,772
6	Kab. Bangli	104,829,402	104,592,348	122,686,254	127,040,436
7	Kab. Karangasem	232,644,013	198,575,057	200,361,247	233,013,033
8	Kab. Buleleng	282,113,900	455,195,426	335,555,494	365,595,301
9	Kab. Denpasar	807,050,192	1,008,710,712	940,110,335	1,010,779,481

### Laporan Realisasi DAU

No	Daerah	DAU			
		2016	2017	2018	2019
1	Kab. Jembrana	562,525,134	552,643,376	552,328,680	573,014,113
2	Kab. Tabanan	826,283,780	811,768,631	811,768,631	847,281,65
3	Kab. Badung	336,243,365	330,336,650	330,336,650	361,230,411
4	Kab. Gianyar	705,975,450	693,573,732	693,573,732	716,521,199
5	Kab. Klungkung	39,855,201	530,371,681	530,371,681	564,462,148
6	Kab. Bangli	568,278,943	558,296,101	559,422,439	584,470,785
7	Kab. Karangasem	732,963,859	722,184,384	729,378,991	795,849,744
8	Kab. Buleleng	982,698,080	965,435,235	965,435,235	1,028,451,956
9	Kota Denpasar	661,794,756	650,169,150	650,169,150	677,033,111

## Laporan Realisasi Belanja Daerah

No	Daerah	Belanja Daerah			
		2016	2017	2018	2019
1	Kab. Jembrana	1,128,489,214	1,038,782,384	1,217,106,320	1,158,591,599
2	Kab. Tabanan	1,873,464,986	1,861,962,380	1,909,975,375	1,926,055,006
3	Kab. Badung	4,162,119,988	5,413,936,423	5,799,584,400	5,733,782,645
4	Kab. Gianyar	1,786,411,745	1,922,948,830	2,046,852,685	2,228,232,094
5	Kab. Klungkung	971,294,294	1,131,544,237	1,146,817,490	1,195,465,144
6	Kab. Bangli	1,089,450,148	1,021,996,019	1,171,071,638	1,161,031,649
7	Kab. Karangasem	1,450,662,759	1,506,221,683	1,480,600,621	1,654,068,655
8	Kab. Buleleng	2,200,205,551	1,122,121,858	2,064,477,377	2,284,243,845
9	Kota Denpasar	1,871,440,897	1,967,311,319	2,098,037,222	2,255,312,789

The screenshot shows the website interface for Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. The main content is a table titled 'Urutan / Description' with columns for 'Jembrana', 'Tabanan', 'Badung', 'Gianyar', 'Klungkung', 'Bangli', and 'Karangasem'. The table lists various expenditure categories such as 'Penerimaan Daerah/Local Government Revenue', 'Pendapatan Asli Daerah/Local Government Revenue', 'Dana Perimbangan/Balancing Funds', and 'Belanja Daerah/Expenditure of Local Government'. A 'Butuh Bantuan?' button is visible in the bottom right corner of the table area.

Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Bali diutamakan melalui layanan online seperti email [pst5100@bps.go.id](mailto:pst5100@bps.go.id) dan Whatsapp di nomor 081-810-5100. Seluru

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



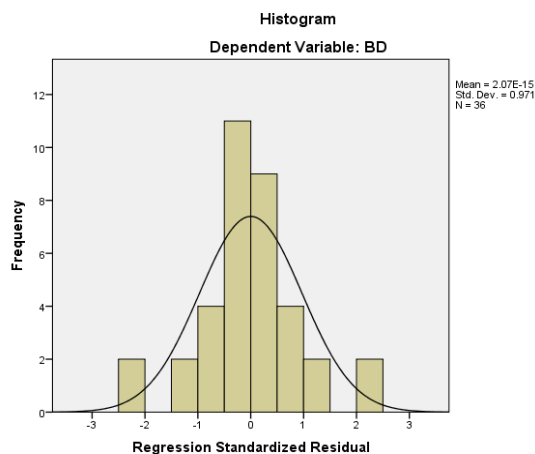
## Hasil output SPSS versi 24

### 1. Uji Descriptive Statistics

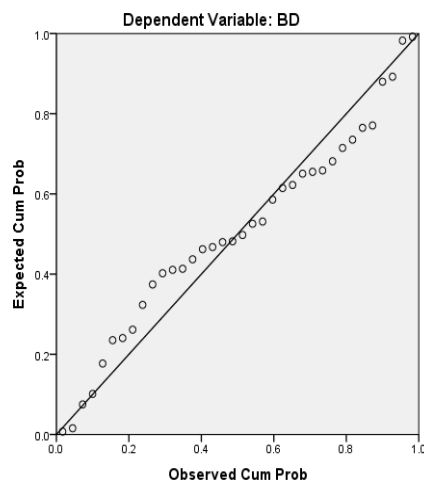
Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	36	104,592,348	4,835,188,460	813,116,579.00	1,285,341,840.000
DAU	36	330,336,650	1,028,451,956	658,402,717.30	178,809,661.500
BD	36	971,294,294	5,799,584,400	2,029,213,091.00	1,257,746,514.000
Valid N (listwise)	36				

### 2. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual





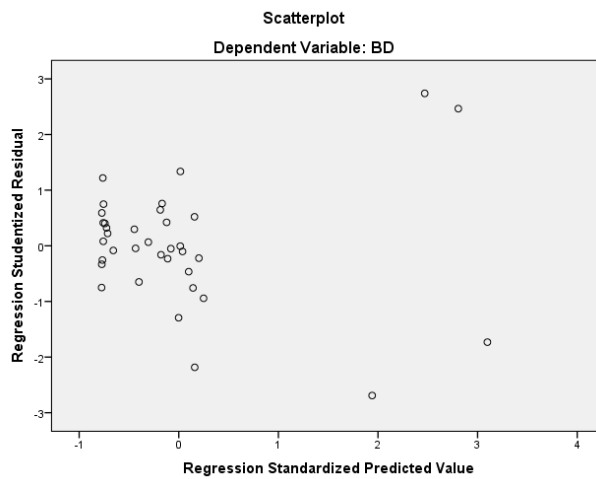
**b. Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.365		
	PAD	.000	.660	1.516
	DAU	.000	.660	1.516

a. Dependent Variable: BD

**c. Uji Heteroskedastisitas**



**d. Uji Autokorelasi**

**Uji Durbin – Watson**

Ada autokorelasi positif	Tidak dapat diputuskan	Tidak ada autokorelasi	Tidak dapat diputuskan	Ada autokorelasi negatif
0	dl	du	4-du	4-dl

**Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.996 <sup>a</sup>	.991	.991	121,783,329.100	2.114

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD  
b. Dependent Variable: BD

### 3. Uji Regresi Linier Berganda

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-96902052.580	105468999.300		-.919	.365
	PAD	1.103	.020	1.127	55.919	.000
	DAU	1.867	.142	.265	13.175	.000

### 4. Uji Hipotesis

#### Uji t (Parsial)

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-96902052.580	105468999.300		-.919	.365
	PAD	1.103	.020	1.127	55.919	.000
	DAU	1.867	.142	.265	13.175	.000

#### Uji F (Simultan)

#### Anova<sup>a</sup>

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	54877991330000000 000.000	2	274389956600000 02000.000	1850.089	.000 <sup>b</sup>
	Residual	48942891490000000 0.000	33	148311792400000 00.000		
	Total	55367420240000000 000.000	35			
a. Dependent Variable: BD						
b. Predictors: (Constant), DAU, PAD						

### Koefisien Determinasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.996 <sup>a</sup>	.991	.991	121,783,329.100
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD				
b. Dependent Variable: BD				



### Biodata Penulis



#### Data Diri

Nama : Alfita Aprilia Zahrotunisa  
 NIM : E20173026  
 TTL : Jembrana, 22 April 1999  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Jl. Pahlawan Sukoto No.51 Kec. Melaya, Kab. Jembrana-Bali  
 Handphone : 087885677042  
 Email : alfitaaprilia@gmail.com

#### Riwayat Pendidikan :

No	Institusi Pendidikan	Tahun
1	TK Nurul Huda I Melaya	2003-2005
2	SD Negeri 4 Melaya	2005-2011
3	MTS Negeri 3 Jembrana	2011-2014
4	MAN 1 Jembrana	2014-2017
5	UIN KHAS Jember	2017-2021

#### Pengalaman Organisasi:

Anggota Bidang Network HMPS Akuntansi Syariah 2018-2019  
 Ketua Bidang PSDM IMADE 2018-2019